

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

- **Krisis Ekonomi Global : Krisis Kepemerintahan atau Kepemerintahan Krisis? (Studi Kasus Krisis *Subprime Mortgage* Amerika Serikat 2008)**
Semmy Tyar Armandha
- **Pengaruh IMF terhadap Kebangkitan Ekonomi Rusia pada Kepemimpinan Vladimir V. Putin Tahun 2000 - 2008**
Ani Khoirunnisa, Teresia Devina
- **Konsumerisme dan Pembagian Kerja Internasional : Tantangan Indonesia dalam Proses Menuju *Newly Industrialized Countries* (NICs)**
Ziyad Falahi
- **Krisis Pangan Global : Isu Global Aksi Lokal (Studi Kasus : Indonesia)**
Denik Iswardani W, Elistania
- **Pengaruh Media Televisi Amerika Serikat terhadap Budaya Indonesia**
Yusran
- **Konsep Privatisasi dalam Globalisasi Ekonomi Neo-Liberal**
Dewa Ayu Putu Eva Wishanti



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Pemimpin Redaksi
Dekan FISIP

Redaktur Pelaksana
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Dewan Redaksi
Arin Fithriana
Denada Faraswacyen L. Gaol
Rusdiyanta
Bambang Pujiyono

Sekretaris Redaksi
Samsinar

Pemasaran
Elistania

Reviewer
Dato' Junaidi Abubakar

Alamat Redaksi
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur
Jln. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260
Telp. (021) 5853753 Ext.252

Email
Transnasional_bl@yahoo.co.id

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Sebelumnya, kami sangat menyesal dengan keterlambatan penerbitan jurnal ini. Ada beberapa kendala yang harus kami hadapi sehingga kami akhirnya bisa menerbitkan kembali jurnal ini. Banyak hal yang harus kami perbaiki berkaitan penyuntingan dan manajemen serta sirkulasinya. Kami sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam jurnal ini. Kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi bagi para pembaca.

Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Desember 2012

Salam kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

<i>Semmy Tyar Armandha</i>	Krisis Ekonomi Global : Krisis Pemerintahan atau Pemerintahan Krisis? Studi Kasus Krisis Subprime Mortgage Amerika Serikat 2008	100 – 119
<i>Ani Khoirunnisa</i> <i>Teresia Devina</i>	Pengaruh IMF terhadap Kebangkitan Ekonomi Rusia pada Kepemimpinan Vladimir V. Putin Tahun 2000 – 2008	120 – 134
<i>Ziyad Falahi</i>	Konsumerisme dan Pembagian Kerja Internasional : Tantangan Indonesia dalam Proses Menuju Newly Industrialized Countries (NICs)	135 – 147
<i>Denik Iswardani W</i> <i>Elistania</i>	Krisis Pangan Global : Isu Global Aksi Lokal (Studi kasus : Indonesia)	148 – 158
<i>Yusran</i>	Pengaruh Media Televisi Amerika Serikat terhadap Budaya Indonesia	159 – 168
<i>Dewa Ayu Putu Eva</i> <i>Wishanti</i>	Konsep Privatisasi dalam Globalisasi Ekonomi Neo-Liberal	169 – 185

**KRISIS EKONOMI GLOBAL: KRISIS KEPERINTAHAN
ATAU KEPERINTAHAN KRISIS?
(Studi Kasus: Krisis *Subprime Mortgage* Amerika Serikat 2008)**

Semmy Tyar Armandha¹
semmytyar@gmail.com

Abstract

The global economic crisis that triggered repeated and the U.S. subprime crisis in 2008 at least indicate a debate about the state's role in overcoming the crisis. This of course does not only occur in the United States, but all over the country affected by the crisis. As for the debate about how to position the country struggling in crisis: whether to be independent or linked, whether involved or just as a regulator, and even more so if the state has an interest in the crisis that has studied circulation long before the crisis occurred (ie that capitalism always had a natural and cyclical crisis). This paper originally wanted to raise the debate in the context of the contradictions and paradox of financialization of capitalism in the cause of the crisis. Financialization of capitalism (or hereinafter called financial capitalism) has a money exchange operation is very volatile and speculative that led to the crisis is more prone to happen. State in this case is not independent, it became an integral part because it has contributed to the passage of any legalization and legitimization market activity. Therefore the global economic crisis is not a crisis of governance, but governance of the crisis: namely, that the crisis is managed in such a way that even though the system will occur cyclically, the crisis can generate to new state's social control.

Keywords: *global economy crises, financialization of capitalism, neoliberalism, governmentality*

"It's not a question of worrying or hoping for the
best, but of finding new weapons."
-Gilles Deleuze

Pendahuluan

Fenomena globalisasi yang menguat sejak krisis finansial 1970-an membawa kapitalisme global memasuki fase baru, yaitu era 'Revolusi Finansial'. Dalam era ini hampir seluruh negara di dunia telah terkoneksi dalam sistem keuangan berbasis finansial berupa perputaran uang *virtual* yang terintegrasi secara global (Gilpin, 2001). Tercatat pertumbuhan ekonomi dunia meningkat tajam setelah adanya finansialisasi. Perputaran mata uang meningkat dari US\$ 15 milyar pada 1973 menjadi US\$ 1,2 triliun pada 1995. Hal ini meningkatkan pemerataan sirkulasi valuta dan kedekatan negara-negara dalam globalisasi.² Namun di sisi lain, finansialisasi sarat akan krisis. Dikatakan demikian karena sistem finansialisasi memungkinkan kebebasan yang tidak terkendali, yang menjadikan seluruh operasi ekonomi menjadi spekulatif. Hal ini karena terjadi demokratisasi setiap

¹ Alumnus Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur

linikehidupan ke dalam sistem finansial (Peet, 2009). Sebagai contoh, setiap orang diperbolehkan bermain dalam bursa saham selama ia mampu membeli setiap lembar sahamnya. Titik rentannya adalah apabila orang tersebut merasa merugi, ia dapat sewaktu-waktu menarik dananya sementara dana tersebut merupakan penopang berjalannya pasar. Salah satu contoh tindakan spekulasi ini adalah seperti apa yang dilakukan George Soros di pasar saham Asia pada 1998 (Gilpin, 2000). Ketika itu isu mengenai inflasi tinggi di Asia Tenggara membuat pengusaha ini menarik saham investasinya secara besar-besaran. Hal ini praktis membuat lantai bursa saham hampir di seluruh negara di Asia Tenggara mengalami koreksi (penurunan nilai saham dan mata uang) secara tajam.

Situasi ini menjadi kontradiktif. Di satu sisi finansialisasi memudahkan perpindahan dana, memudahkan kerjasama perdagangan internasional, dan memudahkan akumulasi kapital. Namun di sisi lain, finansialisasi sangat rentan terbawa ke dalam kondisi resesi oleh karena logika arus dana sebebas-bebasnya dan serenggang-renggangnya seseorang atau suatu entitas dalam mengoperasikan uangnya. Krisis di Eropa 1993 – 1994, dan krisis Asia 1998 – 1999 yang kemudian yang menjadi bencana ekonomi pada saat itu, menunjukkan betapa mudah seorang pemodal menarik dananya dari pasar Asia yang pada saat itu diprediksi akan mengalami resesi. *Dot-com bubble*, telah menunjukkan adanya kesalahan dalam struktur penggunaan *ICT (internet)* terhadap sistematika finansialisasi tersebut (Greenspan, 2007).

Krisis *subprime mortgage* adalah kontradiksi terbaru dari sistem kapitalisme finansial. Krisis di Amerika Serikat pada 2008 terjadi sebagai ledakan (*boom*) yang menyebabkan kolapsnya sistem finansial Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan seluruh negara yang terintegrasi dengan finansialisasi global. Krisis ini disebut-sebut sebagai krisis terparah sejak Depresi Besar (*Great Depression*) pada 1929 – 1933 (Stiglitz, 2010). Krisis di Amerika Serikat telah menggejala sejak 2005 bahwa harga perumahan melonjak tinggi disebabkan oleh adanya kredit yang belum terbayarkan. Pengusaha properti tidak dapat lagi menyediakan rumah karena kredit macet. Alhasil secara bertahap: 2006, 2007, hingga 2008, bank-bank yang telah mengucurkan kredit perumahan bangkrut karena kredit yang berlebih. Seperti yang BBC (*British Broadcasting Corporation*) laporkan (Soros, 2008), berbagai rumah pegadaian di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan. Hal ini menyebabkan banyaknya pekerja yang dipecat. Krisis juga ditandai oleh jatuhnya bank sentral Perancis, BNP Paribas yang mencatatkan penurunan likuiditas hingga miliaran *euro* pada bulan yang sama.

Pada saat yang sama perekonomian Amerika Serikat sedang mengalami penurunan. Setelah menghabiskan anggaran negara untuk berperang di Vietnam, Amerika Serikat dibebani oleh permasalahan utang luar negeri yang sangat besar. Gelembung *internet* (*internet bubble/dot-com bubble*), sebutan untuk krisis media maya pasca-finansialisasi ekonomi 1970-an (Soros, 2008), kolapsnya *European Rate Mechanism* pada 1992 – 1993 yang menyerang Inggris Raya dan terlihat dampaknya pada fragmentasi pergerakan menuju kesatuan moneter; dan kolapsnya *peso* Meksiko pada 1994 – 1995, yang mengancam dengan cepat krisis finansial di seluruh Amerika Latin (Gilpin, 2001), dan terakhir adalah invasi Amerika Serikat ke Afganistan dan Irak dalam rangka memerangi terorisme pascatragedi 9/11 menjadi akar pemicu beban Amerika Serikat dalam perekonomian domestiknya yang memaksa AS berutang.

Tetap dipertahankannya finansialisasi kapitalisme merupakan bentuk kontradiksi dan paradoks. Karena dengan dipertahankannya sistem ini maka senantiasa krisis akan terus berlangsung. Posisi negara dalam hal ini krusial dan signifikan: apakah independen dari krisis ataukah ia berdiri sebagai pihak yang diuntungkan. Hal ini yang membuat penulis mengajukan terminologi *keperintahan krisis*, bahwa problematika krisis dan relasinya terhadap negara akan berusaha dianalisis dalam konteks kontradiksi finansialisasi kapitalisme.

Rumusan Masalah

Dari permasalahan dan situasi kontradiktif tersebut, pertanyaan yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah, “*Bagaimana pemerintahan krisis berjalan pada masih dipertahankannya finansialisasi kapitalisme yang dengan segala kerentanan dan kontradiksinya dalam sistem ekonomi global, yang mana ditunjukkan dalam krisis yang kembali berulang pada krisis subprime mortgage Amerika Serikat 2008?*”

Kerangka Pemikiran

Mengikuti logika yang diajukan oleh Nick Srnicek mengenai adanya dinamika baru dalam relasi konstelasi global dan lokal, penulis mengajukan pemahaman baru mengenai level analisis. Dalam *Journal of Critical Globalisation Studies* tahun 2010, Srnicek menggambarkan konstelasi dunia pasca-Perang Dingin yang mencuatkan berbagai isu transnasional yang semakin melokal (Srnicek, 2010). Sejalan dengan tesis yang diajukan oleh Samuel Huntington akan adanya benturan peradaban karena hilangnya pengkutuban (dalam Amerika Serikat dan Uni Soviet), yang mana isu konflik lokal semakin menjadi *domain* studi hubungan internasional kontemporer (Huntington, 1996). Hal ini menunjukkan

adanya pergeseran relasi antara isu global dan lokal, yang tidak lagi bermuara pada analisis sistem *bipolar*, melainkan *multipolar* yang jauh lebih kompleks. Srnicek menggunakan konseptualisasi aktor jaringan yang menunjukkan adanya jaringan yang menggantikan relasi lama yang berbentuk tingkat analisis.

Dengan pemahaman ini, penulis lalu beranjak pada model pemikiran yang akan disajikan pada penelitian ini. Dengan menggunakan logika yang digagas oleh Srnicek tersebut, dengan demikian penulis tidak menggunakan kerangka berupa level analisis. Hasil analisis dari penelitian ini adalah hasil dari peleburan seluruh tingkat analisis mulai dari level individu, negara, hingga sistem (Mas'ood, 1990). Dengan kata lain keseluruhan hasil analisis ini berlaku bagi setiap level analisis.

Perjalanan sistem moneter internasional pascakrisis ekonomi global 1970-an hingga kini tidak dapat lepas dari finansialisasi kapitalisme dan lahirnya masyarakat jaringan. Finansialisasi menjadi fitur baru terutama sejak kemunculan era neoliberalisme yaitu seluruh kebijakan moneter dan fiskal diliberalisasi dari intervensi pemerintah, dan beralihnya standar moneter dolar ke standar mengambang. Hal tersebut memunculkan banyaknya teknologi baru khususnya adanya virtualisasi uang dan munculnya pasar valuta dan bursa saham. Pembaharuan ini memindahkan aktivitas ekonomi dari yang riil ke ekonomi finansial atau elektronik, dengan kata lain perputaran ekonomi didasarkan pada komoditas yang semakin tidak nyata (Mas'ood, 1990:122 – 123). Dalam hal ini jaringan (*network*) yang semakin memasyarakat (*network society*) turut menjadi pendorong berjalannya logika baru kapitalisme finansial, karena semakin terhubungnya aktor-aktor finansial (investor, kreditur, debitur, pialang, pengusaha, bursa saham, dll.) ke dalam jaringan yang seluruhnya terkoneksi (Castells, 2010).

Kapital Finansial merupakan terminologi yang pertama kali dibuat oleh Rudolf Hilferding (1981) dalam mengartikulasikan sistem ini sebagai pemusatan dan sentralisasi kapital ke dalam institusi-institusi seperti korporasi, bank, kartel, dan perserikatan (Peet, 2009:244 – 245). David Harvey melengkapinya dengan peleburan kepemilikan (*ownership*) dan manajemen (*CEO*) dalam satu perusahaan kapitalisme, dan reorientasi perumahan; asuransi; dan kepemilikan pribadi dalam finansial (Harvey, 2005:31 – 38). Dengan kata lain semua definisi tersebut mengarah pada 'finansialisasi segalanya', yang bermakna kontrol terhadap semua lini kehidupan oleh ekonomi global. Untuk menjelaskan logika yang bermain dalam finansialisasi kapitalisme, Christian Marazzi (Marazzi, 2010:27 – 28) mengkonseptualisasikannya dalam fase-fase rangkaian perubahan kapitalisme yang digagas Charles Kindleberger, yakni fase-fase krisis hingga fase pemulihan (konsolidasi dan

reorganisasi). Marazzi melihat fase tersebut dalam perubahan transisi mode kapitalisme Fordisme ke pasca-Fordisme pada 1970-an, yakni perubahan pola produksi dan manajerial yang lebih fleksibel. Dengan demikian finansialisasi lahir sebagai bentuk dari 'fase pemulihan' yang menuntut adanya fleksibilitas dengan adanya peleburan-peleburan baik kepemilikan maupun manajerial seperti yang disebut oleh Harvey.

Kedua logika ini (finansialisasi dan jaringan) menjadi fitur utama globalisasi dalam konteks ekonomi politik internasional yaitu batas-batas kedaulatan semakin renggang dan kabur (Castells, 2010:5). Namun bukan berarti bahwa kontrol negara terhadapnya begitu saja hilang dan redup oleh kedua logika yang mana menjadi bagian dari dinamika neoliberalisme ini. Negara justru hadir dan semakin kuat dengan adanya gestur kontrol baru ini. Michel Foucault dalam analisisnya terhadap kemunculan neoliberalisme, mengajukan konseptualisasi genealogi pemerintahan (*governmentality*) untuk melihat bagaimana negara tetap mengontrol meski fenomena globalisasi dan neoliberalisme serta fundamentalisme kebebasan pasar sedang eksis dalam tatanan global. Premis utama teori *governmentality* adalah: dalam masyarakat liberal modern, kekuasaan (*power*) diterapkan melalui pengetahuan (*knowledge*) (Vestergaard:27), di antaranya melalui (1) apa yang menjadi rasionalitas dalam praktik politiknya; (2) teknologi yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan (Miller&Rose, 1990:20). Hal ini dalam prosesnya, juga menelusuri bagaimana menghubungkan individu sebagai konstituen politik kepada pemerintah dan membawa keduanya tergabung dalam satu aliansi pemerintahan. Kedua poin tersebut akan menjadi area penyelidikan dalam penelitian ini.

Dalam melihat rasionalitas politik (poin 1), Foucault mendefinisikan konsep *governmentality* sebagai 'bentuk institusi, prosedur, analisis dan refleksi, kalkulasi dan taktik, yang membiarkan penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk kompleksnya (Lucarelli, 2010:122 – 123). Oleh karenanya, *governmentality* dapat dikatakan pula sebagai mekanisme dan proses dalam setiap aspek 'pemerintah' dalam kehidupan ekonomi. Keterlibatan pemerintah yang dapat dikatakan 'tidak secara langsung' terhadap ekonomi ini menjadi alat yang menjustifikasi berjalannya pemerintahan neoliberal (Miller&Rose, 1990). Ini menggambarkan adanya perencanaan ekonomi, prosedur kalkulatif aktor-aktor ekonomi dan relasi dalam tingkat manajemen; yang membutuhkan keahlian teknik produksi, dan fitur psikologi produksi di samping penarikan andil negara dalam kegiatan perekonomian.

Untuk melihat bagaimana secara spesifik *governmentality* dioperasikan sebagai teknologi (poin 2), Foucault menggunakan konsep *biopower*. *Biopower* merupakan pengoperasian kekuatan penciptaan kehidupan yang didasarkan pada *produktivitas* kolektif yang subyektif dalam suatu masyarakat. Dengan demikian unsur subyektivitas tersebut membentuk sentimen emosional (afeksi) yang melibatkan unsur konstitutif masyarakat. Untuk mengoperasionalkan konsep *biopower*, Foucault merujuk pada bagaimana konsep ini dapat menjelaskan *governmentality* secara lebih spesifik: yaitu pengaturan yang menjadikan rasionalitas politik menjadi kontrol sosial yang kuat. Dalam hal ini Stefano Lucarelli mengidentikkan kontrol sosial ini dengan pergerakan massa yang berdasarkan model masyarakat madani (Fumagalli&Mezzadra, 2010). Untuk mendapatkan kontrol sosial yang kuat, pemerintah akan bergerak berdasarkan logika demokrasi. Hal ini kontras dengan berbagai cara-cara lama untuk memanifestasikan kekuasaan, antara lain dengan tangan besi (tirani otokratik) dan dengan cara-cara militeristik.

Michael Hardt menggambarkan konsep *biopower* dengan eksistensi *pekerja imaterial/pekerja afeksi* dalam perkembangan kapitalisme kontemporer yang telah mengalami post-modernisasi (Hardt, 1999). Pekerja afeksi sendiri didefinisikan Hardt sebagai buruh yang tidak lagi bekerja dalam pabrik atau dengan kata lain tidak lagi bekerja secara kasar, memiliki alat produksi sendiri, memiliki ruang dan waktu tak terbatas dalam memproduksi barang dan jasa yang harus mengutamakan daya tarik dalam barang dan jasa tersebut. Hal ini tidak terlepas dari transisi kapitalisme model Fordisme ke model pasca-Fordisme, yang memungkinkan mode produksi yang semakin fleksibel. Transisi ini menunjukkan adanya: perubahan pola dari produksi massal ke produksi yang berbasis penawaran dan permintaan, perubahan manajerial buruh dari terpusat dan terikat dalam jajaran manajemen perusahaan menjadi terdesentralisasi ke manajemen-manajemen afeksi (berada di luar perusahaan seperti *Multi Level Marketing*, dsb.) (dalam Amin, 1994).

Bagaimana gestur *biopower* ini dapat diaplikasikan secara lebih spesifik dalam masyarakat kontemporer, khususnya masyarakat global? Dengan kata lain bagaimana agar pemerintahan dapat dijalankan tanpa harus ada bentuk paksaan eksplisit dari pemerintah yang berkuasa? Penulis menggunakan *teori jaringan kekuasaan (network theory of power)* (Castells, 2011). Teori ini dikembangkan oleh Manuel Castells dalam menganalisis perkembangan pemerintahan dalam memanifestasikan kekuasaannya. Sebagai gambaran, Castells mencontohkan adanya hubungan antara jaringan-jaringan yang berbeda entitasnya yang sifatnya sangat strategis. Seperti hubungan antara jaringan media dan kepemimpinan politik dalam membangun diskursus ideologi-politik. Kemudian hubungan

antara jaringan politik dengan jaringan agama yang membentuk diskursus sekularisasi masyarakat dan negara, dan relasi antara kesemua itu dengan jaringan militer yang membentuk strategi geopolitik. Dengan kata lain, konektivitas yang terjalin tersebut membentuk formulasi relasi individu dan negara dalam basis yang stabil atau dapat dikatakan tidak dapat digugat hasil yang didapat dari relasi tersebut.

Konektivitas dalam jejaring tersebut memungkinkan adanya “paksaan”, dalam arti, pemerintahan yang tidak langsung dilakukan pemerintah yang dapat langsung menjadi komando (perintah) bagi masyarakat (*civil society*). Jika pada pemerintahan otokratik seluruh komando dapat langsung diperintahkan melalui militer dan aparat negara, maka dalam pemerintahan neoliberal -khususnya neoliberal kontemporer- jejaring merupakan gestur yang digunakan dalam menyampaikan komando (*order*) tersebut. Dengan gestur penguasaan ini *pekerja imaterial* yang muncul setelah adanya desentralisasi manajemen buruh dan modus produksi yang fleksibel (pasca-Fordisme), adalah finansialisasi menjadi logika berikutnya yang mengoperasikan pekerja imaterial tersebut sebagai salah satu motor penggerak produksi dalam kapitalisme kontemporer yang berdasarkan jaringan (*network*).

Oleh karenanya dengan merujuk pada proposisi *governmentality* sebagai bentuk pemerintahan krisis dan dalam *biopower* struktur kekuasaan, dapat dinyatakan bahwa ‘finansialisasi’ adalah manifestasi kontrol pemerintahan dalam sistem kapitalisme neo-liberal. Meskipun rentan akan krisis, finansialisasi kapitalisme tetap dipertahankan sebagai basis material dalam sistem kapitalisme global kontemporer, dengan tujuan mengontrol kembali pemerintahan tanpa harus adanya intervensi terhadap pasar.

Tulisan ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Bagian pertama merupakan pengantar kepada permasalahan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua merupakan deskripsi kemunculan kapitalisme finansial dipandang dari aspek kemunculan neo-liberalisme dan transisi pasca-Fordisme. Bagian ketiga adalah ulasan deskriptif mengenai kontradiksi kapitalisme finansial serta analisis manifestasi pemerintahan neoliberal dalam melakukan kontrol sosial melalui finansialisasi terjejaring dan analisis studi kasus krisis *subprime mortgage* Amerika Serikat 2008, dan bagian terakhir merupakan kesimpulan.

Praktik Pemerintahan Neoliberalisme: Logika Kapitalisme Finansial

Interkoneksi atau interrelasi yang menjadi akar (*origins*) lahirnya kapitalisme finansial modern yakni antara transisi kebijakan ekonomi politik Keynesianisme kepada kebijakan neoliberal, dan transisi mode operasional Fordisme ke pasca-Fordisme. *Pertama*, dalam

neoliberalisme negara membebaskan transaksi finansial dari restriksi (pembatasan) sebagai sistem sebelumnya yang dianggap gagal menjadi sistem pengaturan pasar (Engelen&Konings, 2010:601). Dalam hal ini restriksi transaksi finansial menjadi pilihan kebijakan yang turut menopang jalannya modus produksi Fordisme (yang sarat akan produksi berbasis massal) yang membutuhkan restriksi tersebut guna bertahan dari gempuran persaingan entitas pasar lain (Jessop, 1994: 255 – 260). Pada kelanjutannya restriksi tersebut dicabut sehingga modus baru harus diciptakan guna dilakukan penyesuaian. Modus tersebut adalah finansialisasi, lebih spesifik adalah intensifikasi pertukaran asing (*Foreign Exchange*) untuk menggantikan pertukaran domestik yang telah kolaps. *Kedua*, terjadi tekanan besar terhadap pemerintah untuk menghemat pengeluaran kesejahteraan (yang diadakan untuk membayar ganti rugi terhadap rakyat selama perang Eropa abad 20-an terjadi) yang ditujukan untuk menyelamatkan berbagai aset seperti rumah, layanan kesehatan, uang pensiun, pendidikan, dana pengangguran, dsb. (Engelen&Konings, 2010:601). Kebijakan penghematan ini yang kemudian yang mengharuskan model manajerial pekerja untuk semakin terfleksibilisasi. Jika pada Fordisme manajerial pekerja bersifat kaku dan *rigid* serta padat karya, maka manajerial pada pasca-Fordisme diadaptasikan dalam desentralisasi manajemen bahwa pekerja tidak lagi diharuskan bekerja dengan target produksi tinggi (Jessop, 1994:255 – 260). Hal ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan akibat pengurangan dan penghematan yang dilakukan pemerintah dalam jaminan sosial.

Menjawab kebutuhan ini, teknologi baru bernama *digitalisasi* ekonomi merupakan hasil dari evolusi bertahap yang terjadi sebagai hasil pengembangan dari proses finansialisasi. Untuk melihat struktur *digitalisasi* ekonomi, Edward Malecki dan Bruno Moriset membuat suatu piramida yang menjelaskan bangunan ekonomi *digital*. Di tingkat paling atas merupakan inti program yang menjalankan proses ekonomi *digital*. Inti program ini berupa perangkat lunak yang berguna mengatur secara *virtual* sirkulasi pergerakan uang hingga investasi. Di tingkat selanjutnya, merupakan perangkat keras yang menjadi alat media transmisi menuju interkoneksi komputer lain. Tingkat ketiga merupakan tingkat informasi sudah menyebar dari satu *server* ke pengguna. Semua perangkat di ketiga lapisan teratas inilah yang mengontrol pergerakan tingkat paling bawah, yakni tingkat sumber daya riil digerakkan. Tingkat proses perputaran ekonomi nyata (biasanya digerakkan rakyat menengah ke bawah) di antaranya pertanian, pertambangan, nelayan, pembalakan dan sebagainya.

Paradoks Finansialisasi Kapitalisme dalam Praktik Kepemerintahan Neoliberal Krisis *Subprime Mortgage* Amerika Serikat 2008

Krisis sistemik (Marazzi, 2010:11 – 13) merupakan label yang sering diberikan pada krisis yang telah menggejala pada pertengahan 2007 ketika *American Home Mortgage*, penyedia pinjaman kredit perumahan mengalami kejatuhan total (Soros, 2008). Krisis ini tidak saja menerpa bank-bank Amerika Serikat tersebut, BNP Paribas yang merupakan bank sentral Perancis terkena dampaknya. Pada 2008, dua bank terbesar di Amerika Serikat *Lehman Brothers* dan *Meryl Lynch* bangkrut. *Wachovia*, *AIG*, dan *General Motors* yang merupakan perusahaan-perusahaan besar juga turut bangkrut (McNally, 2011). Tren pertumbuhan global mengalami penurunan drastis setelah adanya peristiwa ini. Beberapa peristiwa kejatuhan saham di berbagai bank dan perusahaan dapat dilihat pada tabel.

Jatuhnya perekonomian global yang dimulai pada kejatuhan pasar saham Amerika Serikat merupakan paling dalam yang pernah dialami sejak Depresi Besar 1929. Krisis yang terjadi sepuluh tahun setelah krisis Asia Timur ini singkatnya berawal dari terjadinya penumpukan investasi dan saham (*bubble*) pada sektor perumahan Amerika Serikat (McNally, 2011) yang menyebabkan kredit dikucurkan sedemikian besar bagi warga AS. Kredit tersebut ternyata terlalu besar sehingga menimbulkan naiknya konsumerisme masyarakat AS hingga terjadilah krisis kredit. Kreditur tidak dapat lagi membayar tunggakan kredit perumahan. Debitur yang memiliki dana di bank dan perusahaan peminjam dana lain juga mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, sehingga berujung pada macetnya dana di bank-bank besar yang mengucurkan pinjaman. Alhasil simpanan di bank semakin berkurang sementara nasabah-nasabah besar berkeinginan menarik tabungannya. Bank tidak mampu mengeluarkan tabungan tersebut karena simpanan semakin menipis. Keadaan ini dapat dilihat dari tren penurunan nilai aset real estate sebesar 35% dalam 6 tahun, dan penurunan aset non-*real estate* sebesar 55% dalam 3 – 4 tahun (Marazzi, 2010).

Dengan kata lain, penurunan ekonomi global yang menggejala sejak 2007 ini merupakan efek *detrimental* (Chi Lo, 2010) dari pertumbuhan pesat ekonomi global sejak berakhirnya krisis Asia pada awal 2000-an. Pertumbuhan pesat ini menyebabkan berbagai sirkulasi finansial di dunia mengalir deras sedemikian rupa sehingga memunculkan gelembung yang berujung pada proliferasi kredit (*rent*), yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai pembangunan di segala lini. Dalam hal ini lini yang dimaksud adalah perumahan. Alhasil kredit ini yang menyebabkan depresi kian mendalam. Perusahaan dan bank sebagai pemain utama dalam pasar saham mengalami kejatuhan karena logika kredit memiliki unsur spekulatif dan risiko yang tinggi.

Pada akhirnya pertukaran komoditi menjadi ketergantungan dengan sistem bebas ini sehingga cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi global ditentukan dalam mekanisme yang sangat berisiko.

1. **Manifestasi Kepemerintahan Neoliberal: *Governmentality* dan Kekuatan Jaringan Global**

Pada bagian ini merupakan saatnya menguraikan praktik apa yang dikreasikan untuk kemudian mengkomodifikasikan seluruh proses kehidupan dalam era finansialisasi. Sebelum itu perlu ditekankan kembali bahwa krisis yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan kontradiksi internal dalam basis material kapitalisme. Dua pemikiran besar yang dapat diambil untuk memaknai krisis tersebut dan praktik apa yang mendasari krisis, atau lebih jauh lagi praktik apa yang baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan krisis tersebut yakni pemikiran Karl Marx dan Michel Foucault. Marx mengatakan bahwa krisis adalah peristiwa inheren yang terjadi dalam sistem kapitalisme, dan dibutuhkan sistem ini untuk mereplikasi dirinya dengan teknologi baru yang dapat meredam gerakan buruh (Hammond, 2009). Kealamian (inherenitas) ini berdasarkan pemikiran Marx bahwa basis material selalu mengalami kontradiksi. Di satu sisi akumulasi kapital dapat memenuhi suatu kebutuhan, namun di sisi lain akumulasi kapital justru melalaikan kebutuhan lain. Hal ini akan terjadi terus-menerus selama kapital masih eksis. Kapital, dengan kata lain menjadi basis material yang terus mengalami perubahan. Seperti yang disinggung dari bab sebelumnya, basis material kapitalisme telah berubah sejak masa revolusi finansial 1970-an dalam rupa ekonomi *digital* dan jaringan.

Sisi pemikiran Marx ini menurut Foucault mengalami keterbatasannya dalam hal menjelaskan bagaimana kelanjutannya: bagaimana pemerintah secara politik-ekonomi memanfaatkan kontradiksi tersebut demi keberlangsungan dan berjalannya kontrol terhadap kehidupan masyarakat sehingga eksistensinya dalam kedaulatan tidak tergoyahkan (Lazzarato, 2002). Oleh karenanya Foucault meramu suatu teoritisasi baru guna mengatasi keterbatasan ini. Melalui analisisnya terhadap *power*, ia merumuskan bahwa *power* (kekuasaan) dipraktikkan guna mengukuhkan kedaulatan yang dapat mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat hingga pada lapisan terkecil seperti keluarga hingga aktivitas kehidupan sehari-hari. Namun kekuasaan (*power*) di sini tidak dipraktikkan secara otoritas atau totalitarian seperti pada zaman feodalisme, melainkan dengan cara yang lebih halus yakni dengan menciptakan pengetahuan baru yang secara diskursif mendukung berbagai klaim pemerintah mengenai apa yang benar dan apa yang tabu. Untuk hal ini, Foucault

merumuskan teori diskursus untuk menjelaskan bagaimana suatu diskursus dapat mengalahkan diskursus lain dan menjadi diskursus utama.

2. **Governmentality: Praktik Dispositif dan Mobilisasi Buruh Imaterial dalam Finansialisasi Kapitalisme**

Dengan membuat suatu tatanan diskursus, pemerintah membuat peraturan yang mengatur peraturan yang mengatur aturan dan seterusnya. Foucault mengatakannya sebagai *conduct of conduct*, yakni logika memimpin seorang pemimpin yang kemudian mengatur seluruh individu sesuai dengan rasionalitas yang mendasari kepentingan kedaulatan (Nadesan, 2008). Dengan hal tersebut, pemerintah membuat suatu *political knowledge* yakni pengetahuan politis, atau dengan lebih jelas lagi pengetahuan yang terpolitisasi. Pengetahuan dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan pemerintah untuk menconduct jalannya pemerintah hingga jalannya kehidupan seseorang. Cara agar *conduct* tersebut sampai pada tujuan, disebut Foucault sebagai teknologi. Teknologi merupakan sistem atau struktur yang secara rapih membentuk kinerja dan berupa dalam kegunaannya sebagai alat. Alat yang dimaksud dalam arti abstrak inilah yang digunakan dalam menjalankan *conduct*, yaitu agar rasionalitas pemerintah dapat masuk mengatur kehidupan masyarakat hingga ke akar rumput. Sehingga dengannya masyarakat menjadi entitas yang semakin mandiri mengatur dirinya sendiri (*self-govern*) tanpa harus ada perintah langsung dari negara. Kembali pada kerangka *power*, teknologi yang berupa pada struktur tersebut dapat berbentuk institusi, mekanisme administratif, dan kontrol fisik. Inilah yang disebut *dispositif*. *Dispositif* merupakan bentuk dari *power* itu sendiri bahwa berbagai aturan main dan bentuk-bentuk hukum merupakan instrumen nyata penjamin berjalannya *conduct of conduct* yang diciptakan pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan pada kerangka pemikiran, area penyelidikan yang disediakan *governmentality* terdiri dari dua bagian: pertama adalah rasionalitas politik, terdapat rangkaian pemikiran yang terbentuk pada rasio struktur pemerintahan, yang nantinya akan berubah menjadi *knowledge* (pengetahuan) guna membentuk *mindset* yang dikonduksikan ke dalam struktur kehidupan masyarakat. Dan kedua adalah teknologi yang diciptakan guna mencapai teraplikasikannya pengetahuan tersebut ke dalam struktur masyarakat. Artinya dalam suatu pemerintahan, akan dirumuskan berbagai rasionalitas. Rasionalitas inilah yang berisi berbagai pertimbangan, strategi, kalkulasi untung-rugi, kondisi geografis hingga demografi, konstelasi global, konstelasi konflik, arus kapital, dan sebagainya yang mengandung pemikiran agar kontrol dapat tetap dilakukan guna menjaga posisi kedaulatan.

Rasionalitas inilah yang menjadi dasar bagi pemilihan teknologi yang sekiranya dapat cocok dengan posisi rasionalitas tersebut. Teknologi inilah yang menjadi area penyelidikan selanjutnya dari pemikiran Foucault. Dengan kata lain, bagaimana suatu rasionalitas dapat membentuk tata pengetahuan dan menjadikannya tata cara kehidupan, sehingga tercipta suatu mekanisme *conduct to conduct*. Mekanisme inilah yang termanifestasi pada praktik *biopower*.

Rasionalitas Pemerintahan

Transisi Fordisme menuju pasca-Fordisme dan munculnya kebijakan makro ekonomi neoliberalisme merupakan transisi basis material dan politis yang menjadi landasan rasionalitas politik pemerintahan krisis. Seperti yang dijabarkan pada BAB II, produksi dijalankan tidak lagi dengan metode *assembly line* yang menghasilkan produk dengan jumlah massal tanpa memperhatikan sisi permintaan-penawaran. Oleh karena suplai subsidi tidak lagi didukung pemerintah lewat berbagai kebijakan Keynesian, produksi tersebut diharuskan menyesuaikan pendapatan perusahaan itu sendiri. Alhasil kerja buruh tidak lagi kaku dan tersentralisir. Untuk mengurangi beban, diadakanlah berbagai metode baru dalam perekrutan pekerja seperti *outsourcing* dan pekerja *freelance*. Kedua contoh jenis pekerja baru tersebut merupakan contoh manajemen yang terdesentralisir. Jika dahulu pekerja hanya dapat dikontrol di dalam perusahaan dan dengan kontrak mengikat, maka sekarang pekerja dapat dipanggil sesuai kebutuhan dan tanpa ikatan tertentu. Kondisi perubahan basis material ini secara internal menyebabkan banyaknya perubahan. Negara dalam hal ini tidak lagi terlibat sebagai “bapak” yang terus menerus “memanjakan anaknya”, dengan kata lain negara tidak lagi menjadi tumpuan perusahaan-perusahaan dalam proses operasionalnya. Perusahaan menghadapi kondisi tersebut tidak mampu lagi memproduksi barang secara massal. Dengan demikian proses manajerialisasi juga tidak dapat lagi dilangsungkan secara *scientific* dan terstruktur secara rapi (kaku). Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Kondisi perusahaan harus mandiri secara permodalan, perdagangan, dan investasi.

Teknologi Pemerintahan

Sebagai tinjauan komparatif, sistem finansial yang sejak awal 1990-an telah diterapkan dalam ekonomi global berbeda dari sistem finansial sebelumnya. Jika sebelumnya pasar saham dan perdagangan finansial dipusatkan pada otoritas bank (*bank-centered market*), maka sistem yang ada sekarang merupakan otoritas pasar itu sendiri (*self-regulating market*). Dengan kata lain pasar saham diciptakan ke arah pasar persaingan

sempurna. Berkembangnya ide otoritas pasar (*self-regulating market*) sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-18 melalui paham *laissez-faire*. Paham ini mengartikulasikan otoritas pasar dengan mendistingsikan entitas pasar, populasi, dan negara. Tatanan inilah yang mendorong lahirnya teknologi pemerintahan terhadap krisis ekonomi global.

Menggabungkan pemikiran *Collective minds* dari Terranova, *Governmentality* memiliki kesamaan dalam menginterpretasikan kontrol terhadap masyarakat. Dalam logika *collective minds*, buruh merupakan komoditi yang semakin mahal harganya karena semakin cerdas dan berpendidikan serta dapat melakukan banyak pekerjaan karena memiliki bermacam keahlian (Terranova, 2004). Munculnya pekerja model ini merupakan hasil dari perkembangan transisi Fordisme ke pasca-Fordisme bahwa fleksibilitas kerja, modus produksi, dan akumulasi kapital semakin memudahkan pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan berbagai kreativitas dan keahliannya. Adanya kebaharuan ini menuntut pekerja semakin memasyarakatkan produknya bahkan jika perlu memakai produk tersebut dan mengidentifikasi diri sebagai produk tersebut. Identifikasi produk pada diri tersebut tercermin pada konsep buruh lepas. Konsep buruh lepas bahkan tidak terkungku pada satu aspek buruh pekerja yang bekerja di suatu perusahaan dan tidak memiliki kontrak terikat, namun lebih dari itu, merupa pada konsumen. Konsumen dengan memakai suatu produk, dengan otomatis mereplikasikan produk tersebut kepada khalayak masyarakat sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mereplikasi tindakan konsumen tersebut.

Collective minds berusaha mencapai hal tersebut. Dengan menjaring pekerja berintelejensi tinggi, produk dibuat sedemikian menarik tidak hanya dari segi kualitas (bahkan kualitas juga sering diabaikan) namun dari segi penampilan luar dan afeksi yang terkandung dari barang atau produk tersebut. Dengan menjaring pekerja dengan intelejensi tinggi itu pula dimungkinkan terjadi pembentukkan pola pikir yang sama yang menjadi pemikiran yang kolektif. Bagaimana mencapainya? Yakni dengan menggunakan fitur teknologi baru yakni *internet*. Dengan *internet*, suatu barang dapat diperjualbelikan dengan mudah. Dalam ekonomi *digital* yang sebelumnya dipaparkan, dimungkinkan suatu barang disebarluaskan dalam *e-commerce*. Melalui *e-commerce* penjualan juga dapat semakin mudah karena memungkinkan adanya transaksi keuangan *virtual* (via ATM).

Penguasaan akan jaringan intelejensi manusia ini, seperti yang diargumentasikan oleh Don Tapscott, merupakan upaya mencapai kualitas tak terbatas dari produk yang dihasilkan. Dengan mengontrol intelejensi yang saling melengkapi, perusahaan dapat secara maksimal mencapai kualitas produk tertentu. Kualitas suatu produk tentu terbatas dalam arti bentuk, fungsi, dan estetikanya.

Namun yang menjadikannya tak terbatas adalah nilai tambah yang disematkan padanya. Nilai tambah ini dapat berupa afeksi, bahwa terdapat begitu banyak layanan yang ditambahkan dalam produk tersebut: seperti keramahan penjualnya, kemudahan mengakses barangnya, bentuk kemasannya yang menarik, hingga bonus atau diskon yang semakin meningkatkan ketertarikan di produk tersebut.

3. Kepemerintahan Neoliberal dalam Jaringan Global

Manuel Castells membuat suatu proposisi mengenai teori kekuasaan jaringan guna memaknai situasi perkembangan teknologi ini. Kekuasaan jaringan dimanifestasikan melalui suatu struktur jaringan yang merupa pada teknologi informasi dan komunikasi. Dengan membentuk suatu jaringan (dalam hal ini *internet*), dimungkinkan para pekerja cerdas tersebut terhubung satu sama lain dan menjadi agen-agen dalam menyebarkan produk. Castells seperti Foucault, juga merumuskan pandangannya mengenai *power*. Jika Foucault lebih luas pandangannya akan *power*, yakni bentuk *conduct to conduct* dalam rangka mempengaruhi aktor atau pihak lain atau bahkan menghilangkannya dengan tujuan mencapai rasionalitas yang telah ditetapkan; Castells lebih spesifik lagi menjabarkan *power* sebagai tindakan yang mempengaruhi aktor lain dengan medium jaringan.

Finansialisasi kapitalisme memiliki fitur adanya pendemokratisasian kapital dan faktor produksi kepada khalayak masyarakat (Davis, 2008). Dalam logika pasca-Fordisme, finansialisasi merupakan kebutuhan untuk memutar kapital tersebut dengan lebih dinamis oleh karena ketiadaan subsidi pemerintah. Dengan semakin dinamisnya pergerakan kapital, maka kapital tersebut dengan sendirinya semakin bertambah dan merata sehingga permintaan akan terus terjaga. Perusahaan selain harus menjamin jalannya produksi dapat seefisien mungkin, juga harus menjaga keberlanjutan permintaan. Tanpa bantuan pemerintah hal ini merupakan hal yang cukup sulit. Maka diciptakanlah instrumen program bernama pinjaman (kredit). Kredit ini yang kemudian dipakai untuk diberikan pada konsumen agar konsumen dapat membeli barang kepada perusahaan sehingga permintaan tetap berjalan. Tentu hal ini tidak dilakukan secara langsung dari perusahaan kepada konsumen, melainkan melalui lembaga bank dengan menyimpan simpanan hasil produksinya di bank tersebut. Selanjutnya bank yang akan memberikan pinjaman berupa kartu kredit.

Sedangkan dalam logika evolusi neoliberalisme dari yang sebelumnya Keynesianisme, hadirnya finansialisasi kapitalisme merupakan bentuk pembebasan terhadap berbagai hambatan perdagangan seperti proteksionisme dengan instrumennya tarif bea masuk tinggi; pengurangan pajak agar perusahaan dapat bertahan dengan bersaing;

dan pengakuan akan hak milik agar setiap produk dapat dimiliki sendiri dengan keuntungan yang berlipat (hal ini sesuai dengan prinsip *mutual enrichment* oleh Adam Smith yang tercermin dalam teori *invisible hand* bahwa pengayaan terhadap diri sendiri akan berakibat pada terpenuhi dan meratanya kesejahteraan). Dengan kebijakan yang berorientasi lebih kepada individu itu tersebut, ekonomi dunia dikondisikan dalam globalisasi yang semakin mengintegrasikan negara-negara ke dalam satu sistem integral yaitu finansialisasi. Dengan finansialisasi, aktivitas perekonomian dunia menjadi terkait satu sama lain. Dengan adanya kebebasan berdagang dan bebas dari pajak, semakin dibutuhkan sistem yang memungkinkan semua negara ekonomi saling terhubung. Finansialisasi dalam hal ini menjadi ujung tombak dalam menjamin prakondisi ini. Divirtualisasinya uang ke dalam bentuk saham, semakin cepatnya arus informasi, dan kuatnya jaringan, membuat kebutuhan akan adanya pengintegrasian ekonomi semakin terpenuhi. Dengan adanya finansialisasi, perusahaan yang tidak lagi mendapatkan subsidi semakin lancar bertransaksi, dan hal ini dijamin oleh badan-badan keuangan internasional yang fungsinya diintensifkan kembali seperti: *IMF*, *World Bank*, dan *WTO* sebagai *regulator*.

Dalam logika tersebut, terlihat bahwa mekanisme pengaturan sudah sejak awal terjadi pada proses transisi. *Knowledge* (pengetahuan) yang berubah sejak transisi pasca-Fordisme merupa pada bentuknya yang baru. Jika dahulu sistem pengaturan ekonomi politik bertumpu pada kebijakan welfariat dan subsidisional, maka sekarang didengungkan pengetahuan baru yakni proses produksi yang tidak lagi kaku dan tersentralisir. Dengan lahirnya *knowledge* yang baru ini, permasalahan krisis dapat diatasi, sehingga pemerintah mendapatkan legitimasinya kembali dan rasionalitas mereka dapat kembali ditegakkan sebagai *conduct to conduct*. Setelah runtuhnya sistem manajerial *scientific* Taylorisme dan kesejahteraan Keynesian yang terbukti semakin memiskinkan negara yang mengalami utang tinggi, pemerintah kehilangan legitimasinya dengan berbagai unjuk rasa dan protes. Dengan aksi-aksi tersebut pemerintah semakin terjepit posisinya. Foucault memandang tindakan untuk mencapai *conduct of conduct* kembali pada tangan pemerintah tersebut merupakan upaya menciptakan *knowledge* dengan membentuk diskursus baru. Inilah yang menjadi kunci argumentasinya, yaitu dengan menciptakan teknologi baru.

Teknologi ini yang merupakan instrumen dalam menerapkan *knowledge* secara lebih praktikal. Logika kecerdasan kolektif (*collective minds*), seperti yang telah dijelaskan, memobilisasi pekerja dengan intelegensi tinggi. Yang akan penulis tekankan di sini adalah wujud apa yang telah ada dalam sistem finansialisasi kapitalisme yang mengalami krisis ini. Hal ini untuk melihat krisis apa yang mendasari krisis ekonomi.

Dengan bahasa yang lebih spesifik dan sederhana: sistem apa yang rusak sehingga menyebabkan krisis terjadi. Sejak terjadinya krisis Asia, dapat dilihat dalam beberapa kondisi: pertama, finansialisasi pada periode Asia, hanya mawujud pada finansialisasi berbasis pertukaran dana dan modal yang terintegrasi dalam satu jaringan global yang mana belum merupa pada jaringan tersistematis seperti pada saat krisis *subprime mortgage* 2008. Namun bukan dalam arti tidak ada jaringan tersistematis melalui perkembangan *ICT*. Seperti yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, ekonomi *digital* telah menjadi bagian dari siklus ekonomi global sejak awal 1990-an setelah berkembangnya *internet*. Oleh karenanya, krisis seperti yang telah disajikan dalam data, merupakan bentuk dari kerusakan jaringan yang mengglobal. *Dot-com bubble* merupakan bentuk krisis tersebut bahwa perusahaan penyedia jaringan *internet* mengalami kerugian besar karena adanya spekulasi dana di pasar saham yang menarik dana investasinya dari perusahaan penyedia *internet*. Hal ini dengan demikian merupakan penegasan akan adanya kerusakan (disfungsi) dalam pemanfaatan jaringan kerja komputerisasi nirkabel dalam finansialisasi kapitalisme. Christian Marazzi menyebut masa ini merupakan bentukan dari adanya “konvensi *Internet*” yang senada juga disebutkan oleh Joseph Stiglitz:

“Modern American-style capitalism was pivoted around what would later be called the New Economy, symbolized by the so-called **dot-coms** that were revolutionizing the way that America—and the rest of the world—did business, modifying the rhythms of the very technological shifts and increasing the growth rate of productivity to extraordinary levels, that had not been seen for over 25 years. [...] Halfway through the '90s, the manufacturing sector had slipped to a scarce 14% of total production, with a percent of employees even lower in respect to the active population.” (Fumagalli&Mezzadra:132)

Dalam krisis Asia terlihat bahwa keberadaan institusi keuangan internasional yang menjadi *conduct* dalam penyelesaian krisis ternyata merupakan masalah dalam penyelesaian krisis tersebut. Setelah *IMF* ikut campur, krisis ekonomi berubah menjadi krisis multidimensional di negara-negara yang menjadi peminjam. Hal ini tentu menambah deretan rekam jejak yang negatif di negara berkembang. Oleh karenanya, seperti yang telah dijelaskan, melalui G20 dijejangkannya lagi negara-negara berkembang tersebut guna mendapatkan kepercayaannya. Melalui G20, dengan demikian telah tercipta modus baru kekuasaan berjejaring. Dalam hal ini seperti yang dikatakan Manuel Castells: “*power in the network society is exercised through networks.*” Hal ini menggambarkan bahwa jaringan yang semula menjadi kausalitas krisis Asia Timur (dalam *dot-coms bubble*), berusaha diperbaiki dengan menciptakan jaringan baru (G20).

Kesimpulan

Seni pemerintahan negara berdaulat dalam era neoliberalisme sejatinya telah berevolusi dalam bentuk baru dengan mendayagunakan sistem finansialisasi kapitalisme dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem kebijakan ekonomi politik yang terdesentralisasi serta pola pengelolaan produksi yang terfleksibilisasi, merupakan modus baru yang lahir dari rasionalitas pemerintahan liberal. Modus rasionalitas inilah yang melahirkan pengendalian masyarakat dengan cara baru, yakni jaringan. Dengan adanya kontrol terhadap kehidupan, negara tidak lagi memerintah dengan cara otokratik/*totalitarian*. Dengan seni pemerintahan (*governmentality*) yang mengatur tata cara kehidupan, negara melakukan kontrol secara ragawi (*biopower*); dimulai dari cara hidup, relasi antarindividu, hingga makna kebebasan. Inilah yang dilakukan melalui finansialisasi, yakni mendesentralisasikan operasi kapital dan menintegrasikannya dalam sistem global dengan tidak hanya melalui kontrol terhadap cara hidup dan kehidupan, namun juga dimanifestasikan melalui pekerja imaterial/pekerja afeksi dalam perkembangan kapitalisme kontemporer yang telah mengalami postmodernisasi.

Dengan demikian, penulis menggunakan pendekatan Foucauldian yang telah melampaui relasi negara-pasar untuk melampaui perdebatan mengenai krisis. *Negara bukanlah berada dalam cengkeraman katastropi krisis, melainkan sebagai entitas yang paling diuntungkan dalam rangka semakin mempertegas rasionalitas politiknya, dan entitas yang dapat dengan mudah mempertajam kontrolnya melalui pembentukan pengetahuan dan teknologi guna menjadi pengendali tubuh terhadap masyarakat.* Rasionalitas politik di sini tidaklah terikat pada teknis pengelolaan negara, bahwa negara dapat memilih antara menggunakan pendekatan intervensionis atau konservatif pasar bebas. Rasionalitas politik ini dapat berubah dari zaman ke zaman mengikuti pola transformasi yang terbentuk dari krisis yang melatarbelakanginya.

Daftar Pustaka

Buku

- Amin, Ash. 1994. *Post-Fordism: A Reader*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Amin, Samir ed. 1982. *Dynamics of Global Crisis*. New York: Monthly Review Press.
- Arrighi, Giovanni. 1996. *The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times*. London: Verso
- Castells, Manuel. 2009. *Communication Power*. New York: Oxford University Press

- _____. 2010. *The Rise of the Network Society (2nd Edition)*. UK: Blackwell Publishing
- Doering, Detnar. 1999. *Liberalisme*. (Terj. Zaim Rofiqi). Jakarta: Freedom Institute
- Fumagalli, Andrea & Sandro Mezzadra. 2011. *Crisis in the Global Economy*. Los Angeles: Semiotext(e)
- Gabor, Daniela. 2011. *Central Banking and Financialization: A Romanian Account of how Eastern Europe become Subprime*. London: Palgrave Macmillan
- Gilpin, Robert. 2000. *The Challenge of Global Capitalism: the world economy in the 21st century*. New Jersey: Princeton University Press
- _____. 2001. *Global political economy: understanding the international economic order*. New York: Princeton University Press
- Goede, Marieke De. 2005. *Virtue, Fortune, and Faith: A Genealogy of Finance*. London: University of Minnesota Press
- Green, Lelia. 2010. *The Internet: An Introduction to a new media*. New York: Oxford University Press
- Greenspan, Alan. 2007. *The Age of Turbulence: Adventures in a New World*. New York: Penguin Press
- Hammond, Scott John. 2009. *Political Theory: An Encyclopedia on Contemporary and Classic Terms. Karl Marx*. London: Greenwood Press
- Hanes, Richard C. 2002. *Historic Events for Students: The Great Depression*. USA: Thomson Gale
- Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press
- Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: Gramedia
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. New York: Oxford Press University
- Koshaka, Akira, e.d. 2004. *New Development Strategies: Beyond the Washington Consensus*. Osaka: Palgrave
- Krugman, Paul. 2009. *The Return of Depression Economics and The Crisis of 2008*. New York: W.W Norton Company
- Lenard, Thomas M. dan Daniel B. Briton. 2006. *The Digital Economy Fact Book: Eight Edition, 2006*. Washington DC: The Progress and Freedom Foundation
- Lo, Chi. 2010. *China After the Subprime Crisis Opportunities in the New Economic Landscape*. New York: Palgrave McMillan
- Machin, David dan TheoVan Leeuen. 2007. *Global Media Discourse: A Critical Introduction*. New York: Routledge

- Malecki, Edward J. dan Bruno Moriset. 2008. *The Digital Economy: Business organization, production processes, and regional developments*. New York: Routledge
- Mandel, Ernst. 1976. *Late Capitalism* (terjemahan Joris De Bres). London: New Left Books
- Marazzi, Christian. 2010. *The Violence of Financial Capitalism*. Los Angeles: Semiotext(e)
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LPES
- McNally, David. 2011. *Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance*. Oakland: PM Press
- Morgan, Glenn e.d. 2010. *The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis*. New York: Oxford University Press
- Nadesan, Majja Holmer. 2008. *Governmentality, Biopower and Everyday Life*. New York: Routledge
- Ness, Immanuel & Azzelini. 2011. *Ours to Masters and to Own: Workers Control from the Commune to the Present*. Chicago: Hymarket Books
- Passavant, Paul A. dan Jodi Dean. 2004. *Empire's New Clothes: Reading Hardt and Negri*. New York: Routledge
- Peet, Richard. 2009. *Unholy Trinity: the IMF, World Bank, and WTO*. New York: Palgrave Macmillan
- Rantanen, Tehri. 2005. *The Media and Globalization*. London: Sage Publication
- Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia: edisi ke-3*. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta
- Skousen, Mark. 2007. *The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx, and John Maynard Keynes* (London: M.E Sharpe)
- Soros, George. 2008. *The New Paradigm for Financial Markets the credit crisis of 2008 and what it means*. New York: PublicAffairs
- Stiglitz, Joseph, e.d. 2010 (a). *The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance*. New York: Oxford University Press
- _____. 2010 (b). *Time For a Visible Hand: Lessons from the 2008 World Financial Crisis*. New York: Oxford Univ. Press
- Sweezy, Paul. 1977. *Une Critique dalam Maurice Dobb dan Paul Sweezy. Du feodalisme au capitalisme: problemes de la transition* (terjemahan Florence Gauthier dan Francois Murray) Paris: Francois Maspero
- Terranova, Tiziana. 2004. *Network Culture: Politics for the Information Age*. London: Pluto Press
- Vestergaard, Jakob. 2009. *Discipline in the Global Economy? :International Finance and the End of Liberalism New Political Economy*. New York: Taylor & Francis Routledge

Williamson, John. 1989. *What Washington Means by Policy Reform*. Washington: Institute for International Economics

Jurnal

Hardt, Michael. *Affective Labor*. (Boundary 2, 26:2, Duke University Press, 1999)

Hardt, Michael. *Pekerja Afektif*. Terjemahan Fitri Bintang Timur (Boundary 2, 26:2, Duke University Press, 1999)

Lazzarato, Maurizio. (2002) *From Biopower to Biopolitics*. Warwick Journal of Philosophy

Larner, Wendy. *Neo-liberalism: Policy, Ideology, Governmentality* (Studies in Political Economy)

Miller, Peter & Nikolas Rose (1990): *Governing economic life, Economy and Society*, 19:1

Parnohadiningrat, Sudjanan. (2009) *Indonesia and the G-20: Participating in an inclusive Global Governance Framework for the 21st Century Challenge*, The Indonesian Quarterly, CSIS, Vol.37, No.1

Polimpung, Hizkia Yosie. (2011) *Tata Dunia Baru? World Economic Forum dan (Re-)Konsolidasi Tatanan Global*. Prosiding pada panel Teori-Teori Hubungan Internasional dan Isu-isu Ekonomi-Politik Global Kontemporer, Konvensi Nasional II, Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Bandung, 11 – 13 Juli 2011.

Singh, Ajit. (1998) *“Asian Capitalism” and the Financial Crisis*. New York. Cambridge University. CEPA Working Paper Series III, International Capital Markets and the Future of Economic Policy A Project Funded by the Ford Foundation Working Paper No. 10

Srnicek, Nick. (2010) *Conflict Networks: Collapsing the Global into Local*. Journal of Critical Globalisation Studies, Vol: 2, Issue: 2, Pages 30 – 64

Voinea, Lelia dan Alina Filip. *Analyzing the Main Changes in New Consumer Buying Behavior during Economic Crisis*. 2010. International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 1, No. 1, 2011 (Juli)

Internet

What is g-20?, www.g-20.go.id, diakses 3 November 2010

Antaraneews.com, “Perjanjian Utama KTT G20”, diakses 26 September 2009
<http://press.linkedin.com/about>

PENGARUH IMF TERHADAP KEBANGKITAN EKONOMI RUSIA PADA KEPEMIMPINAN VLADIMIR V. PUTINTAHUN (2000-2008)

Ani Khoirunnisa dan Teresia Devina

Abstrack

This paper attempts to explain the economic life issues covered by controversy and uncertainty when the basic issues of political economy emerge, that was how the related Russia and IMF by the political economic approach. The concept of political economic could be seen from related between the IMF as international monetary organizations with the Russian as a state, which became their basic relations between them besides the political interest. Actually in Vladimir V. Putin leading can be another consideration that the concept of political economy can not be separated in the process of Russia's economic rises, its cause Russia's economic rises can work easier for political policies of President Vladimir V. Putin. This paper is expected to give an overview about the process of Russia's economic rises within eight years. It could give some described that the government policies and bureaucratic nationalist actors can moved a country out of a major crisis. Russian debt repayment to the IMF to be real evidence.

Keywords : IMF, Economic Rises, economic crisis

Latar Belakang

Rusia merupakan negara yang terkenal di dunia saat ini serta diakui kekuatan ekonomi dan militernya, namun Rusia pernah mengalami krisis ekonomi yang begitu mengenaskan, negara dengan angka kemiskinan yang cukup besar, pertumbuhan *Produk Domestic Bruto* (PDB) yang pernah mencapai angka (-19 persen) pada tahun 1992. Bahkan tentara Rusia pernah menerima sayur mayur sebagai gaji mereka.

Keterpurukan ekonomi Rusia itu di karenakan cadangan kas negara yang minim serta warisan utang dari Uni Soviet (Rusia merupakan negara pecahan Uni Soviet yang dibebankan hutang luar negeri oleh Uni Soviet, setelah negara tersebut runtuh). Hal lain yang menyebabkan masalah ekonomi di Rusia ternyata tidak berbeda jauh dari negara-negara Asia yaitu resep *Internasional Monetary Fund* (IMF). Resep IMF ini diduga menjadi penyebab paling berpengaruh terhadap krisis yang terjadi di Rusia pada tahun 1990-an. Bantuan-bantuan yang diberikan melalui IMF lebih banyak di korupsi oleh para pejabat pemerintah dan pembisnis di Rusia.

IMF merupakan lembaga moneter dunia yang bertujuan: "menjamin atau mengamankan terselenggaranya kerjasama moneter internasional, menstabilkan nilai tukar mata uang serta memperluas likuiditas internasional untuk kepentingan perdagangan internasional dan penyediaan lapangan kerja" (Isaak, 1995). Sedangkan yang dimaksud dengan resep IMF ialah "IMF secara unik memiliki posisi untuk mempengaruhi kebijakan nasional negara-negara yang terancam defisit neraca

pembayaran” (Isaak, 1995). Resep IMF inilah yang membawa Rusia pada kehancuran ekonominya. Joseph E. Stiglitz pakar ekonomi dunia, menyatakan bahwa, “Sama seperti di Asia, kebijakan IMF dan departemen Keuangan AS turut berperan besar menjatuhkan Rusia” (Saragih, 2008). Resep IMF untuk Rusia adalah memprioritaskan sistem ekonomi pasar (sistem ekonomi dimana pasar yang memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan ekonomi suatu negara), perkembangan infrastruktur dan kelembagaan di Rusia diabaikan.

Penerapan sistem ekonomi ini dilakukan secara cepat dan radikal, perubahan sistem ekonomi yang berjalan, membuka jalan bagi para *oligarki* yang berkuasa untuk menguasai aset negara. Jalan uang masuk dan keluar di Rusia terjadi dalam tempo yang cepat dengan kemungkinan *oligarki* melakukan korupsi dan mentransfer uangnya untuk bisnis di luar Rusia sangat besar. “Pelajaran dari negara-negara yang sebelumnya mengalami krisis memperlihatkan bahwa arus masuk modal asing hanya akan terjadi atau bertahan disuatu negara jika reformasi ekonomi juga berhasil, lengkap dengan keberadaan perlindungan hukum atas hak milik, keberadaan birokrasi yang kukuh dan hukum yang ditegakkan” (Saragih, 2008).

Kehancuran perekonomian Rusia juga diakibatkan oleh korupsi dan perilaku para pejabat yang sudah memutarbalikan fungsi-fungsi lembaga negara. Hal itu terungkap pada masalah skandal *Finance Investment management Company (Fimaco)*. Dalam kasus ini di kabarkan bahwa anggota pemerintahan dan mantan anggota pemerintahan Presiden Boris Yeltsin yang saat itu berkuasa turut terlibat didalamnya. Skandal Fimaco¹ yang menelan dana pinjaman Rusia dari IMF dan kreditor internasional lainnya tidak membuat IMF bertindak tegas, hal yang sangat mengejutkan IMF bahkan memberikan pinjaman lagi, hal ini menimbulkan dugaan bahwa IMF juga terlibat dalam kasus skandal Fimaco. Karena selama bantuan IMF mengalir ke Rusia, IMF memiliki tim pemantau jalannya pembangunan ekonomi negara yang dibantunya. IMF seharusnya menyadari ada kekeliruan dari Skandal Fimaco.

Pada Desember 1999 Presiden Yeltsin mundur dan mengumumkan pemilu dini yang diadakan pada tahun 2000, pemilu itu memenangkan Vladimir V. Putin sebagai presiden baru Rusia. Vladimir V. Putin merupakan mantan anggota dinas rahasia dan informasi atau penerangan Rusia *Komite Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB)*. Putin memiliki jiwa nasionalisme kuat dan sangat membenci *oligarki* yang melakukan perampokan terhadap Negara Rusia. Bersama Eks-KGB lainnya yang telah berganti

¹ **Fimaco** merupakan lembaga keuangan di Rusia yang didirikan pada tahun 1990-an dengan modal 1000 USD dan sebagian sahamnya di miliki oleh Bank sentral Rusia, namun basis dari lembaga keuangan ini terletak di kota Jersey, Channel Island, Inggris.

nama menjadi *Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti (FSB)* dan dikenal dengan sebutan *Siloviki*, Vladimir V. Putin melakukan pemaksaan pengembalian aset-aset negara dari para *oligarki* yang melakukan perampokan kepada negara. Sikap Putin memang bertentangan dengan resep yang diajukan IMF untuk Rusia. Vladimir V. Putin mengatakan ia memilih ekonomi pasar sebagai sistem ekonomi untuk membangun kembali Rusia, namun harus disesuaikan dengan kondisi di Rusia. Ia menyatakan bahwa Rusia bisa meraih masa depan dan mengelola negara dengan kombinasi antara prinsip ekonomi pasar dan demokrasi yang sesuai dengan realitas di Rusia. Presiden Vladimir V. Putin membuktikan perkataannya dengan kebijakan-kebijakan yang nasionalis, dimana setiap tindakan ekonomi bertujuan untuk kesejahteraan bangsa, setiap tindakan ekonomi yang merugikan negara akan di bubarkan serta asetnya diambil oleh negara.

Mengamati pertumbuhan Ekonomi Rusia saat ini memang sangat menarik. Hal itu disebabkan Negara Rusia yang merupakan pecahan dari Uni Soviet yang terkenal dengan kekuatan militer, namun lemah dalam perekonomiannya. Sekarang kita dibuat tercengang oleh perkembangan ekonomi yang terjadi di Rusia, angka kemiskinan dan pengangguran menurun secara cepat, hutang luar negeri yang dapat terbayar serta PDB yang terus meningkat.

Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, penulis ingin membahas tentang bagaimana proses perkembangan ekonomi di Rusia yang begitu pesat sehingga Rusia menjadi negara yang memiliki peran penting dalam perekonomian dunia. Hal lain yang ingin dikaji adalah seperti apa peran lembaga IMF dalam perkembangan ekonomi negara Rusia pada periode tahun 2000-2008 pada pemerintahan Presiden Vladimir V. Putin. Bantuan seperti apa yang di berikan IMF terhadap Rusia, dan bagaimana sikap Presiden Vladimir V. Putin terhadap bantuan IMF serta ke arah mana Ekonomi Rusia akan berkembang.

Untuk mengkaji lebih dalam tulisan ini maka diperlukan batasan-batasan agar tulisan ini tidak menjadi luas. Batasan masalah, *pertama* pada masa awal terjadinya kebangkitan ekonomi Rusia yaitu tahun 2000-2008. *Kedua* lingkup yang diteliti adalah hubungan antara Negara Rusia dan Lembaga IMF yang saling berhubungan dengan kebangkitan ekonomi Rusia yang terjadi pada tahun 2000-2008.

Penyebab Krisis Rusia

Rusia merupakan negara pecahan terbesar dari Uni Soviet, setelah pada tanggal 25 Desember 1991 Uni Soviet secara resmi dinyatakan bubar, satu hari sebelumnya, presiden terakhir Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah Uni Soviet runtuh, negara Federasi Rusia merupakan pewaris utama dari 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataan Unisoviet.

Negara Rusia secara resmi di proklamasikan pada 12 Juni 1990 oleh sidang I Majelis Perwakilan Rakyat Soviet Rusia (RSFSR), pada saat itu Uni Soviet masih berdiri. Satu tahun kemudian presiden Boris Yeltsin dipilih sebagai pemimpin Dewan Tertinggi RSFSR. Meski pada saat itu Uni Soviet masih berdiri namun sampai saat ini tanggal 12 Juni 1990 di peringati sebagai hari kemerdekaan Rusia. Bentuk kepemimpinan yang di jalankan Yeltsin secara umum menunjukkan transisional dari sistem Uni Soviet yang Sosialis - Komunis kepada Republik yang demokratis.

Pada periode kepemimpinan Yeltsin krisis ekonomi Rusia mencapai puncaknya. Krisis ekonomi yang terjadi sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan presiden Yeltsin, penyebab lainnya karena Rusia merupakan negara pewaris utama Uni Soviet juga sebagai penanggungjawab atas lebih dari US\$ 60 milyar hutang luar negeri Uni Soviet. Seperti kita ketahui bahwa Uni Soviet merupakan salah satu kutub dunia saat terjadi perang dingin. Perang yang didasari oleh perebutan daerah pengaruh antara Amerika Serikat dengan ideologi Liberal kapitalis melawan Unisoviet dengan ideologi Sosialis komunis. Perang Dingin ini dilakukan dengan cara perlombaan senjata, teknologi militer dan pembentukan aliansi militer. Selama masa perang dingin ini kita juga mengenal istilah *Perang Bintang*, dimana negara AS dan Uni Soviet berlomba menciptakan pesawat luar angkasa untuk menjadi penguasa luar angkasa. Dalam perang bintang ini Uni Soviet memang lebih unggul, terbukti dengan dapat diluncurkannya pesawat *Sputnik I* dan *Sputnik II* pada tahun 1957 (News.bbc.uk., 1957). Namun untuk setiap perlombaan yang terjadi dalam perang dingin, baik AS maupun Unisoviet mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Pengembangan teknologi senjata membutuhkan biaya yang sangat banyak, baik riset maupun kegiatan industrinya. Walaupun industri senjata perang Unisoviet diakui kecanggihannya dan banyak diminati pasar dunia, serta merupakan penyumbang devisa negara, tetap saja biaya produksi dan pengembangan riset dari teknologi persenjataan Rusia memakan banyak anggaran pemerintah.

Sebagai salah satu negara yang berpengaruh di dunia, Unisoviet juga melakukan penempatan kekuatan militer saat terjadi konflik internasional di Afganistan dan Eropa Timur, hal ini memakan kas negara yang tidak sedikit. Perang dingin menjadi penyebab kehancuran ekonomi Rusia karena selama perang kas negara terkuras untuk membiayai riset teknologi persenjataan, militer dan luar angkasa (<http://www.Whale.to>, 2012).

Pada tanggal 9 November 1989 terjadi peristiwa yang menguncang perekonomian dunia termasuk perekonomian Uni Soviet, yaitu runtuhnya Tembok Berlin. Peristiwa itu menjadi pertanda kejatuhan Blok Timur dan runtuhnya perekonomian terpusat serta mulai saat itu muncul ekonomi pasar kompetitif (Greenspan, 2007). Perubahan sistem ekonomi Uni Soviet juga menghancurkan lembaga-lembaga perencanaan ekonomi terpusat mengakibatkan semua mekanisme produksi dan distribusi ikut campur. Hal ini membuat harga – harga meningkat dari 3%-7% dalam waktu seminggu (Greenspan, 2007). Mata uang Rubel mengalami penurunan nilai yang sangat tinggi. Masyarakat Rusia hidup dengan keadaan yang sangat mengharukan.

Selain sulit mendapat pekerjaan, cadangan uang yang ada pada mereka sangat minim sehingga sulit untuk membeli kebutuhan hidupnya. Para tentara Rusia bahkan digaji berupa sayur-mayur dari hasil kolektif masyarakatnya. Angka pengangguran terus bertambah, karena banyak perusahaan yang terpaksa menutup usahanya. Kehidupan yang mengharukan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Program pemerintah yang dijalankan saat itu tidak dapat menyelesaikan masalah krisis ekonomi Rusia.

Keputusan Gorbachev untuk menjalankan program *Glasnost* dan *Perestroika*² (Fahrrouji, 2005) semakin menguatkan gerakan separatisme. Republik-republik konstituen juga menyatakan ketidak puasannya terhadap reformasi ekonomi yang terjadi, akibatnya terjadi kudeta dan situasi menjadi tidak menentu, saat presiden Gorbachev mengundurkan diri, terbentuklah federasi Rusia dengan kondisi kas negara yang minim

²Perestroika berasal dari akar kata kerja “Stroit” (membangun/mendirikan) yang mengalami perbedaan menjadi “Stroika” (bangunan/struktur) dan awalan “Pere” yang artinya “re- atau kembali” dengan demikian secara harafiah perestroika berarti restrukturisasi. Perestroika adalah sebuah restrukturisasi untuk mengantisipasi proses stagnasi (*Zastoy*) dan kelumpuhan total, dengan menciptakan mekanisme percepatan (*uskorenei*) yang efektif bertumpu pada kinerja dan karya nyata masyarakat, pada perkembangan demokrasi dan perluasan masyarakat Soviet secara politik, ekonomi dan moral. *Glasnost* (keterbukaan) berasal dari kata ‘Golos’ yang artinya mengisyaratkan bahwa pembungkaman yang tersistemasi tujuh dasawarsa telah mengakibatkan tidak terakomodasinya partisipasi publik dalam proses kehidupan politik dan sosial. *Glasnost* memungkinkan masyarakat mengetahui takhanya sisi baik, tapi juga sisi buruk masyarakat Soviet semenjak revolusi Bolshevik yang di harapkan membawa mereka kepada masyarakat sosialis dan komunis yang di cita-citakan.

serta warisan hutang yang cukup besar. Bahkan tentara Rusia menerima gaji berupa sayur-mayur hasil kolektif (Saragih, 2008).

Bantuan IMF terhadap Rusia pada masa Presiden Boris Yeltsin

Pada tahun 1992, atas persetujuan bersama negara G7 (Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat, Kanada), melalui IMF memberikan bantuan ke Rusia sebesar 1.56 triliun USD. Bantuan itu bertujuan untuk perbaikan ekonomi, stabilitas politik dalam negeri Rusia dan mendukung pemerintahan Boris Yeltsin. Ada kekhawatiran OSCE, AS, IMF dan beberapa korporat jika persenjataan militer Unisoviet jatuh ke tangan pihak konservatif dan ultranasionalis yang memungkinkan terjadi lagi perang (Fahrrouji, 2005). Selain untuk pemerintah bantuan AS melalui IMF yang mencapai 5,45 triliun USD juga ditujukan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat di Rusia.

Bantuan USAID (AS) di berikan pada masa transisi sangat besar terjadi di Rusia. Prioritas dari bantuan itu adalah pengembangan ekonomi pasar, hal itu dikarenakan banyaknya investasi AS yang ada di negara Rusia. Program USAID langsung didukung oleh pemerintahan AS di Moskwa sebagai misi rencana 1992-1999, berisi keamanan nasional, keunggulan dan keuntungan ekonomi, pelestarian lingkungan alam, pengembangan partisipasi politik, demokrasi, dan penegakan HAM (Saragih, 2008). Selain Amerika Serikat, negara yang menjadi donator untuk Rusia adalah Jerman, Inggris dan Norwegia. Lembaga-lembaga keuangan yang berperan aktif dalam pemberian bantuan terhadap Rusia diantaranya, IMF, *European Bank for Reconstruction (EBR)*, *the Canadian International Development Agency (CIDA)*, *Ford Foundation*, *Mac Arthur Foundation*, dan *Open Society Institute*, yayasan yang didirikan oleh George Soros.

Untuk mendapatkan pinjaman dan bantuan IMF harus ada kesepakatan dalam bentuk *LoU* dimana IMF akan memberikan resep IMF untuk membantu membangkitkan kembali ekonomi Rusia. Resep IMF untuk negara Rusia adalah liberalisasi, privatisasi dan kestabilan politik untuk memperlancar jalannya ekonomi pasar yang akan di terapkan. Resep ini merupakan resep yang selalu di berikan oleh IMF terhadap negara peminjam manapun, tanpa mempelajari penyebab krisis maupun kondisi ekonomi sebelumnya. Kondisi Rusia pasca runtuhnya Unisoviet memang cukup kritis baik dalam bidang politik maupun ekonominya. Oleh karenanya IMF memberikan saran untuk melakukan perubahan yang radikal. Untuk itu dilakukan percobaan model perbaikan ekonomi diantaranya: Model terapi Kejut (*shock Therapy*) dan Model Bertahap (*Gradualisme*).

Kedua model ini yang di terapkan oleh pemerintahan Boris Yeltsin untuk memperbaiki perekonomian Rusia. Kedua model ini dipilih dengan melihat keberhasilan program tersebut di negara-negara yang pernah menjalankannya. Namun kedua model ini tidak dapat di terapkan di Rusia karena tatanan ekonomi sebelumnya dan struktur masyarakat belum dapat menjalankan program-program tersebut. Program-program tersebut lebih membawa Rusia pada kehancuran ekonomi yang lebih dalam dengan penumpukan hutang dan banyak kasus korupsi dalam birokrasi pemerintah. Hingga pengunduran diri Presiden Boris Yeltsin pada 31 Desember 1999 dan menunjuk Vladimir V. Putin sebagai presiden Rusia mengantikannya.

Kebijakan Vladimir V. Putin dan Kebangkitan Ekonomi Rusia

a. Dalam Bidang Politik

Reformasi yang dilakukan Vladimir Putin terjadi pada sistem kerja Duma (majelis rendah di Rusia). Sebelum pemerintahan Putin, Duma digunakan untuk menjalin hubungan Intra-pemerintahan dengan menjalin hubungan langsung individu-individu dengan kementerian untuk melobi dukungan. Pada April 2000 praktek itu dilarang pihak kementerian diperintahkan untuk membuat kesepakatan melalui jalur resmi yaitu perwakilan pemerintahan untuk Duma (Remington, Post-Soviet Affair, 2001).

Pada parlemen disahkan kebijakan baru yaitu, kenaikan *electoral threshold* dari 5% menjadi 7%, dan meniadakan pemilihan suara *against all*. Peraturan ini membuat peluang tokoh oposisi seperti PM Kasyanov dan Gary Kasparov untuk berkuasa menjadi sangat kecil (Pujo Marrtono, Kompas, 2007). Kebijakan lain yang cukup drastis terjadi pada peran Duma dan lembaga-lembaga pemerintah yang hanya diberi wewenang untuk mengesahkan undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh presiden diantaranya, nasionalisasi, penetapan pajak, peraturan administrasi pemerintahan, investasi baru, dan monopoli sumber daya alam dan migas. Duma tidak lagi berperan dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah, namun hanya mengesahkan saja kebijakan yang dibuat oleh presiden dan kabinet.

Pada 13 September 2004, Presiden Vladimir V. Putin mengumumkan rencana penghapusan pemilihan umum regional (pemilihan gubernur) di 89 provinsi (Kompas, 2004). Sistem pemilihan gubernur menjadi hak kremlin. Awalnya daftar nama calon gubernur diajukan kepada Presiden untuk dipilih atau ditolak sebagai nominasi. Dengan demikian ada perubahan hak dari para gubernur yaitu mereka kehilangan kendali terhadap anggaran daerah dan kursi jabatan dimajelis tinggi. Kekuasaan menjadi terpusat

di Kremlin. Ini adalah upaya presiden Vladimir V. Putin untuk mengembalikan pengawasan kekayaan alam pada negara serta membatasi investor asing masuk ke Rusia. Disisi lain sentralisasi yang dilakukan oleh Presiden Vladimir V. Putin menunjukkan sifat otoriternya serta system kekuasaan negara yang mutlak atau kembali ke sistem sosialis.

Kekuatan Presiden Vladimir V. Putin terlihat dari parlemen, baik Majelis Tinggi (Dewan Federasi) dan Duma, dikuasai partai-partai pendukung Presiden Putin, terutama partai United Russia yang menguasai 309 dari 450 kursi Duma. Presiden Vladimir V. Putin memenangkan pemilu kedua pada tahun 2004 melalui partai ini. Penguasaan lembaga-lembaga oleh para pendukung Putin dilakukan agar setiap kebijakan yang diputuskan oleh presiden dapat berjalan lancar.

Strategi politik domestik presiden Vladimir V. Putin dapat dikategorikan menjadi tiga komponen penting yaitu, mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, memperbaiki sistem multi partai, dan memperkuat masyarakat sipil (Yustiningrum, Jurnal Penelitian Politik, 2004). Semua komponen penting inilah yang coba di realisasikan presiden Vladimir V. Putin dalam kebijakan Reformasi lembaga pemerintahan pada masa kepemimpinannya.

Politik luar negeri Rusia juga mengalami perubahan. Proses perumusan kebijakan luar negeri di Rusia melibatkan: Presiden, Majelis Federal (duma dan dewan federal), *Security Council*, kementerian luar negeri. Dalam Konstitusi negara Federasi Rusia tahun 1993 memberi kekuatan dan peran yang besar terhadap eksekutif terutama presiden. Oleh karena itu Presiden Vladimir V. Putin merupakan tokoh sentral dalam kebijakan politik luar negeri Rusia pada tahun 2000-2008. Tujuan dari politik luar negeri Rusia pada masa itu ialah kombinasi berimbang dari kepentingan individu, masyarakat dan negara dalam ruang ekonomi, politik domestik, sosial, internasional informasi, militer, perbatasan, ekologi dan lain-lain. Oleh karenanya kebijakan politik luar negeri Rusia akan selalu berdasarkan pada setiap aspek kepentingan nasional yang telah dirumuskan.

Presiden Vladimir V. Putin juga berusaha memperkenalkan nilai-nilai patriotisme dan tradisi dalam visinya. Ia juga menyatakan pemberontakan Chechnya sebagai pemberontakan separatis yang dapat membahayakan kedaulatan negara federasi Rusia. Pemberontakan itu disebut Vladimir V. Putin sebagai gerakan terorisme. Hal ini juga membawa hubungan Rusia dan Amerika Serikat menjadi lebih baik karena Rusia berusaha menunjukkan simpatinya terhadap Amerika Serikat yang menyatakan perang terhadap terorisme. Disisi lain Presiden V. Putin menyadari sikap NATO dan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Rusia dari kelompok kekuatan dunia, namun Vladimir V.

Putin menunjukkan sikap pragmatismenya dengan menghindari perang secara terbuka dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Presiden Vladimir V. Putin mengungkapkan kebijakan politik luar negerinya dalam pidato dihadapan dewan parlemen sebagai berikut (Archellie, 2009) : “*The Foundation of This is policy is pragmatism, economic effectiveness, and priority of national taks*” (dasar dari kebijakan adalah pragmatis, efektivitas ekonomi, dan prioritas terhadap tujuan negara) dikesempatan lain Presiden Vladimir V. Putin juga meminta seluruh rakyat Rusia untuk tidak melupakan kejayaan masa lalu. Semua hal yang disampaikan oleh presiden Vladimir V. Putin bertujuan untuk menjadikan Rusia sebagai “Kekuatan Baru Dunia” dalam sistem dunia multipolar. Untuk mencapai tujuan itu presiden Vladimir V. Putin memulainya dari Reformasi internal terutama ekonomi, *Rule of law*, dan sistem birokrasi (Archellie, 2009). Dengan ini Presiden Vladimir.V Putin menyatakan bahwa dasar dari kekuatan luar negeri Rusia adalah kekuatan politik ekonomi internal Rusia oleh karenanya presiden Vladimir V. Putin berusaha membangun ekonomi politik nasional untuk dapat bersaing dan menjadi kekuatan baru Dunia.

b. Dalam bidang Ekonomi

Presiden Vladimir V. Putin menyatakan, “Kita bisa meraih masa depan jika kita mengelola negara dengan kombinasi antara prinsip ekonomi pasar dan demokrasi yang sesuai dengan realitas di Rusia” (Saragih, 2008). Pada kenyataannya dalam setiap kebijakan ekonomi yang dijalankan Oleh Presiden Vladimir.V Putin sangat kentara peran negara yang kuat. Hal itu dikarenakan Rusia masih menganut sistem paternalistik yang sangat kuat.

Sistem paternalistik merujuk pada peran negara yang lebih dominan dibandingkan dengan peran sipil. Ahli Sosial asal Belanda, Geertz Hofstede pernah melakukan penelitian di Rusia dan menyimpulkan bahwa Rusia memiliki indeks *Power distance* (jarak kekuasaan) yang relative tinggi. Rakyat di negara dengan indeks *Power distance* yang tinggi cenderung menerima otoritas yang kurang demokratis (Saragih, 2008)

Dikesempatan lain Presiden Vladimir Putin menyatakan “Kami telah melakukan banyak hal yang membebaskan Rusia dari kehancuran domestik. Kami mengembalikan Rusia ke jalur pembangunan evolusioner. Saya masih ingin melanjutkan itu, dimana kami tidak menginginkan pihak asing campur tangan didalam proses itu” (Saragih, 2008). Hal ini menegaskan sikap Presiden yang menolak negara lain maupun lembaga-lembaga

keuangan dunia mengatur jalannya pembangunan dan perkembangan ekonomi di Negara Rusia. Pernyataan ini juga menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan yang diajukan IMF terhadap negara Rusia dan telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya akan dikaji ulang dan direvisi oleh pemerintah Rusia. Pemerintah Rusia akan menjalankan kebijakan yang disepakati oleh presiden, kabinet, dan parlemen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Rusia.

Kehadiran pihak Asing akan tetap dipertahankan dan dilindungi dengan catatan usaha yang mereka kerjakan memberi keuntungan bagi negara Rusia. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi dalam negeri Vladimir V. Putin adalah melakukan stabilitasi dan keamanan sektor ekonomi, ia melakukan pengembalian aset negara dari tangan swasta kepada pemerintah. Hal ini merupakan kebijakan berlawanan dari saran IMF yang menganjurkan agar Rusia melakukan Privatisasi, yang memberi jawaban atas penolakan Presiden Vladimir V. Putin terhadap campur tangan pihak asing di Rusia. Untuk mencapai tujuan ekonominya Vladimir V. Putin dan kabinetnya berusaha untuk memaksimalkan sumber pendapatan negara baik melalui pengelolaan maksimal sumber daya alam maupun penarikan pajak. Di tahun 2003 ia mengumpulkan kembali aset-aset negara disektor migas. Kontrol terhadap usaha strategi minyak, gas dan mineral dilakukan (Greenspan, 2007). Kebijakan ini menjadi langkah awal karena pemasukan devisa negara Rusia terbesar didapat dari sektor migas. Saat bersamaan harga minyak dunia mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal itu secara cepat menambah pundi-pundi devisa negara Rusia.

Dalam menjalankan kebijakannya Vladimir V. Putin sangat tegas dan tidak pandang bulu, pengusaha yang tidak menuruti peraturan pemerintah dilaporkan ke pengadilan. Beberapa pengusaha yang diajukan ke pengadilan oleh Vladimir V. Putin diantaranya : Vladimir Nekasov, CEO Arbat Prestige (perusahaan real estate), Mikhail Khodorkovsky pemilik perusahaan Yukos (perusahaan minyak terbesar di Rusia).

Pada masa pemerintahan presiden Vladimir Putin tepatnya Oktober 2003, Khodorkovsky dengan dugaan sejumlah pekerja dari perusahaannya telah melakukan korupsi, penyuapan dan pembunuhan (Saragih, 2008). Tuduhan lain yang di tujukan kepada Khodorkovsky adalah pencurian aset negara karena ada penipuan yang dilakukan untuk memindahkan aset swasta Rusia ke swasta asing, tindakan pengelapan pajak yang merugikan negara, dan kesalahan yang membuatnya harus di tahan pada masa pemerintahan Presiden Vladimir V. Putin adalah tindakannya melawan Presiden Vladimir V. Putin. Khodorkovsky membiayai partai-partai oposisi, oligarki, dan menyuap

100 anggota parlemen di majelis rendah Rusia (Duma) untuk mempengaruhi pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan bisnisnya (Saragih, 2008).

Kebijakan yang juga menguntungkan negara adalah melakukan pengetatan aturan konservasi lingkungan. Pemerintah membuat peraturan konservasi lingkungan yang ketat dan juga target waktu bagi kontraktor yang sulit untuk dipenuhi, hal ini bertujuan untuk menekan kontraktor menjual proyeknya ke perusahaan milik negara. Beberapa proyek yang dijual sebagai hasil dari kebijakan ini adalah : Shaklain-2(Shell-Mitsui/Mitsubishi), proyek penjualan gas (Exxonmobil), Kovikta gas field dan east Siberia field (TNK-BP) (Fahrur Razi, 2005).

Pengembalian aset negara disektor migas bertepatan dengan naiknya harga minyak dunia saat itu. Hal ini membuat cadangan devisa Rusia kembali terisi. Reformasi ekonomi yang dilakukan Presiden Putin berhasil. Rusia menghasilkan minyak 9,5 juta barrel per hari yang bisa ditingkatkan menjadi lebih dari 10 juta barrel perhari. Volume ekspor minyak per hari sekitar 7 juta barrel (2006) sehingga dengan harga minyak dunia yang di atas 75 dollar AS per barrel seperti saat itu, pendapatan negara dari sektor migas cukup besar nilainya. Kontribusi terbesar devisa Rusia didapat dari ekspor gas alam mencapai 674 miliar dollar AS pada tahun 2006.

Sektor lain yang juga menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi Rusia adalah produksi alat-alat persenjataan perang. Banyak pesanan senjata kepada Asosiasi Industri Militer/Penerbangan Rusia atau AVPK SUKHOI dari negara-negara di Asia (terutama Cina dan India). Asosiasi Industri Militer dengan cepat memperoleh dana US\$ 4 miliar dari penjualan senjata ke India dan China. Dalam perkembangan ekonomi yang terus meningkat dan cadangan devisa yang besar nilainya pemerintah Rusia tidak melupakan peran IMF dan pinjaman dana yang diberikan. Rusia segera membayar lunas utangnya di IMF dan Paris Club. Bukan hanya dapat membayar hutang, saat ini Rusia menjadi negara dengan urutan ketiga dunia yang memiliki cadangan devisa terbesar.

Pengaruh IMF terhadap Kebangkitan Rusia 2000-2008

Hubungan antara bantuan IMF dan kebangkitan ekonomi Rusia memang sulit untuk digambarkan, namun jika kita mengamati peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di Rusia dapat disimpulkan bahwa, saat IMF memberikan bantuannya dalam bentuk dana cair maupun dalam bentuk kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk membangkitkan kembali perekonomian Rusia. IMF kurang mempelajari sejarah Rusia baik struktur masyarakat maupun sistem ekonomi dan struktur birokrasi di Rusia, sehingga terjadi krisis yang lebih dalam dan korupsi yang membawa Rusia pada inflasi yang tinggi dan

penumpukan hutang. Saat Presiden Vladimir V. Putin menjabat sebagai Presiden setiap kebijakan IMF itu dikaji lagi dan diterapkan sesuai dengan realitas ekonomi di Rusia. Disinilah terlihat dibutuhkan pemimpin yang pragmatis dan memiliki jiwa nasionalis dalam membangun sebuah negara.

Kesimpulan

Kebangkitan ekonomi Rusia tidak dapat dipisahkan dengan bantuan IMF baik dalam bentuk dana tunai, program-program IMF dan staff-staff pengawas, hal ini dikarenakan bantuan IMF yang dianggap membawa Rusia dalam jurang krisis, menjadi alasan kaum nasionalis Rusia menyerukan Reformasi. Kaum Nasionalis yang merupakan eks anggota KGB dan di sebut *siloviki* menyadari bahwa pihak asing dan IMF tidak bersungguh-sungguh dalam mengatasi krisis di Rusia. Dalam beberapa pidatonya presiden Vladimir V. Putin juga mengobarkan jiwa nasionalis bangsa Rusia untuk menolak pinjaman luar negeri karena telah mengakibatkan krisis yang sangat parah di Rusia. Namun Presiden Vladimir V. Putin tetap menjalankan setiap program IMF yang sesuai dengan kepentingan negara Rusia. Oleh karena itu program-program IMF masih dijalankan pada masa pemerintahan presiden Vladimir V. Putin namun pelaksanaannya di sesuaikan dengan kondisi negara Rusia.

Pengaruh Negatif bantuan IMF terhadap kebangkitan Ekonomi Rusia adalah :

- Proses Demokrasi, liberalisasi dan privatisasi pada awalnya berjalan tidak sesuai dengan sistem ekonomi dan budaya Rusia sehingga menimbulkan konflik-konflik sosial.
- Kesalahan dalam menjalankan program Privatisasi melahirkan kaum oligarki yang serakah sehingga terjadi praktik korupsi yang merugikan negara.
- Keadaan negara Rusia dalam masa transisi dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai asset negara Rusia. Sehingga BUMN banyak dikuasai oleh swasta.
- Transisi politik dan ekonomi Rusia juga diwarnai oleh sikap Birokrat yang memihak kepada pengusaha, sehingga kasus pengelapan pajak sering terjadi.

Pengaruh Positif bantuan IMF terhadap kebangkitan Ekonomi Rusia adalah :

- Terbukanya Rusia menjadi pasar baru Eropa dan Amerika, membuat Rusia memiliki dana cair untuk pembagunan ekonominya.
- Terbentuknya sistem perbankan yang efektif dan transparan, setelah kasus Fimaco sistem perbankan mendapat perhatian khusus.

- Sektor pertanian mulai mendapat perhatian pemerintah di samping sektor industri alat berat dan migas.
- Terbentuknya sistem perdagangan luar negeri yang terorganisir.
- Perekonomian Rusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkatiri, Zeffry 2007. *Transisi Demokrasi di Negara Federasi Rusia*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.
- Clift, Jeremi. 2003. *Apakah Dana Moneter Internasional Itu?*. Washinton D.C : International Moneter Fund
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga
- Fahrrouji,Ahmat, 2005, *Rusia Baru Menuju Demokrasi : Pengantar sejarah dan latarbelakang budayanya*,Jakarta
- Greenspan, Alan,2007.*Abad Prahara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Isaak,Robert A,1995. *Ekonomi Politik Internasional*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Odling, Jhon-Smee. 2004 *IMF Working Paper The IMF and Russia in the 1990s*.Washington D.C. : International Moneter Fund
- Saragih, Simon, 2008. *Bangkitnya Rusia*, Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara

Jurnal

- Thomas F. Remington, "Putin and Duma, Post-Soviet Affair", Vol. 17.No. 4, 2001. PP. 285-308.
- Emelia Yustiningrum, *Jurnal Penelitian Politik, Partai Politik Pemilu dan pemerintahan Rusia*, Vol.1, No. 1,2004
- R.de Archellie, "Pragmatisme Politik luar Negeri Vladimir V. Putin", *Glasnost* Vol 4. No.2, Oktober 2008-Maret 2009, Hal.53

Sumber Internet

- Sputnik Satellite blasts into space, BBC News,October 4, 1957.
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/4/newsid_2685000/2685115.stm
- Eustace Mullins, The \$ 5 Trillion Cold war hoax, *The Phoenix Project*. May 21, 1996.
<http://www.whale.to/b/mullins6.html>.

The Role of Ngos in Supporting Russia's Trantition to a Market Economy,
<http://www.21ppi.org/english/policy/2003/Russia.html>.

Susanto Putjo Martono, **Kompas**, "Siapa pengganti Putin". 28 September, 2007.
<Http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0709/28/ln/3870742.htm>.

KOMPAS. "Putin: Rusia akan tetap berada di jalur Demokrasi".
25 September 2004. <http://www2.kompas.com/Kompas-cetak/0409/25/utama/1288234.htm>.

KONSUMERISME DAN PEMBAGIAN KERJA INTERNASIONAL: TANTANGAN INDONESIA DALAM PROSES MENUJU *NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRIES (NICs)*

Ziyad Falahi¹
ziyadfalahi@rocketmail.com

Abstract

This article tries to describe how consumerism increases rapidly and influences to Indonesian economic development under Susilo Bambang Yudhoyono's administration. Recently, Consumerism became a significant part within global economic system and it showed the latest version of international division of labor. Moreover, a contemporary international division of labor divide newly industrialized countries (NICs) into two class. First class, producing countries such as China, India, Brazil, and Russia (BRICs), and the second, Indonesia as consumer countries. Therefore, Indonesia should have to think twice before decided to join economic cooperation between south countries because industrialization in Indonesia heavily relies on the consumer sector. Although consumer sector proved can be a buffer and also succeed to maintain economic growth after global crisis occurred in 2008. However, Indonesia will be the one of country which its buying power is absorbed by other industrialized countries with higher productivity levels.

Keywords: *consumerism, international division of labour, newly industrialized countries, south-south cooperation.*

Pendahuluan

Konsumerisme merupakan konsep yang menjelaskan budaya/perilaku tidak produktif yang justru cenderung konsumtif. Sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana dependensi negara berkembang terhadap negara maju. Oleh karena itulah kerjasama antar negara selatan dapat menjadi alternatif untuk keluar dari dependensi tersebut. Namun hubungan dependensi tersebut juga berimplikasi dalam relasi antara sesama negara selatan. Bagaimana konsumerisme secara lebih lanjut membuat adanya struktur hierarkis model kerjasama. Sebuah kerjasama yang terancam diwarnai dengan kapabilitas produksi yang tidak berimbang. Kemunculan Cina, India, Rusia, dan Brazil (BRICs) tak pelak merefleksikan adanya kelas produksi baru dalam negara selatan, yang dikenal sebagai *Newly Industrialized Countries (NICs)*. Terlihat bagaimana dominasi keempat negara tersebut dalam perdagangan internasional karena tingkat produktivitasnya, sehingga dapat dibayangkan jika negara yang produktif tersebut bekerjasama dengan negara yang basis perekonomiannya sangat konsumeristik, sebagai contoh Indonesia.

¹Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur dan Direktur Riset Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta.

Indonesia yang tengah mengarah pada fase negara Industri baru (NICs) menyatakan optimismenya dalam forum kerjasama selatan-selatan. Sebagaimana yang diungkapkan Pemerintah Indonesia yang optimis Indonesia berada di garda terdepan dalam kerja sama pembangunan negara berkembang atas dasar pertumbuhan ekonomi (indoanalysis.com, 2002). Namun optimisme tersebut sejatinya masih perlu untuk dipertanyakan kembali seiring dengan *abstain*-nya produk nasional yang mampu bersaing dalam perdagangan global. *China Asia Free Trade Area* CAFTA sebagai salah satu contoh kerjasama selatan-selatan justru menempatkan Indonesia sebagai negara konsumen yang dependen terhadap produk Cina. Bahkan kemandirian Indonesia terdistorsi dalam kerjasama selatan-selatan setelah Indonesia dalam beberapa forum justru mengajak negara utara untuk turut mendukung dan membantu kerjasama selatan-selatan (Arnsperger, 2002).

Dari latar belakang tersebut, kita dapat menyimak eksistensi konsumerisme sebagai sebuah logika ekonomi yang terindikasi menghambat perekonomian Indonesia. Secara *general*, sistem konsumerisme akan mematikan sektor produksi sehingga dapat mengancam kepentingan Indonesia untuk menjadi Negara Industri baru (NICs). Apalagi dengan semakin banyaknya negara industri baru yang mulai meningkatkan produktivitasnya dengan memperkuat produk nasionalnya. Dilatarbelakangi oleh aspek tersebut, maka permasalahan yang diangkat penulisan ini ialah; Sejuah manakah Konsumerisme dapat menjadi penghambat tercapainya kepentingan Indonesia dalam menjadi *newly industrialized countries*?

Guna membantu terkomunikasikannya gagasan penulisan ini, maka tulisan ini secara *general* akan dibagi dalam enam bagian besar penulisan. Bagian pertama akan menjadi pendahuluan yang secara implisit terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, *thesis statement*, dan sistematika penulisan. Sedangkan pembahasan kedua akan mengupas secara tuntas trayektori teoritik mengenai konsumerisme dalam ilmu hubungan internasional. Ketiga akan mengelaborasi bagaimana sistem pembagian kerja Internasional bekerja dalam logika konsumerisme. Pembahasan keempat akan dijelaskan perjalanan Indonesia dalam proses menuju Negara Industri baru pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya pembahasan kelima akan dilakukan proses penjelajahan, sekaligus dipaparkan data empirik yang mendukung argumentasi bahwa konsumerisme tengah menjangkiti perekonomian dan industrilisasi Indonesia, sekaligus sebagai pengantar pada bagian terakhir yakni kesimpulan.

Konsumerisme sebagai Kajian Hubungan Internasional

Kajian konsumerisme hingga kini belum menemukan ruang pembahasan serius dalam studi hubungan internasional. Agaknya wajar terjadi demikian, karena *stressing point* konsumerisme selama ini lebih pada analisis budaya dan cenderung kurang praktis dalam meninjau perilaku negara. Padahal konsumerisme menjadi tema diskursif yang ramai dibicarakan terutama oleh para *scholar* alternatif. Yang sering didengungkan dalam studi hubungan Internasional adalah kapitalisme yang berbasis pada logika produksi yang diasumsikan lebih *tangible* karena secara gamblang menunjukkan adanya kosntelasi antar negara atau perusahaan transnasional. Tak pelak problem ontologi yang dianggap *less politic* menjadi alasan akademis termarginalnya kajian konsumerisme dalam ilmu hubungan Internasional.

Namun jika kita menyimak kembali, budaya konsumerisme sebagai budaya yang direproduksi oleh kapitalisme tingkat lanjut (*late capitalism*) secara *gradual* telah turut mengkonstruksi perilaku negara. Indikator krusialnya terletak pada bagaimana negara kontemporer terpecah menjadi dua, yaitu antara negara yang mengandalkan pada sektor produksi dan negara yang pasif yang justru sangat tergantung pada sektor konsumsi. Meskipun tidak mudah membagi kedua jenis *cluster* negara tersebut, namun variabel dari basis perekonomian dapat menjadi indikatornya. Dengan kata lain, konsumerisme sebagai budaya dapat dipersonifikasi dalam analogi perilaku negara.

Konsumerisme sebagai konsep akademis sekaligus menjawab mengapa kapitalisme yang sempat diramalkan Karl Marx akan runtuh justru semakin kuat? Di sinilah analisis dari Jean Baudrillard dalam *The Mirror of Production* menjelaskan bahwa kapitalisme telah bergeser dari eksploitasi basis produksi menuju ke eksploitasi ke dalam logika konsumsi (Baudrillard, 2007). Dulu penindasan bersifat langsung, frontal, keras dan mengkesploitasi secara *tangible*. Kini penindasan yang terjadi berlangsung secara *soft*, tidak langsung dan lebih *intangible* karena mempersuasi kelas proletar melalui ekstasi gaya hidup dan kesenangan artifisial. Bahkan saking halusny, konsumerisme justru menjadi *pleasure* bagi yang ditindas. Apalagi dengan daya seduktif iklan yang dapat menghegemoni sekaligus mengguncang ketidaksadaran masyarakat konsumen. Dengan bahasa yang berbeda Lyotard menyebut kapitalisme konsumer sebagai kapitalisme bujuk rayu (*passionate capitalism*) bahwa permainan tanda melalui iklan dan propaganda membuat kelas tertindas tidak akan merasa tertindas (Lyotard, 1994).

Dalam logika konsumerisme kita dapat menyaksikan bahwa sekarang tidak hanya buruh saja yang dieksploitasi, tetapi juga konsumen yang berada di luar zona produksi. Bahkan hampir semua pelaku ekonomi merasakan jeratan eksploitasi lembut yang dilakukan oleh kapitalisme konsumer. Oleh karena itu, ketika ada kelas menengah

yang merasa nyaman dari kapitalisme sesungguhnya menunjukkan kedigdayaan strategi konsumerisme. Tidak dapat dipungkiri adanya aspek *pleasure* inilah yang membuat cita-cita revolusi proletariat semakin hari gaungnya semakin tidak terdengar (Laclau and Chantal, 2001).

Mengenai trayektori kemunculan konsumerisme hingga kini masih menjadi perdebatan di antara *scholar* alternatif. Beberapa pemikir seperti Daniel Bell, Frederick Jameson banyak mengkaitkan konsumerisme dengan globalisasi yang muncul 1970-an. Globalisasi menjadi indikator lahirnya *pop culture* yang disebarluaskan oleh teknologi *virtual* pemadatan ruang waktu (*time space compressed*). Daniel Bell menyebut kapitalisme konsumen dengan bahasa yang berbeda, yakni *late capitalism* yang berwajah ganda, yakni memunculkan budaya yang *uniqueness* dan *differances* namun di sisi lain juga memunculkan *pop culture* (Bell, 1990). Sedangkan Frederick Jameson mengungkapkan bahwa kapitalisme konsumen dalam bahasa lain disebut sebagai *post-industrial capitalism* yaitu sektor produksi barang dan jasa bukan lagi pamadona dalam perekonomian, dan digantikan oleh sektor konsumtif (Jameson, 1998).

Siapakah sesungguhnya *agency* dalam kapitalisme konsumen? Juga menjadi pertanyaan yang masih menuai perdebatan. Penyebaran kapitalisme konsumen yang bersifat *soft* merupakan alasan kuat mengapa pertanyaan tersebut terdengar sukar untuk dijawab secara empiris. Penyebaran tersebut hanya berwujud sebagai suatu struktur *multitude* yang *intangible* yang tidak dapat digambarkan secara *rigid* posisi area kekuasaannya (Hardt and Negri, 2005). Seperti halnya George Ritzer menjelaskan bagaimana genealogi kekuasaan dalam era kontemporer ketika lokus power dalam kapitalisme konsumen tersebar-sebar dan sukar terkuantifikasi (Ritzer, 2005). Namun *stressing poin* penindasannya tetap sama, yakni bagaimana kapitalisme me-reorganisasi dan mendisiplinkan manusia melalui serangkaian rezim yang secara tidak sadar dianut.

Tinjauan teoritik seperti yang telah disebutkan bab sebelumnya masih menuai celah kritik mengenai bagaimana konsumerisme dapat masuk kedalam studi hubungan internasional yang lebih mengkaji politik tingkat tinggi. Namun setidaknya muncul jalan keluar ketika kita dapat mengkaitkan konsumerisme dengan pembagian negara berasaskan pada basis kapabilitas produksinya (Onuf, Review of International Studies, 2002). Pengklasifikasian negara tersebut menunjukkan adanya pembagian kelas dalam hubungan ekonomi antarnegara industri baru dan berkembang. BRIC dan beberapa negara selatan mapan lainnya merupakan negara industri baru sekalipun mengatasnamakan negara selatan. Sehingga Secara teoritik, adanya konsumerisme terancam akan menghambat proses industrilisasi negara yang belum masuk dalam kategori negara industri. Kerjasama berbeda kelas mengembalikan lagi hukum

penindasan kapitalisme yaitu kerjasama ekonomi senantiasa bernuansa *zero sum game* ketika dimainkan oleh kedua aktor yang tidak seimbang secara kapabilitas produksi. Sebaliknya sekalipun Indonesia memperoleh Investasi dalam jumlah masif, namun konsumerisme menunjukkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara selatan lain.

Konsumerisme sebagai Elemen Pembagian Kerja Internasional

Konstelasi ekonomi politik Internasional kembali dimarakkan oleh kebangkitan diskursus kerjasama selatan-selatan era kontemporer. Sebagaimana pernyataan Jeffrey James yang menunjuk beberapa negara Amerika Selatan seperti Venezuela dan Bolivia yang diasumsikan berhasil mengembalikan lagi semangat kerjasama selatan yang sempat terbengkalai. Dalam skala regional, refleksi kerjasama ini dicontohkan oleh kehadiran Mercosur, ALBA, Bank Selatan dan ASEAN Akan tetapi, nyatanya kerjasama selatan-selatan kontemporer lebih inklusif dalam mengimplementasikan diplomasi resistensinya, tidak seperti halnya kerjasama selatan-selatan yang menutup diri dari dialognya terhadap utara. Model resistensi dalam kerjasama selatan-selatan terbukti setengah hati, karena ternyata masih mengharapkan ada kesepakatan dengan negara utara untuk dapat memberi stimulus (James, 2000).

Implementasi kerjasama selatan-selatan sedikit terhambat, karena negara selatan kini bukan hanya dihuni oleh negara dengan kapabilitas dan tujuan yang sama. Apalagi kemunculan BRICs membuat adanya lokus pergeseran peta politik baru dalam perekonomian global yang membuat kerjasama selatan-selatan menjadi asimetris. Bahkan muncul komunitas didalam komunitas seiring KTT BRICs yang bersifat eksklusif. Lahirnya KTT BRICs tersebut adalah modus kerjasama selatan yang diperlukan karena kerjasama antara negara BRICs cukup berimbang secara kapabilitas industri. Maka dari itu, sudah tepat ketika Indonesia yang berbasis pada sektor konsumerisme tidak berhasil masuk dalam BRIC. Jikalau Indonesia masuk di dalamnya, maka Indonesia dipastikan akan mengalami defisit neraca perdagangan.

Superioritas BRICs menunjukkan kerjasama-selatan-selatan perlu disikapi Indonesia secara lebih *prudent*. Meskipun Cina masih tergolong negara selatan, tetapi ekspansi produk Cina akan mendorong *capital outflow* dari Indonesia. Wajar jika kemudian CAFTA justru menjadi ancaman bagi negara selatan lain yang sudah dapat dirasakan oleh beberapa negara konsumen, tak terkecuali Indonesia. Semisal batik Indonesia yang otomatis terpuak dengan membanjirnya batik produk China yang memiliki kualitas lebih baik dengan harga lebih murah. Bahkan perajin batik Indonesia sudah diboyong ke China untuk membantu desainnya yang motifnya dari Indonesia, tetapi diproduksi di China.

Bahkan seiring dengan membanjirnya produk Cina itu membuat kecintaan terhadap produk dalam negeri melemah. Implikasinya, Indonesia selama *CAFTA* berlangsung hanya mengekspor bahan baku dan sumber daya alam ke Cina. Tak pelak, kemudian neraca perdagangan Indonesia terhadap Cina mengalami defisit. Contoh *CAFTA* mengindikasikan bahwa kerjasama sesama selatan tersebut berpretensi memunculkan *exchange value* di antara sesama negara selatan yang didorong oleh hasrat *surplus value* yang kini menjadi faktor pendorong proses menuju Negara Industri baru (*NICs*).

Oleh karena kerjasama selatan-selatan dianggap stagnan, munculah suatu gerakan alternatif sebagai resistensi terhadap globalisasi dan pasar bebas. Model gerakan ini tidak membawa *panjination-state*, melainkan bersifat transnasional dan melibatkan komponen *society*. Sebut saja *World Social Forum (WSF)* yang turut berkontribusi dalam menggagalkan Konferensi *WTO* di Seattle yang dikenal sebagai *battle of seattle*. Selain *WSF*, *Zapatista* menjadi contoh yang unik dalam membedah pandangan kita mengenai gerakan transnasional kontemporer yang tidak lagi percaya pada kekuatan negara. *Zapatista* muncul sebagai suatu gerakan transnasional yang tidak pernah menggunakan cara-cara politis legal-formal. Bahkan *Zapatista* merupakan suatu gerakan yang hanya berusaha melawan kerja pemerintahan namun mereka menyatakan ketidaksediaannya untuk masuk dalam pemerintahan. *WSF* dan *Zapatista* mengkritik peran negara selatan yang diasumsikan tidak mampu lagi menghadang jeratan kapitalisme global (Harvey, 2005).

Gagalnya strategi gerakan resistensi atas pasar bebas menunjukkan pentingnya mempertanyakan kembali urgensi dari kerjasama-selatan-selatan. Berbeda dengan Awal mula kerjasama selatan-selatan yang dapat dilacak dalam konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok sekitar tahun 1950-an. Pada masa kejayaannya, kerjasama sesama selatan mengisyaratkan sebuah resistensi terhadap negara utara dengan berdiplomasi secara mandiri. Namun kini berubah lantaran kerjasama selatan-selatan kontemporer menunjukkan keterikatan yang kuat sesama negara selatan dan malah terjadi divergensi kepentingan ekonomi. Kita dapat mengambil sample ketika G-77 sebagai forum negara berkembang ternyata kesulitan untuk mencapai konsensus. Bahkan diciptakanlah *backbone* dengan munculnya G-24 untuk lebih menyederhanakan mekanisme pengambilan keputusan di G-77. Namun kini malah banyak negara selatan yang lebih tertarik masuk ke dalam G-20 yang di dalamnya banyak negara maju karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomis.

Kesempatan negara berkembang dalam menegakkan soliditas kerjasama selatan seharusnya memungkinkan setelah lahirnya *WTO*. Dengan prinsip *one country one vote* yang diasumsikan dapat menjadi ajang pemersatu kepentingan negara berkembang.

Terlebih Indonesia sebagai salah satu negara agraria pernah diberikan kesempatan untuk menduduki posisi sebagai ketua G-33. Namun ternyata masih sulit untuk mengharapkan konvergensi kepentingan sesama selatan. Bahkan konferensi G-33 yang ternyata masih berpikir dua kali untuk mengegolkan isu pertanian dalam *WTO*. Lemahnya G-33 di sisi lain memunculkan G-20 yang diharapkan semakin menjembatani intimasi utara dan selatan, meskipun dalam realitanya hanya dijadikan kepanjangan negara maju untuk mendapatkan *supply material* negara berkembang.

Dengan menelusuri kembali jejak (*trace*) kerjasama selatan-selatan, maka kita akan memahami fenomena siklus perkembangan ekonomi global kontemporer. Joseph Stiglitz menekankan bahwa perekonomian global pascakrisis 2008 telah memasuki era kejatuhan paham kebebasan neoliberalisme (*freefall*) setelah ditinggalkannya preskripsi *Washington Consensus*. Diasumsikan demikian, karena periode pascakrisis 2008 ditandai dengan kecenderungan mulai pudarnya kepercayaan banyak negara terhadap *market led development* (Stieglitz, 2009). Bahkan, AS sebagai negara yang dalam sejarah notabene paling lantang menyuarakan antiintervensi negara, ternyata juga mengeluarkan kebijakan *baillout* untuk memperbaiki perekonomian domestiknya pascakrisis 2008 (Harvey, New Left, 2009). Namun apakah era post-Washington ini dapat membuka ruang untuk kembalinya prinsip nasionalisme ekonomi? mengingat munculnya *free trade area* yang terjadi dalam skala regional seperti *CAFTA*, *GCC*, *Mercosur*.

Beberapa pakar ekonomi menekankan bahwa model pembangunan *Newly Industrialized Countries* didorong oleh semangat neososialisme (Hadi, et.all, 2010). Pengambilan kata “neo” dalam neososialisme merupakan aspek yang menarik karena ternyata sisi aksiologisnya jauh berbeda dengan sosialisme dalam pengertian fundamental. Dalam neososialisme, kerjasama selatan-selatan sangat didorong oleh logika interdependensi yang tentu berbalik dengan logika dependensi yang senantiasa dipakai gerakan sosialisme tahun 1960 – 1970-an.

Bahkan paradigma *Newly Industrialized Countries* sangat mengedepankan sektor industri. Padahal dalam alam pikir dependensia sebagaimana Andre Gunderfrank sebutkan, industrialisasi akan senantiasa menyerap sumber daya alam negara selatan (Comaroff, 2001). Sebagai ideologi resistensi, neososialisme terkesan lebih mengadopsi pemikiran jalan tengah yang diprakarsai oleh Anthony Giddens (Giddens, 1984). Sosialisme model Giddens lebih bersikap moderat dan dalam derajat tertentu mempercayai preskripsi liberal, seperti halnya demokratisasi. Sosialisme jalan tengah juga sejatinya sangat percaya dengan industrilisasi dan *foreign aid*.

Bahkan kemiskinan dan keterbelakangan dalam pemikiran neososialisme inheren dengan pakem kemiskinan dan keterbelakangan dalam benak kapitalisme-neoliberal yang acapkali mengukur dari indikator berupa volume perdagangan makroekonomi. Dengan demikian, maka terlihat banyak pengaruh paradigma neoliberal yang tertuang di balik proyek *NICs*.

Indonesia Menuju *Newly Industrialized Countries*

Dengan semboyan *million friends zero enemy*, Indonesia pada masa presiden SBY seolah mengangankan suatu dunia yang memungkinkan kerjasama utara dan selatan. Sebagaimana yang diungkapkan Dino Patti Djalal: "*Filosofi kerja sama antarnegara presiden SBY ke utara ke selatan itu oke. Siapa pun yang pro-Indonesia, kita akan mengulurkan tangan*" (deptan.go.id, 2013). Dalam pertemuan G-33 di Jakarta 20 Maret 2007, terlihat juga Presiden Yudhoyono bahkan lebih menonjolkan sisi *million friends* ketimbang prioritasnya sebagai representasi negara berkembang. Presiden SBY nyatanya lebih antusias untuk mengajak negara-negara maju menghilangkan diskriminasi terhadap negara berkembang, terutama menyangkut perdagangan. Bahkan Menteri Perdagangan Marie Pangestu juga senada dengan presiden mengenai perlunya negara utara agar menyepakati forum multilateral terkait *special product*. Bahkan KTT Doha yang hingga kini urung terselesaikan dengan baik. Kondisi yang dapat berimplikasi pada semakin kurang percaya dirinya diplomasi Indonesia terkait perlindungan pertanian domestik. Setidaknya akan terdapat beberapa kerugian yang harus diterima Indonesia jika tidak segera menyelesaikan Putaran Doha. Pertama adalah muncul ketidakpastian dan berkurangnya rasa kepercayaan kepada forum multilateral. Kondisi yang tentunya tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara konsumen yang harus siap menghadapi perdagangan secara bilateral. Kedua, negara tidak akan punya kekuatan untuk keluar dari keadaan krisis yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. Ketiga, jikalau *WTO* sebagai traktat multilateral dalam kondisi lemah, maka kesepakatan-kesepakatan dagang dalam skala bilateral juga menjadi kurang maksimal. Negosiasi-negosiasi yang dihasilkan dalam forum bilateral akan menjadi tidak menguntungkan negara konsumen seperti Indonesia (depkominfo.go.id, 2012).

Sedangkan kritik juga keluar dari kaum swasta di Indonesia yang menilai kerja sama selatan-selatan yang dilakukan pemerintah lebih menitikberatkan pada persoalan politik yang melibatkan kegiatan pemerintah, ketimbang ekonomi. Karena lebih bersifat politis, kerja sama ini hanya terfokus pada kegiatan pemerintah dan tidak banyak melibatkan sektor swasta. Ini membuat jalinan *person to person* atau *company to company* antarnegara selatan, khususnya Indonesia dengan negara-negara di Afrika dan

Amerika Latin sangatlah terbatas. Hal ini dipicu oleh banyaknya jumlah negara berkembang di Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin. Apalagi, negara-negara ini memiliki perbedaan seperti di bidang stabilitas politik negara, ekonomi, sumber daya alam (SDA), faktor budaya, dan sumber daya manusia.

Kendala utama hubungan perdagangan antarsesama negara berkembang di Afrika dan Amerika latin adalah produk nasional yang belum dikenal oleh pasar. Selain itu, letak geografis negara-negara berkembang yang berjauhan juga telah memicu timbulnya masalah di bidang pengangkutan, sistem pembayaran, dan dukungan keuangan. Faktor penghambat utama dari intensitas lainnya adalah homogenitas komoditas sehingga hubungan kerjasama antara negara selatan tidak komplementer. Faktor lainnya adalah jarak yang terlalu jauh menyebabkan biaya angkut dan infrastruktur akan mempengaruhi harga. Hal tersebut berimplikasi pada hubungan kerjasama yang tidak bersifat langgeng, apalagi sampai terinstitusionalisasi.

Dengan kata lain selama ini Indonesia hanya menjadikan negara selatan sebagai *partner* sampingan. Bahkan bahwa kerjasama selatan-selatan hanyalah merupakan suatu bentuk alternatif kerja sama pembangunan untuk konteks negara berpenghasilan menengah (*middle income country*) seperti Indonesia. Padahal dalam berbagai forum internasional, peran Indonesia terlihat semakin strategis dalam penguatan kerjasama selatan-selatan. Indonesia berpartisipasi secara aktif pada forum *Bogota High Level Event on South-South Cooperation and Capacity Development* (Bogota HLE) pada bulan Maret 2010. Indonesia juga berperan dalam *Task Team on South-South Cooperation* (TT-SSC), sebagai salah satu dari lima belas anggota *Steering Committee* yang pertemuan pertamanya dilaksanakan bersamaan dengan *United Nations Development Cooperation Forum* (UN-DCF) (bappenas.go.id, 2012).

Sulit menolak realita bahwa kelemahan mendasar dari kerjasama selatan-selatan adalah masalah pendanaan (*capital*) yang terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan negara maju dalam konteks pragmatis dianggap penting untuk menstimulus kerjasama selatan-selatan melalui dialog utara-selatan. Sehingga tidak sepenuhnya salah ketika Presiden SBY berusaha untuk melibatkan dialog dengan negara utara. Namun mencari alternatif lain juga perlu dikedepankan seiring masih asimetrisnya model kerjasama utara dan selatan. Sistem asimetris dalam dialog utara-selatan terjadi karena nilai *exchange* yang tidak seimbang (*zero sum game*) bahwa negara maju cenderung menolak bantuan teknologi. Tidak hanya itu, perbedaan kesejahteraan menjadi aspek yang *constraint* terhadap institusionalisasi dialog selatan dan utara.

Prioritas Indonesia untuk menuju *Newly Industrialized Countries* tentu akan mengalami stagnasi ketika Indonesia masih menganut model diplomasi *million friends zero enemy*. Sebuah sikap yang mengaburkan skala prioritas dalam kepentingan luar negeri Indonesia. Bahkan Indonesia melalui semboyan *million friends zero enemy* dalam era Presiden SBY mengabdikan dirinya untuk memperoleh investasi asing sebesar-besarnya. Sebuah sikap konsumeristik yang menajadikan investasi asing sebagai *buffer* utama pembangunan ekonomi nasional. Ironisnya, Presiden SBY justru senantiasa menekankan suatu kebanggaan yang luar biasa atas masih layaknya Indonesia menerima pinjaman dari bank dunia dan lembaga donor lainnya. Pada hakikatnya, investasi memang berdampak positif dalam menstimulus transformasi industri, namun jika tidak ditunjang dengan produk nasional yang kompetitif, maka Indonesia tidak akan berbicara banyak dalam perdagangan internasional.

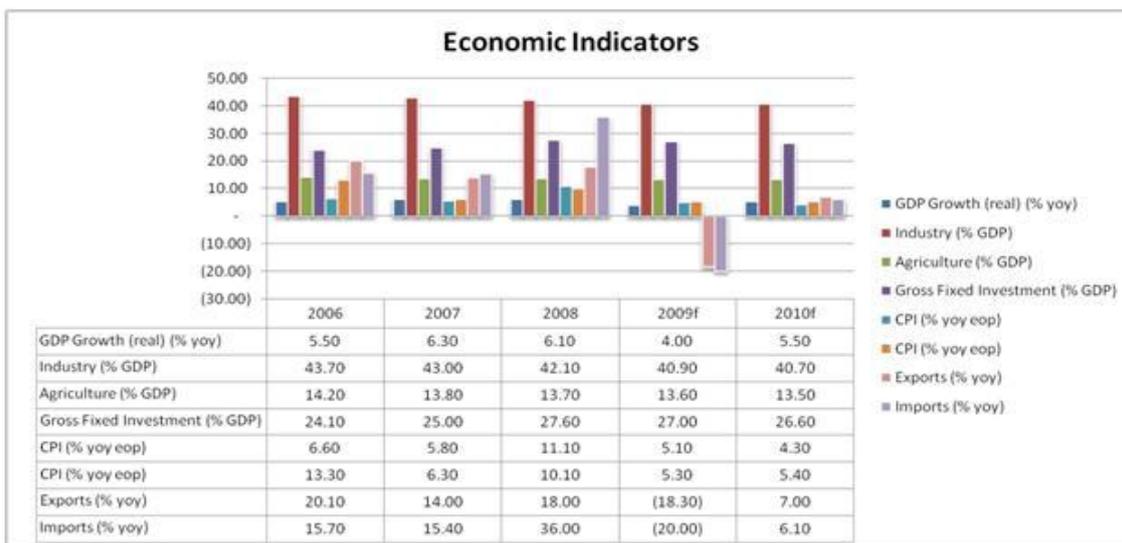
Konsumerisme Indonesia di Tengah Sistem Pembagian Kerja Internasional

Konsumerisme sebagaimana yang disampaikan oleh Frederick Jameson memiliki dua wajah yang dualistis, membuat aktif sekaligus pasif dalam perekonomian global kontemporer. Dalam konteks perdagangan antar negara, Kemunculan BRICs menjadi wajah positif dari kapitalisme konsumer. Namun di sisi lain, kemunculan Indonesia dapat ditinjau dengan konsepsi Marx mengenai alienasi. Konsep alienasi menunjukkan bagaimana kelas proletar terasing secara psikis karena jauh dari akses kepemilikan lahan produksi. Refleksi Konsep alienasi tersebut akan membantu dalam menganalisis sebab kenapa "*human do not make history under condition of their own choosing*". Dalam konteks sistem pembagian kerja internasional, budaya konsumerisme Indonesia merefleksikan adanya keteralienasian tersebut.

Salah satu sampel empiris yang dapat dijadikan contoh konsumerisme negara berkembang adalah Indonesia. Indonesia terlihat secara statistik sangat mengandalkan pada ekonomi berbasis konsumerisme. Pada masa krisis saat ini tampaknya sektor konsumsi menjadi jawaban satu-satunya untuk dapat menjadi *buffer* yang membantu mengangkat kembali kondisi ekonomi. Karena itu, kendati dalam kondisi krisis, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di atas enam persen. Bersama Cina dan India, perekonomian Indonesia tercatat masih dapat tumbuh positif di tengah krisis global. Dalam triwulan II-2009, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 3,7%, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat 4,4% *yoy*. Pada triwulan III tahun 2009 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 4,2% atau membaik dari perkiraan semula yang hanya 3,9%. Secara keseluruhan tahun 2009, ekonomi Indonesia diproyeksikan

tumbuh pada kisaran 4%-4,5%. Angka pertumbuhan tersebut terlihat cukup meyakinkan di tengah melesunya perekonomian global (investor.co.id, 2012).

Konsumerisme, terutama di Indonesia erat kaitannya dengan gaya hidup modernitas. Gaya hidup yang ekstasi ini menjadi semakin merajalela seiring *support* dari lembaga finansial macam perbankan yang minim kontrol. Antusias perbankan justru menjadi hal lumrah mengingat pendapatan nonbunga yang bakal diraihinya cukup menggiurkan. Bahkan muncul keyakinan bertahannya ekonomi Indonesia dari dampak krisis 2008 ke Indonesia dipercaya disebabkan oleh sektor konsumsi Indonesia yang menjadi penopang utama. Apabila kita melihat ekonomi sebagai sebuah mesin dengan berbagai komponen, salah satu komponen yang penting adalah sektor konsumsi. Konsumerisme menyumbang lebih dari 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dalam jumlah penduduk sehingga kekuatan konsumsi dalam ranah domestiknya sangat kuat. Seperti China dan India, konsumsi domestik dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi krisis (managementfile.com, 2012). Sehingga Presiden SBY begitu membanggakan konsumsi sebagai penyangga ekonomi. Namun konsekuensinya, jumlah kekayaan yang beredar banyak menjadi *capital outflow*, sehingga cadangan devisa pemerintah minim. Tingginya sektor konsumsi dapat ditinjau dari tabel berikut:



Tabel 1. Pertumbuhan Sektor Konsumsi Indonesia (bappenas.go.id, 2012)

Sementara itu dari tabel tersebut dapat disimak bahwa momentum pertumbuhan di sektor industri tampaknya justru mengalami penurunan tipis. Diperkirakan proporsi sumbangan sektor industri terhadap pertumbuhan GDP menjadi hanya 40.7% dari proyeksi 40.9% di tahun 2009. Proporsi ini turun jauh dari 42.1% pada tahun 2008 lalu. Kondisi ini inheren dengan asumsi Frederick Jameson yang menjelaskan adanya transisi

dari sektor industri menjadi post-industri yang minim menyerap modal dan tenaga kerja. Sehingga lumrah ketika pada semester pertama tahun 2009 lalu tercatat bahwa pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia cukup solid. Kondisi ini didukung oleh adanya pemilu legislatif dan presiden. Sektor konsumsi sangat diuntungkan dengan adanya perayaan akbar lima tahunan ini. Dari tabel berikut ini tampak bahwa kecenderungan peningkatan pendapatan penduduk Indonesia tercermin melalui pola konsumsi masyarakat.

Kesimpulan

Konsumerisme selain mereproduksi budaya dan nilai kapitalisme dalam paradigma ekonomi negara selatan, sehingga tiap-tiap negara selatan kini berhasrat mengejar “surplus kapital”. Tetapi juga di sisi lain memunculkan budaya konsumerisme yang membuat sebagian negara selatan seperti Indonesia teralienasi, Implikasinya, Indonesia lebih mengandalkan pada sektor konsumsi, ketimbang sektor produksi. Sebuah sistem pembagian kerja baru lahir setelah muncul beberapa negara selatan yang masif secara produksi, dan di sisi lain masif secara konsumsi sehingga membuat adanya hubungan hierarkis sesama negara selatan. Tak pelak, kerjasama ekonomi selatan-selatan kontemporer menunjukkan realitas pembagian kerja internasional model baru. Sebuah *world system* yang secara tidak langsung menciptakan divergensi kepentingan ekonomi antara negara selatan.

Implikasinya, ambisi untuk menjadi negara industri baru tidak malah disiasati oleh Indonesia dengan aktif dalam membingkai produk nasional yang kompetitif. Padahal keberhasilan negara Industri baru lainnya seperti BRICs sejatinya sangat bergantung pada kompetitifnya produk nasional mereka. Namun, Pemerintah Indonesia dengan kepercayaan diri yang tinggi menyatakan kesanggupannya dalam meningkatkan produktivitas industrinya dengan sektor konsumsi dengan investasi asing sebagai penopang utama. Bahkan Pemerintah Indonesia membanggakan konsumsi sebagai penstimulus pertumbuhan ekonomi. Padahal penguatan sektor konsumsi justru akan menjadikan daya konsumsi masyarakat Indonesia diserap oleh negara lain.

Dengan demikian, maka perlu bagi pemerintah menyusun suatu skala prioritas dalam kerjasama selatan-selatan dengan manufakturisasi hilir setelah terlebih dahulu memetakan secara komprehensif mana saja negara selatan yang dapat menjadi sasaran ekspor produk nasional. Dan yang perlu dikhawatirkan, sektor konsumsi tersebut hanya dapat menjadi *buffer* perekonomian dalam jangka pendek. Sebuah strategi yang perlu segera dibenahi agar Indonesia mampu menjadi negara Industri baru (NICs). Apalagi semboyan *million friends* membuat independensi Indonesia setengah hati dan malah

mengajak negara utara untuk berdonasi. Ketika diplomasi diartikan sebagai aksi untuk mencapai kepentingan nasional, maka sektor konsumerisme hanya akan membuat diplomasi hanya sebagai reaksi. Dengan demikian, maka ke depan Indonesia hanya akan menjadi obyek dan bukan subyek dalam perdagangan internasional.

Daftar Pustaka

Buku

Arnsperger, Cristian, 2008. *Critical Political Economy: Complexity, Rationality and The Logic of Post-Orthodox Pluralism*. London: Routledge.

Baudrillard, Jean, 2007. *The Mirror of Production*, Cambridge: Polity Press.

Bell, Daniel, 1990 *The Cultural Contradiction of Late Capitalism* London: Basic Books.

Coronol, Fernando, *Toward a Critique of Globalcentrism: Speculations on Capitalism's Nature*. dalam Comaroff, Jean ed., 2001. "Millenial Capitalism and Culture of Neoliberalisme" (London: Duke University Press.

Giddens, Anthony, 1984. *The Constitution of Society* Cambridge: Polity press.

Hadi, Syamsul, Dharmastuti, Santi., & Ridwan, IZ, 2010. Laporan Akhir Studi Kebijakan Indonesia dalam kerjasama selatan-selatan. Ceacos UI, Bappenas, & JICA, p.45

Hardt, Michael, & Negri, A, 2005. *Empire*. Harvard University Press.

Harvey, David. 2005. *The Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Blackwell.,

Jameson, Frederick, 1988. *The Cultural Logic of late Capitalism*. London: Verso.

James, Jeffrey, 2000. *Globalization and Consumption*. London: Blackwell.

Liotard. Jean F, 1994. *Libidinal Economy*. London: Penguin Books.

Laclau, Ernesto dan Mouffe, Chantal., 2001. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London dan New York: Verso.

Ritzer, George, 2005. *Teori Sosial Postmoden*. Yogya : Kreasi Wacana.

Stiglitz. Joseph, 2009. *Freefall: America, Free market and the Sinking of Global Economy*. New York: Norton Company.

Jurnal

Onuf, Nicholas. "Institution, Intention, and International Relation", *Journal Review of International Studies*, Vol 28, No.3. (2002): 211-228.

Harvey, David. "Is This Really the End of Neoliberalism?". *Journal of New Left*, No. 1, Vol 45, (2009): 45-67.

Internet

Badan Pembangunan Nasional. "Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan", diakses dalam <<http://www.bappenas.go.id/node/116/2709/seminar-nasional-pengembangan-kerja-sama-selatan-selatan/>>, pada 6 Maret 2012.

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, diakses dalam <<http://infopublik.depkominfo.go.id/?page=news&newsid=1742>>, pada 4 Maret 2012.

Departemen Pertanian Republik Indonesia. "World Trade Organization", diakses dalam <<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.html>> pada 4 Maret 2013.

Indoanalisis, "Kinerja Industri Indonesia", diakses dalam <<http://www.indoanalisis.com/beranda/industry-data/kinerja-industri-indonesia-2012/>>, pada 1 Maret 2012.

Investor Daily. "Soliditas Kerja Emiten", diakses dalam <<http://www.investor.co.id/tajuk/soliditas-kinerja-emiten/11267>>, pada 2 Maret 2012.

Manajemen Files. diakses dalam <<http://www.managementfile.com/column.php?sub=economy&id=1790&page=economy>>, pada 2 Maret 2012.

KRISIS PANGAN GLOBAL: ISU GLOBAL AKSI LOKAL (Studi Kasus: Indonesia)

Denik Iswardani W.
Elistania

Abstract

The world is currently in the global food crisis. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), the increasing rate of food prices is indicated the occurrence of food crises. This paper examines the issue of global food crisis as a food security problem using secondary data. For further understanding, this study takes a case study in Indonesia. This study explains some factors causing the food crisis that occurred in Indonesia. It also shows how the government deals with this food crisis. This paper concludes that the world economic system is greatly affected world food crisis. Indeed, food crisis is a global phenomenon; however, Indonesia's government has responsibility to address the food shortage in its territory.

Keywords: *food crisis, food security, non-conventional issues*

Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting dan merupakan indikator utama kesejahteraan manusia. *UNDP* menyatakan keamanan pangan tidak saja merujuk kepada kecukupan akan suplai makanan, tetapi juga berarti bahwa semua orang setiap saat harus memiliki akses baik secara fisik maupun ekonomi ke atas pangan. Ini membutuhkan tidak saja ada makanan yang cukup di sekitar kita, tetapi juga memerlukan keadaan bahwa orang mempunyai akses yang siap terhadap pangan (*UNDP*, 1994: 22).

Ada dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keamanan pangan ini yaitu: pertama, kecukupan pangan yang diukur dari harian per kapita. Kedua, angka kelaparan anak yang diukur dari persentasi anak di bawah 5 tahun yang kurang gizi (Jenkins&Scanlan, 2001). Di Indonesia saat ini, 17,9% anak balita (atau sekitar 5 juta jiwa) mengalami masalah gizi akibat mahalnnya harga pangan. Angka ini kebanyakan di wilayah pedesaan. (Riset Kesehatan Dasar, 2010). Ini menjadi salah satu indikator bahwa keamanan pangan Indonesia rawan terhadap krisis pangan.

Kerawanan pangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya hubungan krisis pangan global dengan krisis-krisis yang terjadi di negara-negara berkembang.

Makanan menyumbang sebagian besar dari anggaran rumah tangga miskin, sehingga, ketika harga pangan meningkat, negara-negara miskin dan orang-orang miskin adalah yang paling menderita. Apabila dianalisis lebih jauh, hal tersebutlah yang seringkali menjadi salah satu faktor konflik dapat terjadi. Ketika masyarakat merasa kelaparan, sementara produsen tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, perlahan konflik kecil muncul (utamanya di daerah pedalaman), karena kebutuhan pangan tidak terpenuhi. Tulisan berikut membahas fenomena krisis pangan global dengan menumpukan kajian pada kasus yang terjadi di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan krisis pangan tersebut. Berikutnya juga dijelaskan bagaimana krisis pangan tersebut pada akhirnya dapat menjadi ancaman bagi keamanan individu maupun masyarakat.

Pembahasan

Dekade ini, harga berbagai kebutuhan pokok mulai dari pangan hingga bahan bakar mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Harga tersebut bahkan sudah melampaui harga-harga yang pernah berlaku sebelumnya. Harga beras ekspor meningkat secara tetap sejak Juni 2010 karena permintaan yang kuat sementara itu pasokan justru berkurang (*Corporate Farming and Food Security*. Februari 2011). Terlebih lagi 2011 lalu, tiga negara pengekspor beras utama yaitu Pakistan, Thailand dan Vietnam banjir sehingga merusak banyak tanaman, dan hal itu mempengaruhi pasokan beras yang terus berkurang. Filipina misalnya, merupakan salah satu negara berkembang yang dapat terkena krisis pangan karena pasokan berasnya menurun. Situasi seperti ini dapat memperburuk sebagian pasar tradisional karena negara pemasok beras cenderung untuk menyembunyikan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri mereka (misalnya melalui biaya kuota ekspor). Negara yang rentan terhadap fluktuasi dan harga beras di dunia pasar memang telah ditegaskan oleh ketergantungan pada impor. Rata-rata produksi domestik hanya dapat memenuhi 90% dari permintaan, sementara itu sisanya dipenuhi melalui impor (*Corporate Farming and Food Security*. Februari 2011).

Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut tampaknya sekaligus menjadi pertanda dan peringatan awal akan terjadinya krisis global terutama dalam hal pangan. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), tingkat kenaikan harga pangan yang terus-menerus mengalami kenaikan signifikan merupakan salah indikator terjadinya krisis pangan. Laporan FAO yang berjudul "*Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities*" menunjukkan indeks harga pangan meningkat rata-rata 9 persen pada tahun 2006. Harga ini meningkat jauh lebih tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan pada tahun 2007 indeks harga pangan meningkat 23 persen dibandingkan dengan tahun 2006. Hingga caturwulan pertama 2008, indeks harga pangan telah meningkat pada level 97 persen. Pada awal tahun 2011, harga pangan dunia kembali meningkat ke level tertinggi di atas 2008. Indeks harga pangan global Februari mencapai 236 poin atau naik 2,2 persen dibanding Januari sebesar 231 poin (www.fao.org, 5 September 2011).

Faktor-Faktor Pemicu Krisis Pangan

Beberapa pertemuan dunia telah diadakan untuk mengatasi masalah krisis pangan mulai dari KTT Washington yang dipelopori oleh negara-negara G7, dan lembaga-lembaga multilateral dunia, KTT Pangan Amerika Latin, hingga KTT Pangan yang berlangsung di Roma. Hasil pertemuan menyimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan krisis pangan saat ini terjadi. Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk, efek pemanasan global akibat kerusakan lingkungan alam, krisis energi dan penggunaan bahan pangan sebagai pengganti bahan bakar fosil dituding sebagai penyebab krisis yang terjadi. Sedangkan menurut *FAO*, secara umum kenaikan harga pangan dunia juga terimbas harga minyak yang terus menguat serta kondisi cuaca buruk di negara-negara seperti China dan Rusia serta munculnya spekulasi di pasar komoditas (<http://id.ibtimes.com/articles/3906/20110105/pbb-harga-pangan-global-meningkat.htm> akses 7 Agustus 2011).

Krisis pangan global juga terjadi karena sistem ekonomi dunia yang sangat neoliberalis yang membebaskan perusahaan multinasional mengejar keuntungan. Privatisasi dan eksploitasi terus dilakukan tanpa memikirkan konsekuensi lingkungan yang dapat timbul karenanya. Akibatnya suhu menjadi tidak menentu dan kualitas tanah serta penyerapan air di negara berkembang mejadi rusak. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi penyebab kegagalan panen. Sedangkan negara berkembang adalah penghasil bahan pangan terbesar di dunia (Marcella, 2007).

Ada 36 negara di dunia yang tengah dilanda krisis pangan yaitu Lesotho, Somalia, Swaziland, Zimbabwe, Eritrea, Liberia, Mauritania, Sierra Leone, Burundi, Republik Afrika Tengah, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Kongo, Ethiopia, Ghana, Guinea, Guinea, Bissau, Kenya, Sudan, Uganda, Irak, Afghanistan, Korea Utara, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan TimorLeste, Bolivia, Haiti, Nikaragua, Republik Dominika , Republik Moldova dan Federasi Rusia (*Global Information and Early Warning System* *FAO*, 2008).

Memang kondisi Indonesia tidak separah negara-negara di kawasan Afrika, tetapi krisis pangan tersebut sudah menjadi suatu kerawanan dan ancaman. Mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang berdasarkan sensus tahun 2010 mencapai 237.556.363 orang (www.bps.go.id/ diakses 12 Agustus 2011), bukan merupakan hal yang mudah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingginya harga bahan pangan di Indonesia sekarang ini. Pada awal tahun 2011 harga kebutuhan pokok terutama beras naik 12,36 persen dan tepung terigu naik 0,36 persen (sumber: Perubahan Iklim dan Ancaman Krisis Pangan Dunia, diperoleh dari <http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/02/05/134/Perubahan-Iklim-dan-Ancaman-Krisis-Pangan-Dunia-> diakses pada 23 Juli 2011).

Rata-rata per-tahun, Indonesia mengeluarkan Rp. 110 triliun untuk impor pangan, sementara nilai pembiayaan pertanian dalam APBN hanya Rp. 38,2 triliun. Ketergantungan impor terus-menerus akan mempengaruhi penurunan produksi pangan dalam negeri (<http://www.csoforum.net/multimedia/bahan-bacaan/435-110-triliun-rupiah-untuk-impor-pangan-vs-382-triliun-pembiayaan-pertanian.html> diakses 1 September 2011). Direktur Riset *Institute for Development of Economics of Finance* (Indef), Evi Noor Afifah menyatidakan bahwa ketergantungan Indonesia yang besar terhadap impor sejumlah komoditas pangan utama menyebabkan Indonesia terancam menghadapi krisis pangan. Ketergantungan impor terus-menerus akan mempengaruhi penurunan produksi pangan dalam negeri, dan ini akan menjadi sangat berbahaya karena kita tidak dapat mengontrol jika terjadi gejolak harga atau penurunan produksi di pasar internasional (<http://www.voanews.com/indonesian/news/Indonesia-Terancam-Krisis-Pangan-117202983.html> diakses pada 2 September 2011).

Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2008 produksi beras nasional selalu surplus. Tetapi sejak tahun 2008 hingga kini, Impor beras terus dilakukan. Sampai Juli 2011, Pemerintah telah melakukan pengadaan beras melalui impor sebanyak 1,57 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras impor tersebut paling banyak berasal dari Vietnam yaitu 892,9 ribu ton dengan nilai US\$ 452,2 juta. Sementara beras impor Thailand, telah masuk sebanyak 665,8 ribu ton dengan nilai US\$ 364,1 juta hingga Juli. Selain dari Vietnam dan Thailand, pemerintah juga mengimpor beras dari Cina, India, Pakistan, dan beberapa negara lainnya (www.bps.go.id diakses pada 13 Juli 2012).

Juli 2012 pemerintah telah berencana mengimpor beras justru di tengah panen padi tahun 2012 diperkirakan meningkat tajam. Di situs *Oryza News*, Kementerian Perdagangan Kamboja menyebutkan, Indonesia akan membeli beras dari Kamboja

sebanyak 100.000 ton. Pengadaan beras tahun 2012, hingga Juli mencapai 2,5 juta ton dan ditargetkan pada akhir 2012 mencapai 3 juta ton, padahal tahun lalu pengadaan beras hanya mencapai 1,8 juta ton (*Kompas*, 20 Juli 2012).

Faktor penyebab adanya kebijakan impor ini adalah pilihan kebijakan pangan dan pertanian yang salah. Pemerintah lebih memilih mengembangkan perkebunan dibandingkan tanaman pangan, sehingga Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan dan peternakan 4,3 miliar US\$ (Kementan dan BPS, 2009). Menurut Surono (2001), berbagai kebijakan dalam usaha pertanian (beras) yang telah ditempuh pemerintah pada dasarnya kurang berpihak kepada kepentingan petani. Pertama, terdapat kebijakan tarif impor yang sangat rendah sehingga mendorong semakin mudahnya beras impor masuk dan melebihi kebutuhan dalam negeri. Kedua, penghapuan subsidi pupuk yang merupakan sarana produksi utama petani dapat mengurangi produktivitas petani. Selanjutnya, teknologi yang dimiliki petani Indonesia juga sudah jauh tertinggal sehingga kualitas beras yang dihasilkan pada umumnya kalah dengan kualitas beras impor.¹ Kemudian berdasarkan pernyataan dari Bulog, mereka mengklaim bahwa kebijakan impor adalah dengan tujuan mengamankan stok beras dalam negeri. Bulog berargumen bahwa data produksi oleh BPS tidak dapat dijadikan pijakan sepenuhnya. Perhitungan produksi beras yang merupakan kerjasama antara BPS dan Kementerian Pertanian ini masih diragukan keakuratannya, terutama metode perhitungan luas panen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yang megandalkan metode pandangan mata (<http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/kebijakan-impor-beras-di-indonesia/> pada 23 Juli 2012).

Selain itu, faktor perubahan iklim juga menjadi salah satu pemicu peningkatan spekulasi pangan beberapa tahun terakhir. Akibat kondisi iklim yang tidak stabil berpengaruh pula pada produksi pangan, walaupun hingga hari ini produksi pangan dunia sesungguhnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia, namun produksi ini tidak merata. Di satu sisi sejumlah daerah memiliki penurunan produksi, di sisi lain sejumlah daerah juga mengalami peningkatan produksi seperti misalnya sawah tadah hujan yang dapat tanam 2-3 kali akibat peningkatan curah hujan. Ketidakstabilan dan tidak meratanya produksi pangan, menjadi ajang spekulasi yang menguntungkan bagi para pemilik modal.

Misalnya kasus lonjakan harga beras hingga 30%, harga cabe naik hingga 120% di awal tahun ini karena terjadi sedikit penurunan produksi sementara di tingkat petani harganya relatif tetap (<http://www.csoforum.net/multimedia/bahan-bacaan/435-110-triliun-rupiah-untuk-impor-pangan-vs-382-triliun-pembiayaan-pertanian.html>). Diakses 1 September 2011).

Keamanan Pangan (*Food Security*)

Food security atau keamanan pangan merupakan unsur penting dalam penelitian ini. Seperti yang telah disampaikan bahwa keamanan pangan di sini artinya merujuk pada setiap orang untuk mengakses pangan dengan mudah, serta adanya akses yang siap terhadap pangan ke depannya. Keamanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya keamanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan yang mesti dikelola secara bijaksana. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata, yang harus dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi. Subsistem konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal (Maleha&Sutanto, 2006: 196).

Dari segi kelembagaan, keamanan pangan tercapai melalui sinergi antara subsistem individu atau keluarga, subsistem masyarakat, dan subsistem pemerintah. Mekanisme subsistem ini dihubungkan dengan berbagai aspek pembangunan lain seperti pertanian, transportasi, teknologi, sumber daya alam dan lingkungan, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, keamanan pangan bukan hanya sekadar pemenuhan produksi makanan, tetapi merupakan persoalan yang lebih kompleks, yang memiliki perspektif pembangunan dan ekonomi politik. Pangan mencakup makanan yang sehat, ramah lingkungan, dan diproduksi dengan *good governance*. Tetapi tidak terbatas hanya pada beras atau makanan, tetapi juga mencakup air dan udara. Indonesia sebenarnya mempunyai lahan yang relatif banyak, namun kendalanya adalah lahan-lahan tersebut dialihkan ke sektor bukan pertanian, sementara pemerintah fokus pada pasar bebas yang akhirnya menyebabkan lahan-lahan tersebut digunakan untuk pembangunan

gedung pencakar langit. Di Jakarta misalnya, diberlakukan “*free market*” karena kekurangan lahan untuk pertanian.

Apabila kita lihat kerentanan pangan Indonesia baru-baru ini semakin mengkhawatirkan. Kekeringan yang dialami Amerika Serikat menyebabkan sejumlah komoditas mengalami lonjakan harga menjadi bukti bahwa Indonesia rentan krisis pangan. Ketergantungan pada pangan impor mengakibatkan guncangan pasokan dan kenaikan harga di pasar dalam negeri. Saat ini Indonesia bergantung pada komoditas pangan impor dalam jumlah besar, seperti beras, jagung, kedelai, gandum, sapi, buah dan susu (*Kompas*. 25 Juli 2012).

Semua faktor tersebut akhirnya memicu kekhawatiran akan adanya kerusuhan di sejumlah daerah. Baru-baru ini sejumlah petani turun ke jalan berunjuk rasa karena tidak sependapat dengan pemerintah dengan alasan naiknya harga kedelai. Hal tersebut terjadi sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah tidak dapat mengamankan pangan dengan baik. Kebijakan impor dengan alasan untuk menjaga pasokan dalam negeri, akhirnya justru menjadikan Indonesia ketergantungan impor pangan. Maka ketika banyak negara rentan krisis pangan, pun begitu Indonesia terkena imbasnya.

Upaya Indonesia Menangani Krisis Pangan

Kini banyak solusi untuk mengamankan pangan, namun fokus utama akhirnya tertuju pada bagaimana pemerintah dapat mensosialisasikan konservasi keanekaragaman hayati. Melestarikan dan melindungi merupakan solusi yang terpenting karena faktor utama adalah pertanian, khususnya bagaimana lahan dan tanaman itu sendiri dapat dimanfaatkan dengan baik. Meningkatkan produktivitas dan produksi pangan di negara berkembang memang membutuhkan multi-pendekatan bercabang yang membahas semua masalah di sepanjang rantai pertanian, seperti: hak milik, penelitian dan pengembangan untuk benih dan masukan, irigasi, pupuk, pertanian penuluhan, kredit, infrastruktur pedesaan, penyimpanan dan koneksi ke pasar (*Zoellick, Newsweek, ‘No Return to the Gold Standard’, 23 Januari, 2011*)

Keseragaman jenis makanan yang tidak sesuai dengan faktor budaya suatu wilayah dapat menyebabkan krisis makanan. Pakar Gizi Universitas Indonesia, Arum Atmawikarta berpendapat bahawa seharusnya orang asli yang memakan ubi justru ditingkatkan. Kelaparan atau krisis pangan terjadi kadang bukan karena penggantian makanan, tapi mereka tidak sesuai makanannya.

Begitu juga dengan di Ambon, dengan satu kali menanam sagu, dapat sampai enam bulan untuk satu keluarga. Oleh karena itu pemerintah harus menyesuaikan dan tidak dapat menyamaratakan (<http://berita.liputan6.com/read/322201/tingkatkan-gizi-pemerintah-harus-perhatikan-budaya> diakses 19 Agustus 2011).

Untuk mengatasi krisis pangan yang mengancam, pemerintah mulai mengembangkan kebijakan yang berkenaan dengan keamanan pangan. Di Indonesia, secara formal dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, istilah kebijakan dan program keamanan pangan diadopsi sejak tahun 1992 (Repelita VI) yang definisi formalnya dicantumkan dalam undang-undang pangan tahun 1996. Dalam pasal 1 Undang-Undang Pangan tahun 1996, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau (<http://www.theceli.com/dokumen/produk/1996/uu7-1996.htm> diakses 1 September 2011).

Saat ini, kebijakan pemerintah Indonesia masih kurang efektif untuk menghadapi ancaman krisis pangan. Elisha Kartini, staf Departemen Kajian Strategis Serikat Petani Indonesia dalam wawancara menyatakan bahwa kondisi kekuatan dan keamanan pangan di Indonesia saat ini sedang berada pada titik yang jika tidak segera dilakukan perbaikan dapat menyebabkan ketergantungan bahkan kerawanan pangan. Dari sisi produsen pangan utama, petani dalam hal ini, jumlahnya masih sangat dominan di Indonesia. Berdasarkan sensus pertanian masih terdapat 25 juta rumah tangga petani, dengan rata-rata pertumbuhan 2,2% per tahun, bahkan 46% tenaga kerja masih bekerja di sektor pertanian, suatu jumlah yang sangat besar. Namun di sisi sumber daya pertanian seperti, tanah, air, benih, dan dukungan infrastruktur dan kebijakan pertanian justru menghambat produksi pertanian nasional.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur (sawit khususnya), tambang dan infrastruktur sebesar 230.000 hektar per tahun akan mempengaruhi penurunan produksi pangan dengan cepat, pengusaan sumber daya air oleh sejumlah perusahaan swasta seperti di Sukabumi, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lain serta kondisi irigasi yang buruk juga mempengaruhi produksi dan produktivitas tanaman pangan. Di sisi lain kebijakan pertanian justru membuka pintu impor pangan besar-besaran. Hal ini menurunkan insentif bagi petani untuk terus memproduksi, seperti contohnya pada petani kedelai yang sempat mengalami swasembada pada awal tahun 1990-an namun mendapat gempuran kedelai impor murah membuat mereka kalah

bersaing sehingga saat ini Indonesia harus mengimpor 70% kebutuhan kedelainya (<http://www.csoforum.net/multimedia/bahan-bacaan/435-110-triliun-rupiah-untuk-impor-pangan-vs-382-triliun-pembiayaan-pertanian.html> diakses 1 September 2011).

Untuk itu, *Indef* mendesak pemerintah segera melakukan upaya peningkatan produktivitas dan produksi pangan Indonesia agar Indonesia kedepan terhindar dari ancaman krisis pangan. Evi Noor Afifah, menegaskan bahwa Indonesia perlu upaya sistimatis untuk mencapai swasembada pangan, kemudian harus ada stok penyangga keamanan pangan yang memadai dengan mengutamakan penyerapan dari dalam negeri. Jadi dengan adanya stok penyangga keamanan pangan ini diharapkan harga pangan ini tidak menjadi fluktuatif sedangkan pengamat Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor, Drajad Wibowo mengungkapkan sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu berswasembada beras maupun komoditas lainnya (<http://www.voanews.com/indonesian/news/Indonesia-Terancam-Krisis-Pangan-117202983.html> diakses 1 September 2011).

Mengenai hal tersebut, Menteri Pertanian Suswono menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk tidak melakukan impor sejumlah komoditas pangan. Pemerintah, juga sangat memperhatikan nasib petani. Pemerintah saat ini juga telah menyediakan dana sebesar dua triliun rupiah untuk petani yang merugi akibat perubahan cuaca ekstrim. Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi beras tahun 2011 sebesar 70,6 juta ton guna mengatasi krisis pangan di Indonesia (<http://sumut.litbang.deptan.go.id> diakses pada 8 Agustus 2011).

Memang sektor pertanian mempunyai peranan penting untuk memperbaiki krisis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Ilmu-ilmu Pertanian Indonesia menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, yaitu mencapai 66%, dengan rincian 74% di pedesaan dan 55% di perkotaan. Berdasarkan data kemiskinan tahun 2005 – 2008, kesejahteraan penduduk pedesaan dan perkotaan membaik secara berkelanjutan (<http://www.iasa-pusat.org/artikel/strategi-dan-pencapaian-swasembada-pangan-di-indonesia.html> diakses pada 8 Agustus 2011).

Selain hal tersebut, pemerintah juga perlu menggalakkan upaya diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan keamanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi

untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi (Himagizi, 2009). Selain itu, seperti pernyataan Suswono, bahwa solusi lainnya adalah dengan meningkatkan produksi. Jika Indonesia dapat jadi eksportir pangan, gejolak dapat diatasi. Oleh karena itu, peningkatan produksi hingga ekspor harus menjadi perhatian pemerintah (*Kompas*. 25 Juli 2012)

Kesimpulan

Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, pastilah hal tersebut dapat mengancam keamanan bagi kehidupan individual manusia itu sendiri, dan tentu dapat memicu konflik bagi masyarakat. Berdasarkan data dan analisis tersebut, terlihat adanya hubungan antara krisis pangan dan kesejahteraan dalam menjamin keamanan pangan. Krisis pangan yang terjadi di beberapa wilayah telah mengancam hak individu maupun masyarakat untuk mendapatkan pangan. Keamanan tidak akan pernah tercapai apabila kesejahteraan rakyat tidak terjamin. Untuk itu, upaya untuk menjaga keamanan pangan juga berarti harus menjaga kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemberantasan kemiskinan. Keduanya mesti berada dalam keadaan yang sama kuat.

Untuk memenuhi permintaan pangan dalam negeri berkembang, sistem produksi kecil tidak dapat tetap statis. Mereka harus bersiap diri untuk meningkatkan beberapa derajat komersialisasi. Selain itu, dengan peluang pasar baru dari lingkungan perdagangan yang lebih liberal, produksi sistem harus pindah dari pertanian subsistem tradisional untuk suatu kegiatan bahwa *output* pertanian lebih responsif terhadap tren pasar.

Daftar Pustaka

Buku

Jenkins, J.C & Stephen J. Scanlan. 2001. Food Security in Less Developed Countries, 1970 to 1990. *American Sociological Review*.

Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2000 Tentang Ketahanan Pangan*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.

Surat Kabar

Kompas. 2012. Panen Padi Melimpah, Indonesia Malah Impor.

Kompas. 2012. Indonesia Rawan Krisis Pangan.

Zoellick, Newsweek, 'No Return to the Gold Standard'. 2011

Internet

<http://www.detikfinance.com/read/2008/03/02/122419/902557/4/36-negara-terkena-krisis-pangan-termasuk-indonesia> "Global Information and Early Warning System FAO. 2008. *Negara-Negara yang Terkena Krisis Pangan*.

<http://gizi.fema.ipb.ac.id/himagizi/?p=83> Himagizi. 2009. *Diversifikasi Pangan*.

<http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/kebijakan-impor-beras-di-indonesia/> Kanopi FEUI. *Kebijakan Impor Beras di Indonesia*. 2011.

<http://www.ipb.ac.id/lombaartikel/pendaftaran/uploads/tpb/pertanian-dan-pangan/Diversifikasi.pdf>, Purnama, Adi & Nur'aripin. 2010. *Diversifikasi Pangan untuk Mengatasi Krisis Pangan di Indonesia*

<http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/02/05/134/Perubahan-Iklim-dan-Ancaman-Krisis-Pangan-Dunia-> *Perubahan Iklim dan Ancaman Krisis Pangan Dunia*. 2011.

<http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article/swasembada.pdf>, Tjondronegoro, Sediono M.P. 2006. *Swasembada Pangan Berkelanjutan: Apakah Realistis?*

www.fao.org

<http://id.ibtimes.com/articles/3906/20110105/pbb-harga-pangan-global-meningkat.htm>
www.bps.go.id/

<http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/02/05/134/Perubahan-Iklim-dan-Ancaman-Krisis-Pangan-Dunia>

<http://www.csoforum.net/multimedia/bahan-bacaan/435-110-triliun-rupiah-untuk-impor-pangan-vs-382-triliun-pembiayaan-pertanian.html>

<http://www.voanews.com/indonesian/news/Indonesia-Terancam-Krisis-Pangan-117202983.html>

<http://www.theceli.com/dokumen/produk/1996/uu7-1996.htm>

<http://berita.liputan6.com/read/322201/tingkatkan-gizi-pemerintah-harus-perhatikan-budaya>

<http://www.iasa-pusat.org/artikel/strategi-dan-pencapaian-swasembada-pangan-di-indonesia.html>

<http://sumut.litbang.deptan.go.id>

PENGARUH MEDIA TELEVISI AMERIKA SERIKAT TERHADAP BUDAYA INDONESIA

Yusran¹
yusran@budiluhur.ac.id

Abstract

This paper aims to analyze the influence of American television media on the culture of Indonesia. The qualitative method was chosen to explain the phenomenon in this paper. In this paper found that globalization has made the United States is not confined to economic and political course, and even cultural. Although there are various problems due to various conflicts and differences of mass global culture that Americans are socialized to the fundamental cultural-owned Indonesian nation, but the American effort that showed the level of success. Television as one of the electronic media hegemonization somewhat effective in American culture. it is evident with the emergence of various cultural shift in Indonesia. From this paper, it can be concluded that American television media has managed to influence the Indonesian cultures which can be identified from the Indonesian cultural shifts that can be seen easily by naked eye.

Key words: *Media, Television, Culture*

A. Pendahuluan

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berasal dari Amerika Serikat (AS). Kemajuan itu memberikan berbagai bentuk kemudahan dan fasilitas bagi manusia dalam menjalani hidup. Kemajuan itu tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Amerika Serikat sebagai inovator saja, namun hampir seluruh warga dunia. Globalisasi ternyata telah berjasa membuat warga hampir di seluruh belahan bumi ini dapat turut menikmati inovasi dari buah pemikiran insan Amerika Serikat itu, walaupun pada akhirnya hal itu menimbulkan sebuah bentuk ketidakselarasan dan perbedaan dalam budaya ekonomi global.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Amerika Serikat mencakup berbagai aspek. Salah satu aspek yang berpengaruh relatif sangat signifikan adalah kemajuan di bidang media dalam berbagai macam bentuknya, termasuk media elektronik. Akan tetapi ditengah perjalanannya, dapat dilihat bahwa eksistensi media Amerika Serikat di tengah dunia global telah menimbulkan berbagai macam pengaruh. Tidak terkecuali di Indonesia yang juga turut menikmati hasil inovasi media Amerika Serikat. Media elektronik Amerika Serikat mempengaruhi perubahan-perubahan budaya ekonomi di Indonesia.

Topik besar dari tulisan ini adalah jangkauan pengaruh media elektronik Amerika Serikat di Indonesia. Namun agar lebih spesifik, penulis mengangkat sub topik mengenai pengaruh media elektronik (televisi) Amerika Serikat terhadap budaya Indonesia. Dari subtopik yang sekaligus judul tulisan ini, penulis bermaksud untuk menelaah mengenai

perubahan-perubahan budaya ekonomi yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh pengaruh media televisi Amerika Serikat.

Perubahan Budaya Indonesia akibat Tayangan Televisi Amerika Serikat

a. Globalisasi dan Media

Globalisasi dapat digambarkan sebagai suatu proses 'saling ketergantungan' ekonomis yang terus berkembang di antara negara-negara di dunia (Singh, 1998:3). Pada hakekatnya, globalisasi sebenarnya bukanlah fenomena baru, melainkan proses yang sudah berlangsung sejak lama yakni ketika lahirnya teori dan sistem ekonomi pasar oleh Adam Smith pada abad ke-18. Akan tetapi, globalisasi saat itu belum bernama. Globalisasi menemukan momentum baru dalam fase perkembangannya pada tahun 1980-an melalui reformasi kebijakan ekonomi politik yang digagas oleh Ronald Reagan. Semenjak saat itulah globalisasi mulai digaungkan dan berkembang secara agresif. Akan tetapi, di tengah perjalanannya 'mengglobalkan' dunia, globalisasi ternyata menimbulkan berbagai benturan. Globalisasi memunculkan ketidakselarasan dan perbedaan dalam budaya ekonomi global.

Amerika Serikat merupakan bangsa yang dominan di dunia (Inkriwang, 2008:122). Dalam konsep globalisasi, Amerika Serikat merupakan kreator sekaligus promotornya. Dengan eksistensinya sebagai bangsa yang dominan di dunia, menumbuhkembangkan globalisasi bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan Amerika Serikat.

Dalam masyarakat Amerika Serikat, konsep dalam hidup merupakan sebagian besar nilai yang utama (Inkriwang, 2008:23). Melalui globalisasi, Amerika Serikat mencoba untuk mentransfer nilai-nilai utama yang melandasi konsep hidupnya itu ke seluruh dunia. Transformasi nilai-nilai itu dilakukan dalam upaya meningkatkan dan memperkuat pengaruh Amerika Serikat dalam tatanan global agar menjadi semakin dominan. Dari globalisasi ini akan muncul berbagai bentuk interaksi. Seolah-olah melakukan Amerika Serikatnisasi, namun secara fundamental sasaran utama globalisasi adalah motif-motif ekonomi.

Persoalan utama dari interaksi global saat ini adalah tekanan antara homogenisasi budaya dan heterogenisasi budaya (Appadurai, 2003:1). Secara mendasar persoalan ini memang berbeda. Namun dalam konteks globalisasi yang difungsikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari motif-motif ekonomi, hal ini dapat dipersamakan. Selain itu, Amerika Serikatnisasi dan Komoditisasi juga dapat dikatakan sebagai proses yang mendukung upaya dominasi ekonomi Amerika Serikat. Dominasi ekonomi ini, pada akhirnya mengakibatkan benturan dalam budaya ekonomi global.

Globalisasi telah berhasil membuat sebuah bentuk budaya ekonomi global yang baru. Budaya ekonomi global yang baru itu dipahami sebagai sesuatu yang kompleks, tumpang tindih, dan nilai yang tidak selaras. Terdapat terminasi besar yang semakin memunculkan model *center-periphery*. Keadaan itu juga memunculkan berbagai kompleksitas berbagai kemungkinan teori antara surplus dan defisit, konsumen dan produsen, yang kesemuanya ini dapat disebut sebagai disorganisasi kapitalisme. Kompleksitas dari pusaran ekonomi global itu mengakibatkan ketidakselarasan secara fundamental antara ekonomi, budaya, dan politik (Appadurai, 2003:2).

Dalam manifestasi global yang luas, hubungan antara bangsa-bangsa dan negara-negara juga bertalian. Terdapat berbagai tekanan dalam homogenisasi yang dapat dieksploitasi oleh negara-bangsa dalam hubungannya dengan kelompok yang lebih minoritas. Komoditisasi sebenarnya lebih merupakan bentuk yang real dari tindakan strategi hegemoni (Appadurai, 2003:2).

Untuk menemukan ketidakselarasan dalam budaya global terdapat sebuah kerangka kerja yang diidentifikasi dalam lima dimensi: *ethnoscapes*, *mediascapes*, *technoscapes*, *finanscapes*, dan *ideoscapes* (Appadurai, 2003:3). Kelima dimensi ini dapat menjadi tampilan yang mengindikasikan hubungan-hubungan dan gejala-gejala yang membangun munculnya ketidakselarasan dan perbedaan budaya ekonomi dalam masyarakat akibat globalisasi. *Mediascapes* merupakan salah satu dari lima dimensi untuk menelusuri ketidakselarasan budaya ekonomi yang terjadi. *Mediascapes* dapat difungsikan sebagai wahana untuk mentransformasi nilai-nilai yang bertujuan untuk mempengaruhi budaya global.

Dalam konteks globalisasi, media menemukan momentum perkembangan yang mutakhir (Rahim, 2007:123). Media dapat dikategorikan sebagai salah satu instrumen yang dapat diunggulkan untuk melakukan penetrasi dan akses tidak terbatas terhadap sasaran dan tujuannya (Aronson, 2006:623). Dengan keunggulannya, media juga dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang berjasa dalam proses sosialisasi globalisasi.

Media memperlihatkan kepada kita dan membuat kita mengerti melalui beberapa proses seperti representasi, interpretasi, dan evaluasi (Scream: 34). Tidak dapat dinafikan bahwa media mempunyai potensi untuk mempengaruhi budaya (Rahim, 2008:31). Pengaruh yang diberikan media ini tidak hanya terbatas pada masyarakat biasa dalam sebuah negara bangsa, selain itu juga mempengaruhi tatanan suprastruktur pada tingkat pengambilan kebijakan negara.

Sebagai salah satu instrumen dalam mensosialisasikan globalisasi – bahwa Amerika Serikat sebagai kreator dan inovatornya – media memiliki peranan yang strategis. Media memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya hegemonisasi

Amerika Serikat. Keberhasilan Amerika Serikat untuk mengembangkan pengaruhnya melalui media, tidak hanya berhasil dalam aspek politik dan ekonomi saja, selain itu juga dalam aspek budaya. Akan tetapi benturan-benturan yang terjadi dalam proses-proses itu, menciptakan ketidakselarasan dan perbedaan budaya ekonomi secara global.

b. Peranan Media Televisi Amerika Serikat dalam Perubahan Budaya Ekonomi di Indonesia

Tidak ada yang dapat membantah bahwa Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengarahkan berbagai konstelasi di dunia. Pengaruh itu tidak hanya terbatas pada politik dan ekonomi semata, namun juga meluas pada aspek budaya. Budaya massa Amerika Serikat kini tengah mengglobal dan berhasil mempengaruhi budaya-budaya negara-bangsa yang lain di dunia. Ekspansi budaya yang dilakukan Amerika Serikat sesungguhnya bertalian erat dengan cita-cita kemerdekaannya. Dan model ekspansi budaya massa sebagai ciri modernitas Amerika Serikat itu menjadi semakin efektif ketika isu dan praktik globalisasi berjalan (Sumrahadi, 2006:50 – 54).

Untuk menyebarkan pengaruh di dunia, media merupakan salah satu bentuk '*soft power*' yang memiliki kekuatan propaganda dan pengaruh yang sangat luar biasa (Carruthers, 2001:214). Melalui media inilah, Amerika Serikat mencoba untuk melakukan sosialisasi dan transformasi nilai-nilainya kepada masyarakat dunia dalam kerangka kerja globalisasi. Keberhasilan Amerika Serikat dalam mentransformasi nilai-nilainya melalui media ini lah yang pada akhirnya menimbulkan ketidakselarasan budaya ekonomi global.

Media dapat diidentifikasi sebagai bagian dari imperialisme budaya (Mamoto, 2008:2). Imperialisme budaya melalui media berlangsung secara halus dan lebih elegan, yaitu orang-orang di seluruh dunia tidak akan menyadari bahwa apa yang disaksikannya melalui tayangan media itu perlahan tapi pasti dapat mempengaruhi dan menggerusi nilai-nilai budaya asli yang mereka miliki.

Salah satu media yang dipandang efektif sebagai wahana globalisasi budaya Amerika Serikat adalah media elektronik seperti televisi. Televisi merupakan media yang lebih representatif karena tidak hanya menampilkan satu dimensi saja, melainkan perpaduan dari beberapa dimensi. Media televisi memiliki kelebihan karena ditampilkan dalam bentuk audio-visual. Dengan tampilan *audio visual*-nya ini pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak menjadi lebih cepat dan mudah untuk diterima dan dimengerti.

Televisi merupakan media yang sangat populer di kalangan masyarakat (McLuhan, 1964:268). Kelengkapan tampilannya baik dari aspek *audio* maupun *visual* membuat orang-orang lebih menikmati media ini. selain itu, tayangan televisi memberikan

kontribusi yang sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena tidak hanya menayangkan siaran-siaran yang informatif, namun juga penuh dengan nuansa hiburan.

Perkembangan perjalanan televisi terlihat sangat baik. Televisi tidak hanya dijadikan sebagai media yang dapat menjadi sumber informasi, tetapi juga dikembangkan agar menjadi media yang dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu televisi juga difungsikan sebagai media partisipasi masyarakat melalui berbagai tayangannya. Lambat laun, televisi menjadi subjek yang memberikan kesempatan besar untuk memperoleh keuntungan dari segi ekonomi. Keuntungan dari segi ekonomi inilah kiranya yang melatarbelakangi Amerika Serikat menggunakan media televisi sebagai salah satu instrumen dalam mensosialisasikan budaya massa globalnya ke seluruh dunia.

Tayangan televisi dapat menimbulkan benturan sosial dan fisik dalam masyarakat (McLuhan, 1964:281). Hal ini barangkali disebabkan oleh cepatnya transformasi nilai yang dilakukan, sehingga mempengaruhi pemikiran-pemikiran para khalayaknya dengan cepat pula. Dalam konteks globalisasi budaya massa Amerika Serikat, tayangan-tayangan televisi ternyata dapat menimbulkan benturan budaya dalam masyarakat.

Upaya globalisasi budaya yang dilakukan Amerika Serikat melalui medianya seperti televisi dalam perjalanannya ternyata telah menimbulkan persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan itu bermula dari ketidakselarasan antara nilai-nilai budaya yang disebarluaskan Amerika Serikat dengan budaya-budaya lain yang dimiliki oleh negara-bangsa di dunia. Walaupun upaya hegemonisasi budaya itu relatif berhasil, namun menyisakan berbagai benturan terhadap nilai-nilai budaya asli yang dimiliki oleh negara-bangsa setempat.

Secara sederhana, budaya dapat didefinisikan sebagai kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya dapat dilihat secara material maupun nonmaterial. Budaya secara material tampil dalam objek material yang dihasilkan, kemudian digunakan manusia, seperti pakaian, asesoris, peralatan rumah tangga, rancangan arsitektur, dan lain sebagainya. Budaya secara non-material adalah unsur-unsur yang dimasukkan dalam konsep norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, keyakinan, serta bahasa (Liliweri, 2004:107).

Indonesia merupakan salah satu negara yang budayanya dipengaruhi oleh imbas budaya massa Amerika Serikat melalui tayangan televisi. Intensitas tayangan-tayangan televisi itu memberikan pengaruh yang begitu signifikan. Salah satu bagian yang paling dipengaruhi oleh globalisasi budaya massa Amerika Serikat adalah budaya asli yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang dibangun dari elemen-elemen ketimuran. Hal itu kemudian tercermin dalam substansi budaya-budaya baik secara materil maupun nonmateril. budaya Amerika Serikat memiliki substansi-substansi yang sangat berbeda dengan budaya ketimuran yang dimiliki bangsa Indonesia. bahkan terhadang, nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia ini bertolak belakang dengan Amerika Serikat. inilah persoalan awal yang menciptakan benturan dalam globalisasi budaya tersebut. Perbedaan substansi menimbulkan benturan, dan benturan itu sendiri melahirkan ketidakselarasan. Ketidakselarasan akibat benturan budaya itulah yang kini tampak dan tampil dalam budaya Indonesia. Dengan begitu, globalisasi budaya Amerika Serikat telah berhasil mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia melalui tayangan-tayangan televisinya.

Dikarenakan hingga saat ini pengaruh budaya Amerika Serikat belum mempengaruhi seluruh budaya Indonesia, maka istilah pergeseran budaya dianggap lebih tepat. Terdapat beberapa pergeseran budaya yang terjadi di Indonesia akibat globalisasi budaya yang dilakukan Amerika Serikat, seperti berikut ini. Keseluruhan pergeseran budaya itu disebut perubahan budaya ekonomi global, karena perubahan budaya-budaya yang terjadi itu semuanya bersinggungan dengan aspek ekonomi yang ingin dikedepankan Amerika Serikat dalam usahanya mengglobalisasi dunia.

1. Pergeseran cara berpakaian

Pengaruh yang paling mudah untuk dilihat sebagai akibat pergeseran budaya Indonesia dari globalisasi budaya massa Amerika Serikat adalah cara berpakaian. Program-program televisi Amerika Serikat banyak menayangkan tren-trend masa kini yang mencakup segala jenis usia. Mulai dari tayangan yang dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Semua memiliki tren tersendiri dalam cara berpakaian.

Program-program televisi Amerika Serikat itu juga berhasil membangun *image* bahwasanya pemirsa belum dapat dikatakan modern bila belum menuruti cara berpakaian mereka. Tuntutan dan keinginan modernitas itulah yang akhirnya membuat bangsa Indonesia meniru *desaign* pakaian Amerika Serikat. Masyarakat Indonesia tidak hanya meniru model-modelnya, bahkan juga merek-merek yang ditayangkan di televisi itu.

Bagi Amerika Serikat, keberhasilannya mempengaruhi cara berpakaian itu tidak hanya menguntungkan dalam aspek budaya saja. Terlebih lagi, keuntungan terbesar yang mereka peroleh adalah dari aspek ekonomi. merek-merek dagang mereka yang telah tersohor ke seluruh pelosok dunia yang juga telah memiliki hak paten itu memberikan keuntungan finansial yang sangat luar biasa. bagi negara-

negara yang ingin menggunakan merek dagang itu harus membayar lisensi dengan nilai yang lumayan besar jumlahnya.

Sebagai contoh adalah tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh beberapa stasiun televisi Amerika Serikat yang tersohor di seluruh pelosok dunia seperti *MTV* dan *VTV*. Melalui *MTV* misalnya, orang-orang di Indonesia terbawa dalam imaji artis yang didominasi oleh Amerika Serikat (Sumrahadi, 2006:57). Kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Amerika Serikat dalam usahanya melakukan homogenisasi budaya di dunia yang berkiblat pada budayanya. Selain itu, Amerika Serikat juga terlaksana secara otomatis melalui tayangan-tayangan televisi Amerika Serikat itu.

Pergeseran cara berpakaian masyarakat Indonesia memang terlihat dengan jelas. Lihat saja cara berpakaian orang-orang masa kini yang terpengaruh oleh budaya Amerika Serikat, sangat berbeda dengan penampilan beberapa puluh tahun yang lalu yang masih melekat dengan identitas budaya Indonesia. Di masa kini di Indonesia sudah jarang ditemukan wanita-wanita yang berpakaian kebaya yang menjadi ciri khas budaya wanita Indonesia. kebaya hanya dipakai wanita Indonesia dalam momen-momen tertentu saja, seperti perkawinan. akan tetapi, dalam keseharian, wanita Indonesia lebih bangga menggunakan desain-desain pakaian ala Amerika Serikat.

2. Pergeseran ciri dan bentuk bangunan

Arsitektur ciri dan bentuk hunian masyarakat Indonesia kini telah mengalami berbagai pergeseran. Tayangan-tayangan televisi Amerika Serikat juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap hal itu. Saat ini bangunan-bangunan di Indonesia baik hunian maupun perkantoran, banyak yang berusaha untuk meniru desain-desain bangunan seperti yang ditayangkan dalam program-program siaran seperti Amerika Serikat.

3. Pergeseran konsumsi hiburan

Sebagai bangsa yang mejemuk, Indonesia memiliki berbagai ragam jenis kesenian daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, ragam jenis kesenian yang berfungsi sebagai sarana hiburan itu juga telah mengalami berbagai macam modifikasi dalam tampilan-tampilannya. Inilah yang dikenal dengan kesenian dan hiburan kontemporer budaya Indonesia. Akan tetapi, saat ini fakta menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang menggemari kesenian dan hiburan yang asli Indonesia itu. Masyarakat Indonesia cenderung lebih tertarik untuk memiliki dan menikmati hiburan-hiburan yang ditayangkan oleh stasiun televisi Amerika Serikat seperti *MTV*, *VTV* dan sebagainya.

Demikian juga dengan tayangan informasi. Masyarakat Indonesia cenderung lebih percaya dengan informasi-informasi yang ditayangkan oleh *CNN* ketimbang stasiun-stasiun televisi lokal. Mereka menilai bahwa *CNN* lebih objektif karena berada di luar sistem. padahal, kalau masyarakat tidak terlalu awam dalam menilai itu semua, tayangan-tayangan berita yang disiarkan oleh stasiun televisi Amerika Serikat juga tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek kepentingan Amerika Serikat.

Sama juga halnya dengan produk-produk hiburan lainnya. Masyarakat Indonesia lebih suka menonton film-film yang diproduksi oleh *Hollywood* ketimbang produser-produser lokal. Mereka lebih kenal dengan aktor-aktor film dari Amerika Serikat dari pada aktor-aktor film dalam negeri.

4. Pergeseran tata cara bercocok tanam

Indonesia merupakan negara agraris yang terbesar di Asia Tenggara. Sebelumnya Indonesia memiliki cara bercocok tanam tersendiri yang merupakan ciri khas masyarakat pertanian Indonesia. Penggunaan pestisida sangat minimal, dan pupuk-pun berasal dari pupuk organis seperti pupuk kandang dan sampah-sampah organik.

Akan tetapi keadaan itu sudah berbeda. Petani Indonesia sudah mulai meninggalkan budaya bercocok tanamnya. Petani Indonesia sudah menggunakan banyak pestisida dan pupuk-pupuk buatan untuk memperbesar keuntungan. Selain itu petani Indonesia juga sudah menggunakan bibit-bibit transgenik yang berasal dari hasil inovasi dan kemajuan teknologi Amerika Serikat. Dan hal itu mereka kenal melalui tayangan-tayangan televisi.

Kendatipun memberikan keuntungan dari segi finansial, tetapi terdapat juga sisi kerugiannya. Pestisida, pupuk buatan dan rekayasa genetika dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, penggunaan produk-produk pertanian yang merupakan hak paten Amerika Serikat hanya akan menyuramkan pertanian Indonesia, namun di sisi lain memberikan keuntungan ekonomis bagi Amerika Serikat.

5. Perubahan dalam bentuk investasi

Dahulu, budaya berinvestasi masyarakat Indonesia dapat dilihat dengan jelas dan kasat mata. Kebanyakan orang Indonesia berinvestasi dalam bentuk yang terlihat seperti tanah, emas, bangunan sewaan, dan lain sebagainya. Seiring dengan globalisasi budaya Amerika Serikat, melalui tayangan televisi masyarakat Indonesia kini mengenal cara berinvestasi baru. budaya investasi yang baru itu adalah dalam bentuk fiktif melalui bursa saham dan pasar modal. Karena

keinginan untuk dikatakan modern, sudah banyak masyarakat Indonesia yang meniggalkan budayanya yang klasik dalam berinvestasi itu. Mereka mencoba untuk mengikuti budaya investasi Amerika Serikat melalui bursa saham dan pasar modal.

Kesimpulan

Globalisasi telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap negara-negara di dunia. Melalui globalisasi, Amerika Serikat sebagai promotor dan kreatornya telah berhasil menstransformasikan nilai-nilainya terhadap masyarakat global. Pengaruh dan dominasi Amerika Serikat membuatnya mendapat kesulitan yang berarti dalam melakukan globalisasi.

Di tengah perjalanannya, globalisasi ternyata menimbulkan berbagai masalah. Masalah utama yang dihadapi adalah benturan dan ketidakselarasan dalam budaya ekonomi global. Benturan itu terjadi akibat perbedaan-perbedaan budaya Amerika Serikat dengan budaya-budaya negara-bangsa lainnya di dunia.

Melalui pengaruh media elektronik (televisi) Amerika Serikat, orang-orang di dunia dihadapkan pada tuntutan untuk menganut identitas budaya globalnya. Bersamaan dengan usaha hegemoninya di bidang ekonomi dan politik, Amerika Serikat juga menghegemonikan nilai-nilai budayanya secara global. Hegemoni budaya Amerika Serikat berhasil mempengaruhi gaya hidup sebagai penjabaran dari perubahan budaya ekonomi global. Untuk usaha menyebarluaskan pengaruh budayanya itu, Amerika Serikat menggunakan media sebagai instrumen utama yang berfungsi sebagai saluran dan pencitraan.

Televisi sebagai salah satu dari media elektronik telah memberikan sumbangsih terhadap pergeseran budaya yang terjadi di Indonesia. Stasiun-stasiun televisi Amerika Serikat yang menunjukkan ciri modernitas lebih menjadi pilihan utama konsumsi masyarakat Indonesia ketimbang stasiun-stasiun televisi dalam negeri. tayangan-tayangan televisi merupakan bentuk '*soft power*' dari upaya Amerika Serikat dalam menyebarluaskan pengaruh budayanya hingga menjadi *icon* budaya dunia. Oleh karena itu, jangkauan media elektronik Amerika Serikat dapat dikatakan telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, Arjun, "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy", http://www.intcul.tohoku.ac.jp/mediasociety/reading/2003_04/appadurai.html
- Carruthers, Susan, "Media and Communications Technology", dalam *Issues in World Politics*, ed. Brian White, New York: Palgrave, 2001.
- Inkriwang, Alfred, "The America Software Hegemony" dalam *Jurnal Dari Media ke Terorisme sampai Wanita Analisis Kajian Amerika Serikat*, Jakarta: Penerbit Akademia, 2008.
- Inkriwang, Riani, Winter, "Indonesia in the News: A Qualitative Content Analysis of News on Indonesia in an American Newspaper", dalam *Jurnal Dari Media ke Terorisme sampai Wanita Analisis Kajian Amerika Serikat*, Jakarta: Penerbit Akademia, 2008.
- Liliwari, Alo, *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- McLuhan Marshall, *Understanding Media: The Extensions of Man*, New York: The New American Library, Inc., 1964.
- Mamoto, Retno, Sukardan, "Indonesia Dalam Media Cetak Amerika Serikat: Kasus Terorisme", dalam *Jurnal Dari Media ke Terorisme sampai Wanita Analisis Kajian Amerika Serikat*, Jakarta: Penerbit Akademia, 2008.
- Rahim, Samsudin, A., *Generasi Belia: Satu Cetus Pandangan*, Putra Jaya, Malaysia: Institut Penyelidikan Pembangunan Belia, 2007.
- , *Media dan Generasi Muda*, Putra Jaya, Malaysia: Institut Penyelidikan Pembangunan Belia, 2008.
- Scream, "What Do the Media Do to Us? Media and Society", dalam *Getting Ready: The Media and Media Studies*.
- Singh, Kavaljit, *Memahami Globalisasi Keuangan*, Jakarta: Yakoma-PGI, 1998.
- Sumrahadi, Abdullah, "Ke(kuasa)an Amerika Serikat dan Penyeragaman Identitas Budaya Massa Global" dalam *Jurnal Studi Amerika Serikat*, Jakarta: Pusat Kajian Wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia, 2006.

ⁱ Dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

KONSEP PRIVATISASI DALAM GLOBALISASI EKONOMI NEOLIBERAL

Dewa Ayu Putu Eva Wishanti
e.wishanti@ub.ac.id

Abstract

This article seeks to understand the practical neoliberal view regarding the concept of privatization, which emerged in the Washington Consensus as its framework. Privatization of state-owned corporations had become a significant development in the 20th century even in each continent. This privatization strategy was applied voluntarily by some governments, when some were drastically adopting this measure to save the nation from hyperinflation and other forms of economic crisis. This article finds that privatization is the main implementation for the state to merge itself to the global economy, through its collaboration with several transnational companies and international financial organizations, namely the IMF and World Bank. However, the neoliberal economic globalization perspectives do concern on the state regulations as a key to economic stabilization in the course of the privatization practices.

Keywords: *privatization, neoliberal*

Privatisasi, atau penjualan aset negara yang berkaitan dengan kepentingan publik, sangat populer dilakukan guna efisiensi kinerja anggaran dalam negeri suatu negara. Ekonomi liberal-kapitalis di abad ke-20 telah membuat lebih dari sekitar 80 negara telah mencanangkan privatisasi yang melibatkan sekitar 6.800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di seluruh dunia (World Bank, 1992). Negara yang lebih maju dengan payung hukum yang kuat akan lebih resisten terhadap resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Namun negara-negara kurang berkembang yang terpaksa masuk dalam bingkai ekonomi liberal, sangat berat dalam memilih pendirian secara ekonomi, apakah akan tetap *state-centric* ataukah *market-centric*.

Bank Dunia mencatat bahwa hingga tahun 2001, kemajuan privatisasi makin meningkat, khususnya wilayah Amerika Latin yang mencetak kebijakan privatisasi yang jauh lebih besar dibandingkan kawasan lain di dunia. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan privatisasi relatif diterima sebagai solusi penyehatan ekonomi nasional oleh pemerintah di Amerika Latin.

TABLE 1. Proceeds from Privatization in Developing Countries, 1990–99

Billions of dollars

Year	East Asia and the Pacific	Latin America	Eastern Europe and Central Asia	Middle East and North Africa	South Asia	Sub-Saharan Africa
1990	0.376	10.915	1.262	0.002	0.029	0.074
1991	0.834	18.723	2.551	0.017	0.996	1.121
1992	5.161	15.560	3.626	0.069	1.557	0.207
1993	7.155	10.488	3.988	0.417	0.974	0.641
1994	5.508	8.199	3.957	0.782	2.666	0.605
1995	5.410	4.616	9.742	0.746	0.916	0.473
1996	2.680	14.142	5.466	1.478	0.889	0.745
1997	10.385	33.897	16.537	1.612	1.794	2.348
1998	1.091	37.685	8.002	1.000	0.174	1.356
1999	5.500	23.614	10.335	2.074	1.859	0.694
1990–99	44.100	177.839	65.466	8.197	11.854	8.264

Source: World Bank (2001).

Di Amerika Utara dan Eropa, pemerintahan lokal adalah manajer pragmatis yang harus mengatur biaya, pasar, dan kepentingan politik secara simultan atau bersamaan, menurut Bel dan Warner (2008). Bel dan Warner juga menyatakan bahwa efisiensi dan pengurangan biaya, yang dijadikan tujuan utama *local privatization*, tidak akan mudah dicapai jika banyak tugas dikerjakan secara bersamaan, sementara sumber daya belum siap untuk itu. Tujuan efisiensi tidak pelak lagi dihindarkan. Namun, mereka menyebutkan harusnya pembahasan mengenai privatisasi tidak lagi hanya berkisar pada dikotomi *public-private*, melainkan pada sinergi keduanya.

Seperti kebanyakan kebijakan yang diturunkan dari *Washington Consensus*, privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi dimotori oleh Bank Dunia yang memberikan seperangkat bantuan melalui resep restrukturisasi ekonomi di dalam negeri.

1. Konsep Neoliberalisme dan Privatisasi dalam Rezim *Washington-Consensus*

Pengaruh awal dari neoliberalisme muncul dari literatur mengenai pluralisme di tahun 1960-an. Pluralisme ini menantang realisme tradisional yang menyebut negara adalah aktor rasional dan *unitary actor*. Bantahan yang disampaikan adalah mengenai munculnya hubungan transnasional yang semakin intens antar negara menurut Keohane dan Nye (1971). Namun konsep yang masih *state-centric* pun menuai kritik, belum lagi kritik terhadap sulitnya membedakan kepentingan domestik dengan kepentingan regime. Selain itu pada abad ke-20, makin berkembang masalah transnasional yang tentunya hanya dapat diselesaikan dengan kerja sama baik dalam sektor *low politics* maupun *high politics* seperti ekonomi global, keamanan, dan

pengungsi. Kerja sama seperti itulah yang kemudian menyebabkan negara-negara berkerja sama dalam suatu lembaga atau setidaknya menyepakati sistem tertentu dalam interaksi antar negara. Demi menjaga tegaknya peraturan dalam kerja sama tersebut, biasanya muncul suatu negara hegemon untuk menjaga stabilitas.

Sementara Kotz menyebutkan dalam tulisannya *Globalization and Neoliberalism* bahwa neoliberalisme merupakan teori sekaligus dasar kebijakan yang bersumber pada liberalisme yang disempurnakan. Tulisannya banyak berkisar seputar ekonomi. Ia juga berpendapat bahwa kemunculan kembali liberal dalam bentuk yang baru tidak dapat serta merta membawa kebaikan, malah menimbulkan efek buruk dalam jangka panjang.

Kotz mengemukakan beberapa karakter yang problematik dalam neoliberalisme (Kotz, 2000), di antaranya:

- a. Neoliberalisme tidak mampu memenuhi tujuan dasarnya yaitu akumulasi kapital. Hal ini utamanya disebabkan oleh sulitnya mengambil keuntungan ekonomi di tengah ketidakpastian, maka untuk menjaganya dipotonglah upah buruh, yang lalu menyebabkan turunnya angka konsumsi.
- b. Model neoliberal membuat stabilitas ekonomi menurun karena menurunkan efektifitas bantuan kesejahteraan sosial.
- c. Adanya kecenderungan timbulnya pemicu konflik antarkelas sebagai akibat dari disparitas kekuasaan, terutama pada kapital.

Selain itu juga disebutkan bahwa aktor-aktor globalisasi ekonomi saat ini bukan hanya menjadi pendukung pemerintah atau *state government*, namun telah berkembang menjadi lawannya. Ia mencontohkan hadirnya *transnational corporation* atau *TNC* sebagai aktor baru yang sangat kuat bahkan asetnya melebihi sebuah negara. Jika mengesampingkan hal itu, sebuah *nation-state* yang kuat ternyata masih juga dibutuhkan oleh badan atau lembaga transnasional sebagai *home base*-nya, maka kedudukan mereka terhadap kompetitor dari negara lain menjadi lebih tegak.

TNC sebagai aktor lintas batas negara juga berlomba-lomba menangkalkan pengaruh lawannya secara global, terutama dengan memilih *regulating states* atau negara-negara yang memiliki peraturan yang sesuai dengan norma masyarakat global, seperti pajak yang rendah dan jalur distribusi yang luas. Selain itu, faktor terpenting ialah ketika terjadi krisis ekonomi, negara mampu memproduksi kebijakan yang mampu menyelamatkan aset mereka sekaligus mengamankan pasar dalam negerinya. Dalam konteks yang sama, *TNC* menghindari *monopoli state* dengan tetap menyumbang solusi bagi krisis tersebut. Dalam pandangan tentang privatisasi, *TNCs* biasanya berdiri sebagai aktor utama penyelenggara mekanisme pasar yang juga mengintervensi kedaulatan negara secara langsung.

Privatisasi di berbagai negara merupakan salah satu dari program restrukturisasi ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah, sesuai rekomendasi *IMF* dan Bank Dunia. Program yang lebih dikenal dengan *structural adjustment program* (SAP) adalah salah satu konsesi yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut sebagai imbal dari hutang luar negeri yang diberikannya. Artinya, pemerintah penerima bantuan asing harus melakukan penghematan pengeluaran negara, termasuk melakukan efisiensi pemerintahan dengan mengatur ulang pendanaan dan operasional sektor-sektor strategis di dalam negeri. Lebih ringkasnya, negara harus melakukan reformasi ekonomi sebagai upaya penyehatan kembali ekonomi dalam negerinya.

Ekonom terkemuka Williamson pernah menyebutkan bahwa reformasi ekonomi ini diwujudkan dalam beberapa bentuk (Williamson, 1990) yakni (a) pengetatan fiskal, (b) mengurangi jatah anggaran pemerintah untuk sektor publik misalnya kesehatan dan pendidikan, lalu dialihkan ke sektor yang berorientasi keuntungan, (c) reformasi pajak, (d) liberalisasi tingkat suku bunga, (e) implementasi kurs mata uang yang kompetitif, (f) liberalisasi perdagangan, (g) liberalisasi investasi asing, (h) privatisasi, (i) deregulasi, (j) jaminan kepemilikan publik. Kesemua resep tersebut seringkali dinamakan *Washington Consensus*, sebuah kesepakatan yang dibuat oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang kebetulan semuanya berada di Washington. Ia melontarkan resep-resep ekonomi tersebut sebelum kemudian mengoreksinya selama satu dekade setelah menerima banyak kritik.

Neoliberalisme sendiri memandang “rasionalisasi” sebagai sentral dari *domain*-nya. Demikian pula dengan politik royalti dan hak paten yang terumuskan dalam *property rights*. Liberalisme muncul dengan wajah baru, yakni neoliberalisme, yang kembali memasukkan eksistensi negara ke dalam proses intervensi politik.

Liberalisme dipandang oleh Jessop (2002) sebagai suatu fenomena yang bermuatan kompleks, yang melingkupi wacana ekonomi, politik, dan ideologis. Liberalisme juga adalah suatu konsep yang berusaha dipertentangkan karena mencoba merestrukturisasi hubungan antara negara dan pasar, terutama dalam ruang lingkup jangkauan, aplikasi, serta batasan-batasan di dalamnya. Tak lupa dari segi kekhasan penerapannya dalam masyarakat modern, dari aspek ekonomi, politik, dan organisasi sosial. Liberalisme tidak memerhatikan kondisi lokal yang bervariasi, dan karenanya mengabaikan penyesuaian kondisi lokal terhadap hubungan negara dan pasar (Jessop, 2002). Konsep ini dengan mudah dapat dihubungkan dengan ekonomi pasar, di mana ciri khasnya ialah perluasan pasar bebas dan segala kebijakan turunannya. Namun konsep yang bebas tersebut ternyata tidak dapat berjalan tanpa terbentuknya suatu institusi yang mengatur kebebasan transaksi ekonomi tersebut.

Jessop juga menjelaskan bahwa sebagai sebuah proyek ekonomi baru, neoliberalisme muncul untuk melengkapi konsep liberalisme yang mengalami kesenjangan dengan perubahan politik kontemporer yang lebih dinamis. Neoliberalisme mengatur tidak hanya transaksi ekonomi domestik namun juga *transborder*, privatisasi perusahaan milik negara dan jasa layanan publik; perlakuan terhadap pengeluaran di sektor kesejahteraan masyarakat sebagai *cost* atau biaya produksi internasional, daripada permintaan domestik.

Prinsip sentral dari neoliberalisme menekankan kepada pembentukan institusi yang mampu menjaga dan mengarahkan agar kepentingan pasar dapat tercapai. Institusi tersebut melahirkan kesepakatan yang lazim dikenal sebagai *Washington Consensus*, yang mengutamakan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi dalam setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan pasar. Lebih dari hanya sekedar mengatur pergerakan kapital dan juga kepentingan ekonomi pasar, neoliberalisme lebih menjadi suatu wadah untuk mengorganisasikan masyarakat sipil untuk lebih siap menerima ekspansi ekonomi pasar. Selain itu, untuk lebih jelasnya, Jessop memilahnya dalam klasifikasi bentuk-bentuk praktik politik neoliberalisme:

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Neoliberalisme

Penyesuaian Kebijakan	Modulasi kebijakan untuk meningkatkan kemampuan rezim akumulasi dan bentuk regulasi.
Pergeseran Rezim	Pergeseran cara pandang terhadap akumulasi dan regulasi, memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi dan politik yang baru.
Perubahan Sistem Secara Radikal	Neoliberalisme sebagai strategi untuk beralih dari sosialisme negara ke pembentukan kapitalisme sosial.

Sumber: Jessop, 2002

Tabel 2. Strategi Dukungan dan Penyesuaian bagi Neoliberalisme Global

Neoliberalisme	<ul style="list-style-type: none"> a. Liberalisasi (dukungan terhadap persaingan bebas) b. Deregulasi (mengurangi peran hukum dan negara) c. Privatisasi (penjualan sektor-sektor publik) d. Susbtitusi pasar terhadap sektor publik yang masih ada e. Mengurangi pajak langsung (meningkatkan pilihan konsumen)
Neostatisme	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan kontrol negara menjadi persaingan yang terkendali. b. Mengarahkan strategi nasional, mengabaikan kewajiban pemerintah terhadap rakyat. c. Audit terhadap kinerja perusahaan swasta dan publik d. Kemitraan publik-swasta di bawah arahan negara e. Proteksi neomerkantilis terhadap sektor inti ekonomi negara f. Peran sumber daya kolektif yang semakin meluas.
Neo-korporatisme	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyeimbangkan ulang antara persaingan dan kerja sama b. Desentralisasi kewenangan c. Jangkauan kemitraan yang lebih luas antara perusahaan publik, swasta, dan pemangku kepentingan yang lain d. Memperluas peran kemitraan publik-swasta e. Melindungi sektor ekonomi inti dalam keterbukaan ekonomi f. Penerapan pajak yang tinggi untuk mendanai investasi social
Neo-komunitarianisme	<ul style="list-style-type: none"> a. Deliberalisasi (membatasi persaingan bebas) b. Pemberdayaan (memberdayakan peran sektor ketiga) c. Sosialisasi (memperluas ekonomi sosial) d. Penekanan pada nilai guna sosial dan kohesi sosial e. Mengarahkan ulang pajak, terutama gaji masyarakat dan menghitung ulang biaya hidup.

Sumber: Jessop, 2002

Tabel tersebut menunjukkan skenario alternatif bahwa wajah neoliberalisme berkembang dalam tatanan institusi. Hubungan antara negara dan pasar semakin tidak kurang bersinggungan, dan semakin banyak melepaskan berbagai tanggung jawab sosial ke ranah pasar. *Leadership* pasar juga diatur melalui regulasi yang mementingkan daya saing, bukannya distribusi kesejahteraan, sehingga banyak meminggirkan kepentingan nasional dan komunitas lokal.

Terkait dengan disepakatinya *Washington Consensus* yang dicetuskan oleh John Williamson pada 1989 yang telah disebut sebelumnya, bahwa negara sebaiknya mengikuti ekonomi pasar untuk meningkatkan kinerja anggaran agar negara tidak terlalu menghabiskan sumber daya ekonominya bagi pengelolaan kepentingan publik, dan lebih berfokus ke pertumbuhan ekonomi serta peningkatan ekspor.

Misalnya pada akhir dekade 1980-an, AS menyepakati pemberian bantuan untuk menangani krisis di Amerika Latin dengan mekanisme yang melibatkan *World Bank*, IMF, dan *OECD*. Syaratnya adalah negara Amerika Latin harus mematuhi reformasi ekonomi yang diusulkan antara lain: pengetatan fiskal, penyusunan pengeluaran kepentingan publik, reformasi pajak, pembebasan suku bunga, kurs mata uang yang kompetitif, liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, privatisasi, deregulasi, dan perlindungan terhadap hak intelektual.

Gore menyebutkan bahwa konsensus tersebut menyebabkan kebingungan dalam analisis arah pembangunan nasional. Ekse yang ditimbulkan dari konsensus itu adalah pembangunan yang parsial dan kebijakan yang cenderung berpihak pada tren pembangunan global, di mana suatu negara belum tentu diuntungkan dalam mekanisme kebijakan pembangunan global tersebut. (Gore, 2000)

Hal tersebut mendapat tantangan dari berbagai krisis yang terjadi di Rusia, Meksiko, dan juga di Asia Timur, yang menyebabkan ekonomi global melemah karena tidak ada regulasi yang mengatur hubungan antaraktor ekonomi dan politik, baik negara maupun non-negara, dan oleh karena itu para pemikir berupaya untuk memodifikasi resep reformasi ekonomi yang ditawarkan oleh *Washington Consensus* tersebut. Perdebatan muncul terhadap keabsahan konsep pembangunan yang diturunkan oleh konsensus tersebut, utamanya karena kebijakan yang ditawarkan tidak fleksibel, dan perlu adanya *Washington Consensus Plus* sebagai revisi. Banyak pihak setuju untuk menyebut *Washington Consensus* adalah sebuah proyek gagal, dan akan lebih mengutamakan pemberdayaan pemerintah. Pemerintah tidak dipandang lagi sebagai masalah, dan pasar tidak akan serta merta dilihat lagi sebagai satu-satunya solusi.

Sebagai solusi yang melengkapi konsep *Washington Consensus plus*, Gore mengonsepan pola baru yang menjadikan negara lebih fleksibel dalam membangun kebijakan dan praktik pembangunan yang lebih *state-centric*. Model berikut ini

menegaskan pentingnya negara untuk lebih perhatian dalam merancang ulang kepentingan pembangunan nasional:

Tabel 3. Konfigurasi Analisis Kebijakan Pembangunan tahun 1990 ke Atas

		Kerangka Kerja Normatif	
		Nasional	Global
Kerangka Kerja Eksplanatoris	Nasional		1. <i>Washington Consensus</i> 2. Pembangunan Manusia Berkelanjutan
	Global	Konsensus Negara Selatan : 1. Model Asia Timur 2. Neo-strukturalisme Amerika Latin	Pergeseran Cara Pandang

Sumber: Gore dan *United Nations Conference on Trade and Development/ UNCTAD (2000)*

Negara-negara selatan berupaya melawan krisis dengan memperbaiki struktur ekonomi dalam negeri masing-masing untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan asing. Asia Timur berupaya memfokuskan pembangunannya ke arah industri, sementara Amerika Latin berkuat dengan perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri, agar mendapatkan kondisi politik yang baik untuk iklim investasi. Hal lain yang cukup menonjol dalam strategi pembangunan pascakrisis Asia 1997/1998 yang dikemukakan Gore adalah "*new regionalism*", yaitu tren regionalisme di Asia Timur dan Amerika Latin semakin menguat dengan berbagai bentuk kerja sama regional di bidang sosio-ekonomi.

2. Privatisasi Sebagai bentuk Konsesi Restrukturisasi Ekonomi

Privatisasi dapat bermakna ganda, terutama jika merujuk dari teknis pelaksanaannya. Pada umumnya, mekanismenya adalah mengambil alih kepemilikan atas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Jangkauannya ialah mengontrak atau menjual fungsi-fungsi dan perusahaan negara pada pihak swasta. Spektrum kewenangan yang lebih luas melingkupi operasional pemerintahan, manajemen, dan pengaturan kepemilikan.

Machado menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk pengalihan kepemilikan yang dapat disebut privatisasi, yakni (a) *outsourcing*, artinya lembaga pemerintahan melimpahkan sebagian kewajibannya kepada pihak ketiga; (b) *Design, Build, Operate* (DBO) berupa negosiasi kontrak terhadap pihak swasta untuk pekerjaan desain dan konstruksi, seringkali diiringi dengan peremajaan dan peningkatan fasilitas; (c) Kemitraan publik-privat, yang merujuk pada persetujuan antara pemerintah lokal dengan organisasi swasta, di mana kedua pihak membagi tugas dan tanggung jawab secara relatif seimbang; (d) Penjualan aset, yang berarti penjualan aset pemerintah ke perusahaan swasta, seperti penjualan aset kelistrikan dan pengelolaan air dan limbah. (Machado, 2008)

Beberapa faktor pendukung yang mendesak untuk pelaksanaan privatisasi, salah satu yang mengemuka ialah penekanan terhadap “kepemilikan”, yang merupakan hal penting untuk meningkatkan performa pelayanan publik, bahwa seharusnya kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan ke tangan swasta. Beberapa argumen Nellis ialah adanya kepemilikan di tangan swasta akan berpengaruh signifikan terhadap *profitability* dan produktivitas perusahaan. Lebih detail, dari kaca mata neoklasik Neils melihat bahwa pentingnya kekuatan pasar masih penting untuk mencapai efisiensi. Berdasarkan sisi agen dan kepemimpinan, terdapat beberapa alasan yang mendasarinya, yakni (i) kepemilikan swasta akan menciptakan pasar manajer, yaitu para manajer akan berkompetisi menjadi yang terbaik, (ii) pasar kapital akan mendorong perusahaan swasta untuk lebih disiplin daripada perusahaan publik, (iii) perusahaan swasta sangat rentan terhadap kebangkrutan, sehingga kinerjanya akan lebih berhati-hati, (iv) politisi lokal memiliki lebih sedikit peluang untuk campur tangan dalam perusahaan swasta, (v) perusahaan swasta diawasi oleh kepentingan pimpinan dan para pemegang saham dan bukan para birokrat, sehingga dipandang lebih efisien secara kapital dan pengelolaan. (Nellis, 1994)

3. Strategi Pembangunan Negara Dunia Ketiga, Politik Privatisasi dan *Post-Washington Consensus*

Negara sedang berkembang juga berupaya menerapkan kalkulasi terbaiknya bagi pemenuhan kepentingan nasional dan juga meningkatkan integrasi terhadap ekonomi global. Rapley menjabarkan konsep pembangunan di negara dunia ketiga, di mana negara-negara yang terklasifikasi di dalamnya adalah negara berpendapatan sedang dan sedang mengalami transformasi ekonomi, termasuk juga negara komunis. Ia menekankan bahwa di negara dunia ketiga, terdapat beberapa pandangan untuk menganalisis kebijakan dan praktik pembangunannya. (Rapley, 2007)

Dari spektrum ideologis, Rapley mengemukakan bahwa ekonomi neoklasik

menjadi formula yang patut dipertimbangkan oleh negara dunia ketiga, karena lebih mengutamakan pembangunan mikroekonomi dibandingkan dengan makroekonomi, yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan perkapita yang berbasis konsumsi. Pendekatan mikroekonomi dianggapnya akan mampu menjadikan pembangunan manusia sebagai fokus, dan sekaligus mengembalikan peran pemerintah untuk meregulasi segala kebijakan ekonomi dan politik yang berhubungan.

Dari segi praktik, pembangunan bermodel *state-led development* menjadi kecenderungan pilihan. Namun kebanyakan bukan menolak kapitalisme, namun berusaha untuk membuat kebijakannya menjadi lebih manusiawi. Rapley melihat bahwa idealnya negara-negara berkembang memilih untuk menjadi pragmatis dengan tidak melawan rezim yang sedang berlangsung, namun juga memfasilitasi desentralisasi, emansipasi, dan partisipasi berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Pragmatisme tersebut dilihat oleh aktor-aktor non negara sebagai celah kekurangan dalam strategi pembangunan, sehingga masih dapat dimasuki oleh pemain non negara tersebut untuk mengakuisisi *power* yang lebih banyak dalam pembuatan kebijakan pembangunan nasional.

Pemetaan strategis terhadap aktor-aktor dan agenda kepentingan yang dibawanya dapat dijelaskan secara sederhana di bawah ini:

Tabel 4: Kelompok Kepentingan, Ancaman, dan Keuntungan dalam Proses Privatisasi

KELOMPOK PEMANGKU KEPENTINGAN	ANCAMAN POTENSIAL	KEUNTUNGAN POTENSIAL
Pemerintah dan semua birokrat yang juga terlibat, serta badan usaha milik negara (BUMN), dalam hal ini perusahaan negara pengelola sumber daya.	Hilangnya kewenangan politik dan juga pendapatan.	Mengurangi beban fiskal sekaligus memberi sinyal positif bagi donor pembangunan.
Manajer dan karyawan yang berada di bawah kekuasaan negara (<i>para-state</i>)	Hilangnya pekerjaan serta pemasukan pribadi.	Tidak disebutkan.
Kelompok berpengaruh di dalam negeri, seperti partai politik,	Internasionalisasi atau " <i>foreignization</i> " akan	Tidak disebutkan.

pemimpin religius, serikat pekerja, parlemen, kaum akademik, dll.	meminggirkan eksistensi kelompok tersebut, sementara pendukung kelompok privatisasi juga segera akan terbentuk.	
Donor dan agen multilateral (<i>multilateral agencies</i>)	Tidak disebutkan.	Pihak asing diuntungkan dan tidak melihat adanya kerugian sama sekali. Reformasi ekonomi di suatu negara ke arah lebih liberal sangat menguntungkan negara donor dari segi efisiensi.

Sumber: Diadaptasi dari Kayizzi-Mugerwa (2002) yang disesuaikan oleh Jerome (2008)

Sementara itu, dalam penelitian mengenai kebijakan privatisasi, sangat penting untuk mendalami metodologi yang dipakai untuk apa yang disebut oleh Jerome sebagai *second generation policy adjustment*, atau penyesuaian kebijakan “generasi kedua”. Istilah generasi kedua tersebut muncul karena terdapat banyak penelitian dan literatur sebelumnya dalam “generasi pertama” yang hanya memfokuskan masalah privatisasi tersebut dalam ranah stabilitas ekonomi semata. Jerome mengungkapkan bahwa penyesuaian kebijakan kontemporer memiliki lebih luas dari sekadar permasalahan ekonomi, melainkan juga menyangkut masalah politik dan kewenangan yang dilihat dari hubungan *market-state*. (Jerome, 2008)

Sebagai pedoman dalam banyak penelitian secara umum, referensi terhadap penelitian terdahulu memang banyak dibutuhkan, dan seringkali perbandingan terhadapnya dijadikan sebuah studi komparasi. Komparasi tersebut kemudian menjadikan sebuah penelitian tergalil dan menemukan kelemahan serta kebaikan sebuah kebijakan. *Output* yang dihasilkan dari perbandingan tersebut lebih jelas dan konkrit, yakni memberikan evaluasi secara *general* dan juga rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan di masa depan.

3. Posisi Negara dalam Praktik Privatisasi dari Perspektif Globalisasi Ekonomi

Bantuan terhadap privatisasi sangat krusial, terutama privatisasi sumber daya yang akan berdampak bukan hanya pada manusia, melainkan juga lingkungan. Bantuan ini diinisiasi dengan upaya negara mengajukan proposal proyek untuk penilaian kapasitas ekonomi, sosial, finansial, dan lingkungan. Negara mendeklarasikan maksud ini dalam dokumen yang dinamakan *Letter of Development Policy (LDP)*. *LDP* dibutuhkan untuk perkiraan biaya yang akan dibelanjakan, serta pengaturan pembayaran dari Bank Dunia.

Namun, kebijakan pemberian bantuan Bank Dunia kepada negara anggota hanya akan dilaksanakan setelah negara tersebut setuju dengan syarat-syarat hukum Bank Dunia yang dianggap sesuai terhadap kondisi pembangunan sosial dan ekonomi negara pemohon bantuan. Persyaratan tersebut penting untuk menjaga komitmen negara untuk menyetatkan ekonomi nasionalnya dan turut berpartisipasi aktif dalam reformasi ekonomi, utamanya yang tertulis dalam *LDP*. (*World Bank Conditionality*, 2005)

TNCs yang akan menjadi penyelenggara pelayanan yang telah diprivatisasi tersebut akan mengikuti proses tender. Kasus yang terjadi di Argentina pada era 1990-an sangat mencerminkan pergulatan kepentingan negara dengan pasar, terlebih pula antara Eropa Barat dengan Amerika Latin secara lebih luas.

Pihak yang memenangkan tender privatisasi air di Buenos Aires, ibu kota Argentina, terdiri dari beberapa investor lokal yang juga bekerja sama dengan *TNCs*. *TNCs* tersebut berasal dari Perancis, Inggris, dan Spanyol (Shaikh, 1996). Strategi pemerintah untuk mengajak pihak-pihak tersebut bekerja sama ialah dengan mengusulkan kenaikan tarif pelayanan air beberapa kali. Pemangku ekonomi makro Argentina dalam proses privatisasi ini terdiri dari (i) pekerja *urban*, terutama pegawai negeri, yang berkepentingan melindungi penghasilan dan pekerjaan mereka; (ii) dua tipe kelompok bisnis yakni perusahaan dalam negeri yang berorientasi subsidi dan perlindungan negara, dan kelompok bisnis internasional yang akan merugi karena rendahnya nilai uang; dan (iv) anggota parlemen yang ingin mempertahankan kekuasaan dan kemakmuran dalam jabatannya. (Treisman, *Comparative Politics*, 2004)

Agar harga-harga kontrak dan saham dapat meningkat secara dramatis dalam waktu yang singkat, hak monopoli ekonomi muncul, kemudian secara esensial diperdagangkan dengan nilai transfer yang lebih tinggi antara para investor peminat. Hal ini membuktikan bahwa privatisasi juga memiliki dimensi fiskal, yaitu hal tersebut dapat

meningkatkan dana tunai untuk menutupi defisit yang jumlahnya sekitar 10 milyar dolar AS pada 1990-1994, sekaligus juga untuk menghapuskan beban kepemilikan surat utang negara sebesar 5 milyar dolar AS pada waktu itu. (Treisman, *Comparative Politics*, 2004).

Adanya pemberian bantuan yang cukup besar dan resiko bisnis yang cukup tinggi, sumber daya alam pun dimasukkan dalam pasar kapital, sehingga meningkatkan potensi konflik maupun peperangan, seperti layaknya perebutan ladang minyak yang banyak terjadi di seluruh dunia.

Dari ilustrasi singkat mengenai praktik privatisasi di Argentina tersebut, dapat terlihat benturan antara fenomena globalisasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Globalisasi, di lain sisi, telah mendesak percepatan pembangunan yang memadai bagi negara-bangsa atau *nation-state*. Dimensi dalam globalisasi khususnya ekonomi, menurut Goldin dan Reinert mencakup globalisasi perdagangan, globalisasi keuangan, globalisasi bantuan, globalisasi migrasi, dan globalisasi ide-ide. (Goldin dan Reinert, 2007)

Situasi globalisasi yang demikian telah membawa negara-negara beserta unit-unit di dalamnya yang lebih kecil ke dalam hubungan saling ketergantungan (interdependensi) yang lebih besar. Kelima dimensi globalisasi yang disebutkan oleh Goldin dan Reinert tersebut seringkali ditengarai sebagai dimensi yang salah kelola karena kurang memerhatikan kepentingan negara berkembang. Jika diasumsikan bahwa negara berkembang tidak memiliki akses dan pengetahuan terhadap perdagangan, serta tidak memiliki basis sosial ekonomi yang kuat, wajar jika negara berkembang kurang dapat menahan dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Hal tersebut misalnya ketidaksiapan menyongsong perdagangan bebas, tidak mampu bebas dari hutang luar negeri, serta tidak mampu kreatif dalam inovasi strategi dan kebijakan ekonomi politiknya.

Stiglitz menyebutkan bahwa institusi global dibentuk untuk meregulasi dan menghubungkan dimensi dunia yang lebih berkembang dengan yang kurang berkembang. Namun ketiga institusi tersebut, atau yang disebut sebagai pelaksana *Bretton Woods system*. Ia memaparkan bahwa ketiga institusi keuangan IMF, Bank Dunia, dan *World Trade Organization* (WTO) telah “mengkhianati janji-janjinya”. Stiglitz menyebutkan bahwa misi-misi organisasi tersebut adalah (a) mengentaskan kemiskinan, dan (b) mengatur stabilitas global. Namun angka kemiskinan terus bertambah, karena tidak mampu hidup dalam ekonomi yang serba *globalized*, di mana tidak semua negara mampu menyesuaikan diri terhadap arus perkembangannya. Di samping itu, *Washington Consensus* yang merupakan basis dari liberalisasi

perdagangan juga dianggap kurang sesuai untuk berbagai kondisi negara-negara di dunia. Stiglitz menyebutkan terdapat tiga pilar yang menyokong *Washington Consensus* adalah *fiscal austerity*, privatisasi, dan liberalisasi pasar. (Stiglitz, 2002)

Acemoglu mencontohkan bahwa bagaimana di negara-negara Afrika seperti di Ghana dan Zambia, petani tidak memiliki kekuatan politik, namun tidak di Kenya dan Kolombia yang lebih mapan dalam mengakomodasi hak-hak politik warganya. Gambaran sekilas tersebut menunjukkan bahwa negara-negara berkembang belum berada pada derajat yang sama untuk saling terintegrasi, layaknya negara-negara Eropa. (Acemoglu, 2005)

Dependensi atau ketergantungan dapat juga ditenggarai sebagai penyebab terjadinya *underdevelopment* karena praktik-praktik dominasi yang kuat dalam globalisasi. Seperti telah disebutkan dalam latar belakang, globalisasi ekonomi melingkupi aspek perdagangan, migrasi, bantuan, migrasi, bahkan ide-ide. Jika masyarakat tidak mampu memfilter semua yang masuk ke negaranya, tentu tingkat *competitiveness* dan pembangunannya akan menurun. Selanjutnya struktur hubungan sosial yang tercipta antara dunia *development* dengan *underdevelopment* dapat direfleksikan sebagai “*dependency*”, yang secara umum didefinisikan sebagai “situasi yang terkondisi di mana keadaan ekonomi dalam satu kelompok negara dikondisikan sebagai akibat dari pembangunan dan ekspansi negara lain”. (Santos, 1970)

Lake mengutip opini Kenneth Waltz yang memunculkan argumen dari keterpisahan antara kedaulatan domestik dan anarki internasional yang dihasilkan oleh globalisasi ekonomi, yang dilihatnya muncul dari dua kemungkinan (Lake, *International Studies Review*, 2005).

(a) negara-negara memiliki *economic interdependence*. Anarki internasional hanya mampu dikendalikan oleh *great powers* yang memiliki kekuasaan lebih besar. Dari sisi ini negara hanya direduksi menjadi sebuah unit ekonomi, yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan ini semakin tumbuh dari masa ke masa, namun ketergantungan ini juga merupakan produk dari pilihan-pilihan politik suatu negara.

(b) negara-negara dipandang melalui kacamata *dependence theory*. Hal ini berbasis pada kondisi negara-negara yang tidak sederajat. Wallerstein melihat hal ini dengan mengelompokkan negara ke dalam lingkaran konsentris pengaruh, yakni hubungan antara negara *core* dengan *periphery*. Negara berjalan bukannya tanpa pengaruh negara lain, sementara dependensi merupakan sebuah kondisi, dan bukannya merupakan pilihan. Tidak selamanya suatu negara berada pada kondisi ini, tergantung dari pilihan-pilihan politiknya. Apabila pilihan tersebut tepat, maka suatu

negara dapat saja keluar dari struktur *periphery*, seperti dilakukan negara-negara di Asia Timur dengan kebijakan industrialisasinya.

Analisis kebijakan terhadap alokasi *power* seharusnya ditempatkan pada inti permasalahan. Hal ini berlaku pula dalam institusi internasional, bukan hanya politik domestik. Negara-negara saat ini terbingkai dalam berbagai macam institusi internasional. Kedaulatan institusi internasional, terutama institusi supranasional tersebut, merupakan sumber dari stabilitas selama beberapa dekade ke belakang.

Penutup

Dalam interaksi hubungan internasional di bidang ekonomi-politik, kedaulatan negara sudah banyak direduksi, karena interdependensi juga berkembang, serta rezim ekonomi pasar yang cukup lama berdiri juga ikut menentukan tatanan kedaulatan masing-masing negara. Terbukanya hambatan-hambatan ekonomi juga dipengaruhi oleh kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum internasional, serta juga melemahkan kedaulatan negara dalam konteks yang lebih luas dan menjadikan *sovereignty* sebagai tatanan yang jelas-jelas tidak absolut.

Washington Consensus memikirkan bahwa sektor publik merupakan beban negara, karena tidak menghasilkan keuntungan. Namun, pada dasarnya negara dibentuk bukan untuk bertujuan mengakumulasi keuntungan, namun atas dasar solidaritas dan kolektivitas. Sehingga logika *Washington Consensus* menjadi terlalu sederhana, yang menyamakan fungsi negara dengan perusahaan. Hal tersebutlah yang akhirnya memicu resistensi masyarakat sipil, serta ketidakmampuan negara untuk sigap dalam menjalankan pengawasan dan manajemen terhadap privatisasi sektor publik.

Selain itu, yang tidak dapat dikesampingkan ialah peran *TNCs* yang sangat krusial, sebagai perpanjangan kepentingan negara asal *TNCs* tersebut untuk berinvestasi di suatu negara. Hadirnya *TNCs* adalah penanda utama dari proses globalisasi ekonomi neoliberal. Peran *TNCs* dalam dekade 1990-an ialah menjalankan sendiri seluruh kebijakan privatisasi. Peran ini meningkat setelah sebelumnya pada 1980-an kebijakan privatisasi dijalankan dengan menggandeng mitra swasta lokal.

Dari pemaparan tersebut, terdapat beberapa dimensi privatisasi dalam hubungannya dengan ekonomi-politik internasional, khususnya dalam perspektif globalisasi neoliberal.

1. Dimensi rezim internasional
2. Dimensi regional/nasional
3. Dimensi bisnis internasional

Negara tetap memegang peranan penting sebagai stabilisator dalam pelaksanaan privatisasi namun dengan syarat seluruh resiko bisnis dan politik yang muncul kelak dapat didistribusikan secara merata. Jika hal tersebut absen dalam implementasi privatisasi, negara tidak akan mampu memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi lembaga keuangan internasional sebagai aktor pengawas.

Kredibilitas negara sangat diperlukan jika ingin bergabung di kancah globalisasi ekonomi, untuk itu dasar hukum dan regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara yang tersisa dari segala bentuk liberalisasi ekonomi. Mekanisme jaring pengaman dalam arsitektur finansial domestik juga menjadi kunci keamanan transaksi ekonomi internasional dan sekaligus sebagai daya tarik pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi kinerja yang diharapkan dari praktik privatisasi juga harus mendapat pengendalian dari negara, jangan sampai negara hanya menjadi regulator yang menanggung resiko politik ketika perkembangannya tidak sesuai dengan estimasi. Pengembangan kemitraan yang lebih luas dengan berbagai negara dan juga TNCs sangat diperlukan untuk distribusi risiko politik tersebut.

Daftar Pustaka

- Dos Santos. 1970. *The Structure of Dependence*. Amer. Terbitan Jurnal Economic Review no. 60: 231 – 236.
- Goldin dan Reinert. *Globalization for Development Trade, Finance, Aid, Migration, and Policy*. 2007. Publikasi bersama Bank Dunia dan Palgrave Macmillan. Halaman 2.
- Kotz, David M. *Globalization and Neoliberalism*. Dari Jurnal *Rethinking Marxism* vol. 12, no.2. 2000. Halaman 64 – 67.
- Lake, David A.. *The New Sovereignty In International Relations*. International Studies Review (2005) vol 5. Halaman 303 – 323.
- Machado, Mary B.. 2009. *Privatization of Public Services Research Projects*. Laporan riset Shasta Voice, Redding. Halaman 1 – 2.
- Nellis, John 1994. *Is Privatization Necessary?* Diterbitkan dalam catatan publikasi Bank Dunia *Public Policy for The Private Sector*. FPD Note no. 7. Halaman 1 – 2.
- Review of World Bank Conditionality. 2005. *Modalities of Conditionality*. SecM2005-0390/1. Executive Summary, dirangkum dari paragraf 2

Shaikh, 1996 menyebutkan bahwa perusahaan yang memenangi penyisihan pertama kontrak kerja pelayanan air ialah Aguas Argentinas, SA yang dipimpin oleh *Lyonnaise-des-Eaux-Dumez* dari Perancis; *Aguas de Buenos Aires* yang dipimpin oleh *Thames Water PLC* dari Inggris, *Canal del Plata*, dipimpin oleh Ratu Isabel II dari Spanyol, serta *North West Water International* dari Inggris.

Stiglitz, Joseph. 2002. *Globalization and Its Discontents*. New York: Penguin Books. Halaman 23

Treisman, Daniel. 2004. *Stabilization Tactics in Latin America: Menem, Cardoso, and the Politics of Low Inflation*. Dalam jurnal *Comparative Politics*, Vol. 36, No. 4 edisi Juli 2004. Halaman 410.

Williamson, John. 1990. *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*. Washington D.C.: Institute for International Economics. Bagian Kedua.

PENULIS

Semmy Tyar Armandha adalah Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Ani Khoirunnisa dan Teresia Devina adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta.

Ziyad Falahi adalah Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur dan Direktur Riset Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta.

Denik Iswardani W dan Elistania adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta dan Alumnus Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Yusran adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta dan Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur Jakarta.

Dewa Ayu Putu Eva Wishanti adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Malang.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Artikel harus orisinal, tidak pernah dimuat di media lain termasuk blog, tidak bersamaan dikirim ke media lain dan merupakan penelitian dalam lingkup kajian ilmu hubungan internasional
2. Naskah diketik satu kolom menggunakan font Arial 11, 1,5 spasi 3000-5000 kata atau setara dengan 10 sampai 20 halaman.
3. Artikel dapat ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan format esai
4. Pengiriman file naskah dapat di email ke alamat : transnasional_bi@yahoo.co.id
5. Sistematika artikel adalah : Judul, Nama penulis (tanpa gelar akademik), lembaga/instansi, abstrak (jika naskah berbahasa Indonesia, maka abstrak berbahasa Inggris dan sebaliknya), kata kunci, Pendahuluan (latar belakang masalah, masalah), hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, lampiran (jika ada)
6. Judul artikel berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis terdiri dari empat orang atau lebih, maka hanya penulis utama yang dicantumkan dibawah judul artikel. Nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah.
7. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat email untuk memudahkan komunikasi
8. Sumber rujukan sebaiknya terbitan 10 tahun terakhir
9. Teknis perujukan dan pengutipan menggunakan catatan perut dan catatan kaki untuk informasi pelengkap, dengan format sebagai berikut : ([nama belakang], [tahun]: [halaman jika ada]). Contoh : (Stiglitz, 2009: 28)
10. Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada diatas, sedangkan judul pada gambar berada dibawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1,2,... dst).
11. Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.
12. Semua naskah ditelaah oleh reviewer yang ditunjuk oleh penyunting sesuai bidang kompetensinya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas rekomendasi dari reviewer.
13. Artikel dapat dibatalkan pemuatannya jika diketahui bermasalah. Kepastian pemuatan dan penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik (email) kepada penulis.
14. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan atau pengutipan dari berbagai sumber untuk pembuatan naskah yang dilakukan oleh penulis, menjadi tanggungjawab penulis yang bersangkutan berikut konsekuensi yang timbul karenanya.